



EITI Timor-Leste

Laporan Rekonsiliasi 2021



Pesan dari Kelompok Kerja Multi Pemangku Kepentingan Timor-Leste

Kelompok Multi-Pemangku Kepentingan (MSG) EITI Timor-Leste hari ini, 31 Maret 2024 menerbitkan laporan rekonsiliasi EITI ke-14 yang mencakup informasi atau data dari perusahaan ekstraktif yang beroperasi di Timor-Leste badan dan serta lembaga pemerintah Timor-Leste untuk tahun anggaran 2021.

Bagian utama EITI mengharuskan perusahaan ekstraktif untuk mengungkapkan pembayaran mereka kepada pemerintah dan untuk rekonsiliasi pembayaran ini dengan penerimaan pemerintah dari perusahaan ekstraktif ini. Proses 'rekonsiliasi' ini terjadi setiap tahun, dan untuk Laporan Rekonsiliasi 2021 ini, seperti tahun lalu dilakukan oleh Ernst & Young Audit & Associados – SROC, SA sebagai Administrator Independen. Laporan ini mematuhi persyaratan dari EITI Standard 2019. Laporan EITI ke-14 ini diterbitkan setelah validasi penerapan EITI standard 2019 pada bulan Juli 2022. Setelah validasi pada tahun 2022, Kelompok Multi-Pemangku Kepentingan (MSG) telah bekerja tanpa lelah untuk mengatasi kesenjangan dan rekomendasi yang ditemukan selama validasi. Administrator Independen telah bekerja sama erat dengan MSG untuk membantu MSG dalam menangani temuan validasi dan melakukan perbaikan yang diperlukan pada tata kelola sektor dan transparansi berdasarkan EITI standard.

Seperti tahun sebelumnya, Kelompok Multi-Pemangku Kepentingan Timor-Leste tetap berkomitmen untuk meningkatkan kinerja EITI di Timor-Leste dan terus mengatasi semua tantangan dalam menerapkan persyaratan EITI melalui laporan ini dengan mengungkapkan informasi yang dipilih berdasarkan entitas pelapor, jenis pendapatan, dan pelaporan tingkat proyek.

Dalam periode pelaporan ini, sebagian besar entitas pelapor relatif sama dari laporan terakhir, dengan informasi tambahan tentang sektor pertambangan. Berdasarkan ambang batas materialitas yang disepakati, terdapat dua puluh tujuh (27) operator (termasuk anak perusahaan) dan enam belas (16) subkontraktor dalam lingkup yang telah melapor untuk laporan ini, bersama dengan entitas pemerintah terkait.

Yang terakhir, MSG Timor-Leste ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam laporan tahun 2021 ini..

Hormat kami,

Industri

Pemerintah

Masyarakat Sipil

TIMOR GAP E.P.

Daftar Singkatan

APT	Pajak keuntungan Tambahan (Additional Profit Tax)	ANP	Otoritas Perminyakan Nasional (Autoridade Nacional do Petróleo ¹)
ASM	Pertambangan Skala Kecil Artisanal (Artisanal Small-Scale Mining)	ANPM	Otoritas Perminyakan dan Mineral Nasional (Autoridade Nacional do Petróleo e Minerais)
BOE	Barrel of Oil Equivalent	ANM	Otoritas Mineral Nasional (Autoridade Nacional dos Minerais)
BCTL	Bank Sentral Timor-Leste (Banco Central de Timor-Leste)	O&G	Minyak dan Gas (Oil & Gas)
CMATS	Pengaturan Maritim Tertentu di Laut Timor (Certain Maritime Arrangement in The Timor Sea)	PF	Dana Minyak (Petroleum Fund)
EITI	Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif (Extractive Industries Transparency Initiative)	PMC	Kode Pertambangan Minyak Bumi (Petroleum Mining Code)
ESI	Estimated Sustainable Income	PSC	Kontrak Bagi Hasil Produksi (Production Sharing Contract)
ETRS	Layanan Pendapatan Timor Lorosa'e (East Timor Revenue Services)	RDTL	Republik Demokratik Timor Leste
FTP	First Tranche Petroleum	SOE	Badan Usaha Milik Negara (State-Owned Enterprise)
GDP	Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Product)	SPT	Pajak Tambahan Minyak Bumi (Supplemental Petroleum Tax)
GDS	Direktorat Jenderal Statistik (General Directorate of Statistics)	TDA	Undang-Undang Pajak dan Bea (Taxes and Duties Act)
Govt	Pemerintahan (Government)	TL	Timor-Leste
IPMC	Kode Pertambangan Minyak Sementara (Interim Petroleum Mining Code)	TLEA	Wilayah Eksklusif Timor-Leste (Timor-Leste Exclusive Area)
IUA	Perjanjian Unitisasi Internasional (International Unitisation Agreement)	TOR	Terms of Reference
JC	Komisi Bersama (Joint Commission)	TSDA	Otoritas yang Ditunjuk di Laut Timor (Timor Sea Designated Authority)
JPDA	Area Pengembangan Minyak Bersama (Joint Petroleum Development Area)	TST	Perjanjian Laut Timor (Timor Sea Treaty)
LNG	Gas Alam Cair (Liquefied Natural Gas)	UNTAET	Administrasi Transisi PBB di Timor Timur (United Nation Transition Administration in East Timor)
MoF	Kementerian Keuangan (Ministry of Finance)	USD	Dolar Amerika Serikat (United States Dollars)
MOU	Memorandum of Understanding	PPN (VAT)	Pajak Pertambahan Nilai (Value Added Tax)
MPMR	Kementerian Perminyakan dan Sumber Daya Mineral (Ministry of Petroleum and Mineral Resources)	WHT	Pajak Pemotongan (Withholding Tax)
MSWG	Kelompok Kerja Multi-Pemangku Kepentingan (Multi-Stakeholder Working Group)	ZOCA	Zona Kerjasama Daerah (Zone Cooperation Area)
MBT	Maritime Boundary Treaty		
DNRPM	Direktorat Nasional Pendapatan Pertambangan dan Mineral (Direção Nacional de Receitas Petrolíferas e Minerais)		

¹ Catatan: Untuk klarifikasi dan rincian lebih lanjut mengenai singkatan ANP dan ANM (sebelumnya diidentifikasi sebagai ANPM), silakan lihat bagian spesifik 4.5 dalam laporan.

Daftar Isi

1.	Ringkasan Eksekutif	8
1.1	Pendapatan yang dihasilkan dari sektor ekstraktif	8
1.2	Produksi	9
1.3	Proses Rekonsiliasi	10
1.4	Ruang lingkup (Pendapatan dan Entitas)	11
1.5	Ringkasan laporan rekonsiliasi	13
2.	Inisiatif transparansi industri ekstraktif di Timor-Leste	15
2.1	EITI and Timor-Leste	15
3.	Tinjauan umum industri ekstraktif Timor-Leste pada tahun 2022 – Minyak & Gas	18
3.1	Tinjauan Umum Pendapatan Pemerintah	18
3.2	Produk Domestik Bruto (PDB) – Timor-Leste.....	19
3.3	Industri Ekstraktif	21
3.4	Produksi	22
3.4.1	Produksi dalam BOE.....	25
3.4.2	Produksi dalam USD.....	26
3.5	Pendapatan yang dihasilkan dari sektor ekstraktif	27
3.5.1	Pendapatan Pajak dan Bukan Pajak Pendapatan.....	29
3.5.2	Pertambangan.....	30
3.6	Kontribusi sektor Minyak & Gas terhadap lapangan kerja di Timor-Leste.....	31
4.	Kerangka Regulasi Industri Ekstraktif pada tahun 2021	36
4.1	Berita dalam kerangka regulasi industri ekstraktif Timor-Leste	36
4.2	Wilayah Hukum Eksklusif Timor-Leste (TLEA)	37
4.3	Bekas Kerangka Hukum Joint Petroleum Development Area (JPDA)	41
4.4	Perjanjian khusus dengan Australia terkait Eksplorasi Minyak & Gas	42
4.5	ANPM	47
4.5.1	Autoridade Nacional do Petróleo e Minerais (ANPM)	47
4.5.2	Autoridade Nacional do Petróleo (ANP) – setelah 2023.....	48
4.6	Petroleum Fund	49
4.7	Ringkasan proses pembayaran.....	54
4.8	Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (SOE's).....	55
4.9	Lisensi/Pengungkapan kontrak.....	58
4.10	Perspektif Masyarakat Sipil	59
5.	Rezim Pajak	61
5.1	TLEA – Wilayah Eksklusif Timor-Leste	61

5.2	Bekas JPDA – Ladang Bayu-Undan & Greater Sunrise.....	63
6.	Tinjauan umum industri ekstraktif Timor-Leste pada tahun 2021 - Pertambangan.....	67
6.1	TLEA – Wilayah Eksklusif Timor-Leste	67
6.2	Proses lisensi	69
6.3	Legislasi Lingkungan Hidup.....	70
6.4	Aktivitas pertambangan di Timor-Leste.....	71
7.	Metodologi dan pendekatan.....	75
7.1	Ruang lingkup dan IA.....	75
7.2	Ambang batas materialitas untuk pengungkapan perusahaan	77
7.3	Pengumpulan data	80
7.4	Jaminan data	81
7.5	Pertimbangan lain	82
8.	Rekonsiliasi pajak dan pembayaran lainnya	84
8.1	Hasil umum rekonsiliasi pembayaran.....	84
8.2	Hasil umum rekonsiliasi pembayaran – Perusahaan Ekstraktif	85
8.2.1	Pembayaran dari perusahaan ekstraktif Minyak & Gas dalam Ruang lingkup – Dilaporkan oleh Pemerintah.....	85
8.2.2	Perusahaan ekstraktif – menyesuaikan oleh Pemerintah	88
8.2.3	Pembayaran dari perusahaan ekstraktif Minyak & Gas dalam Ruang lingkup – Dilaporkan oleh Entitas.....	90
8.2.4	Perusahaan ekstraktif – menyesuaikan oleh Kontraktor	92
8.2.5	Perusahaan ekstraktif – Hasil Rekonsiliasi	93
8.2.6	Perusahaan ekstraktif – Perbedaan yang tidak direkonsiliasi	94
8.3	Hasil umum rekonsiliasi pembayaran – Subkontraktor	95
8.3.1	Pembayaran dari subkontraktor Minyak & Gas dalam Ruang lingkup – Dilaporkan oleh Pemerintah.....	95
8.3.2	Subkontraktor – menyesuaikan oleh Pemerintah	96
8.3.3	Pembayaran dari subkontraktor Minyak & Gas dalam Ruang lingkup – Dilaporkan oleh Entitas	97
8.3.4	Subkontraktor – menyesuaikan oleh Entitas.....	98
8.3.5	Subkontraktor – Hasil rekonsiliasi.....	99
8.3.6	Subkontraktor – Perbedaan yang tidak direkonsiliasi	100
8.4	Ringkasan hasil rekonsiliasi.....	102
8.5	Biaya jaringan pipa	103
8.6	Pembayaran di sektor pertambangan	104
9.	Beneficial Ownership.....	108
9.1	Kebijakan pemerintah dan kerangka hukum	108
9.2	Kualitas Data	114

10.	Mainstreaming	117
11.	Pengeluaran Sosial & Ekonomi	119
11.1	Pengeluaran sosial	119
11.2	Pengeluaran lainnya	121
12.	Rekomendasi	123
13.	Lampiran	127
A.	Perusahaan di Sektor Minyak & Gas	127
B.	Sektor Mineral pada tahun 2021	129
C.	Pembayaran Mineral pada tahun 2021	130
D.	Pembayaran Mineral pada tahun 2020	131
E.	Daftar Lisensi 2006-2022	133
F.	Production Sharing Contract	148
G.	Sumber daya Minyak & Gas Bawah Laut	153
H.	Blok Darat TIMOR GAP	154



Ringkasan Eksekutif

Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif (EITI), yang diluncurkan pada tahun 2003, mempromosikan dan mendukung tata kelola dan transparansi yang lebih baik di negara-negara kaya sumber daya melalui publikasi dan audit penuh atas pembayaran perusahaan dan pendapatan pemerintah dari minyak, gas, dan pertambangan. Sebagai komitmen sukarela para pemangku kepentingan dengan tujuan bersama, struktur EITI global terdiri dari negara-negara kaya sumber daya, perusahaan ekstraktif internasional dan nasional, masyarakat sipil, investor, dan negara-negara pendukung. Setiap negara peserta harus menerbitkan laporan rekonsiliasi yang mencakup pendapatan untuk tahun fiskal terbaru yang disiapkan oleh auditor independen sesuai dengan EITI Standard.

Ini adalah laporan EITI kelima belas Timor-Leste, yang mencakup periode 1 Januari hingga 31 Desember 2022. Sesuai dengan EITI Standard, proses pelaporan telah diawasi oleh Kelompok Kerja Multi-pemangku kepentingan (MSWG), dan telah disusun oleh Administrator Independen, EY sesuai dengan kontrak layanan tertanggal 8 November 2023.

Pembayaran dan pendapatan, yang diungkapkan dalam laporan ini, mencakup pembayaran pajak dan bukan pajak, dan pembayaran lain yang ditetapkan oleh Legislasi Timor-Leste.

Melalui partisipasi dalam EITI, Timor-Leste berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tentang bagaimana sumber daya alam negara tersebut dikelola, mendorong debat publik dan pemahaman tentang sektor ekstraktif, serta meningkatkan daya tarik Timor-Leste sebagai tujuan investasi asing.

1

1. Ringkasan Eksekutif

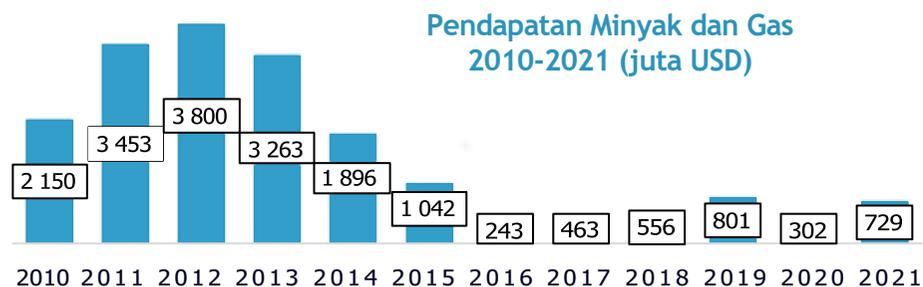
1.1 Pendapatan Yang Dihasilkan Dari Sektor Ekstraktif

Pada tahun 2021, Petroleum Fund Timor-Leste melaporkan entri kas minyak & gas sebesar USD 720 juta. Setelah mempertimbangkan penyesuaian batas tambahan dari ANPM, MSWG menyimpulkan bahwa pendapatan yang dikumpulkan dari Minyak & Gas oleh Timor-Leste pada tahun 2021 berjumlah USD 729 juta, yang selanjutnya digunakan untuk tujuan rekonsiliasi. Silakan lihat Bagian 3.5 "Pendapatan yang dihasilkan dari sektor ekstraktif" untuk mengamati rekonsiliasi antara pendapatan yang dilaporkan oleh PF dan entitas Pemerintah pada templat EITI.

Sejak ratifikasi MBT, yang meningkatkan porsi produksi dan pajak Timor-Leste dari 90% menjadi 100%, semua pendapatan yang dikumpulkan dialokasikan ke Timor-Leste.

Pendapatan minyak dan gas telah meningkat sejak tahun 2016. Namun, lanskap ekonomi global, termasuk kegiatan terkait minyak bumi di Laut Timor, terganggu secara signifikan oleh pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Selama tahun 2021, aktivitas ekonomi melemah akibat wabah COVID-19 baru dan dampak Siklon Seroja. Meskipun pada awalnya berhasil menahan penyebaran COVID-19, lonjakan kasus baru-baru ini yang dikombinasikan dengan banjir pada awal April hanya menghasilkan pemulihan ekonomi yang sederhana jika kita mengabaikan kegiatan ekonomi terkait minyak.

Total pendapatan minyak bumi yang terkumpul selama tahun.

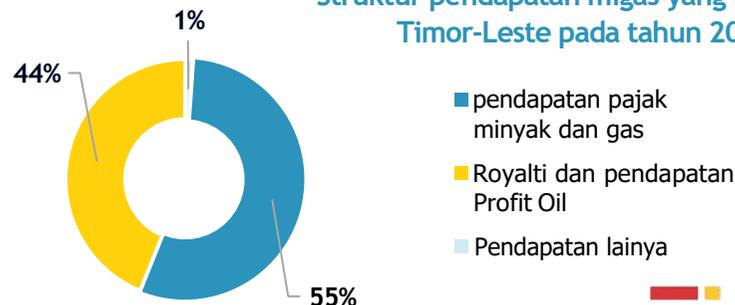


Pendapatan ini terdiri dari USD 400 juta dari pajak minyak bumi, USD 318,5 juta dari royalti dan profit oil dan gas, dan USD 10,5 juta dari utang lain, termasuk biaya jaringan pipa dan biaya lain yang terkumpul dari layanan kontrak dan biaya pengembangan. Royalti dan pendapatan profit oil pada tahun 2021 lebih tinggi 128% dari tahun sebelumnya terutama karena harga yang lebih tinggi dan sedikit peningkatan produksi (2021: USD 318,5 juta; 2020: USD 140 juta). Harga minyak rata-rata pada tahun 2021 adalah USD 70,7/b, hampir USD 30/b lebih tinggi dari rata-rata tahun sebelumnya. Sementara itu, produksi minyak dan gas sedikit meningkat dari 35,6 juta BOE pada tahun 2020 menjadi 36,1 juta BOE pada tahun 2021. Total produksi dari tahun 2004 hingga 2021 adalah 935 juta BOE. Untuk informasi lebih rinci, silakan lihat Bagian 3.4.1 "Produksi dalam BOE".

Untuk tahun 2021, pendapatan pajak minyak bumi melonjak lebih dari 174% dibandingkan tahun sebelumnya, naik dari USD 146 juta pada tahun 2020 menjadi USD 400 juta. Peningkatan signifikan ini didorong oleh pertumbuhan substansial dalam penerimaan Pajak Penghasilan Perusahaan dan Pajak Keuntungan Tambahan.

Grafik pertama menunjukkan data historis pendapatan dari sebelas tahun terakhir, berdasarkan laporan EITI sebelumnya. Grafik ini menggambarkan penurunan pendapatan yang parah sejak tahun 2012, sedikit peningkatan sejak tahun 2016, dan pemulihan moderat sejak tahun 2020 menyusul dampak COVID-19 dan bencana alam. Pada gambar kedua, ditampilkan struktur arus kas yang diterima dari kegiatan Perminyakan pada tahun 2021.

Struktur pendapatan migas yang diterima Timor-Leste pada tahun 2021



Ringkasan Eksekutif

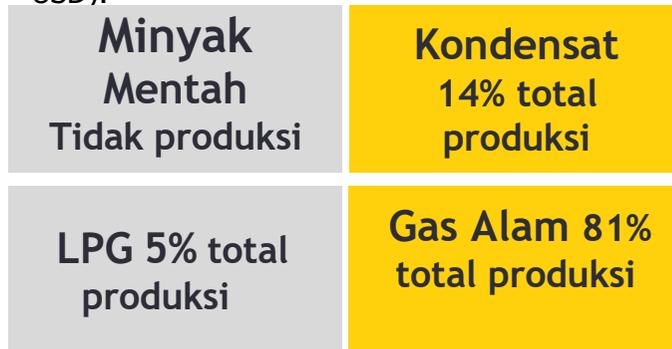
1.2 Produksi

Pada tahun 2021, seluruh minyak dan gas Timor-Leste bersumber dari lapangan Bayu-Undan, yang terletak di wilayah lepas pantai yang sebelumnya dikenal sebagai JPDA. Tiga jenis produk minyak bumi, yaitu Kondensat, Liquefied Petroleum Gas, dan Gas Alam, diproduksi di Bayu-Undan. Lapangan ini telah menjadi satu-satunya sumber produksi sejak lapangan Kitan berhenti beroperasi pada bulan Desember 2015.

Produksi dalam USD ('000) berdasarkan komoditas²:

komoditas	2021	2020	Variasi	Variasi(%)
Minyak Mentah	-	-	-	0%
kondensat	306 368	158 837	147 531	93%
Gas Alam	1 830 686	541 598	1 289 088	238%
LPG	112 981	66 190	46 791	71%
Total	2 250 035	766 625	1 483 410	193,5%

Persentase produksi berdasarkan komoditas (dalam jumlah moneter - USD):



² Sumber: Templat di sediakan oleh ANPM dengan data 2021 & templat perusahaan Ekstraktif.

³ [ANPM Annual Report 2021 – Chapter 2.5 marketing performance](#)

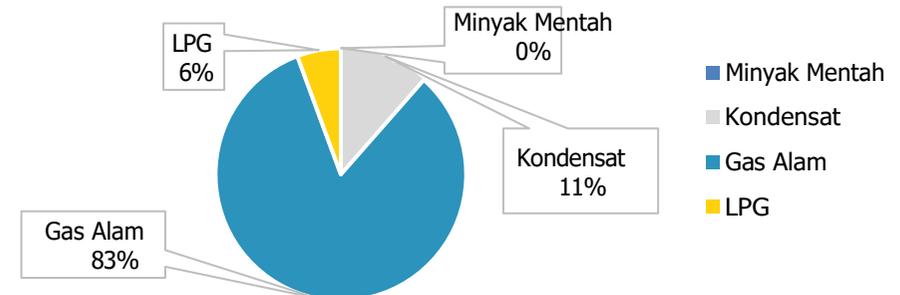
⁴ Terdapat perbedaan volume LNG antara templat ANPM dan data di situs web ANPM karena penggunaan faktor konversi yang berbeda. Untuk rekonsiliasi dengan entitas ekstraktif, kami menggunakan data ANPM yang dikirimkan dalam templat. Untuk detail lebih lanjut, silakan lihat Bagian 3.4.1.

Harga yang lebih tinggi sejak pandemi telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan yang diterima pemerintah. Harga minyak meningkat karena meningkatnya tingkat vaksinasi COVID-19, berkurangnya pembatasan pandemi, dan meningkatnya aktivitas ekonomi, karena dampaknya terhadap pertumbuhan permintaan lebih cepat daripada pasokan. Pasar LPG internasional tumbuh pesat karena efektivitas biaya dan energi bersih³.

Produksi dalam **volume**⁴ ('000) berdasarkan perusahaan dan komoditas:

Perusahaan Ekstraktif	Kondensat	Gas Alam	LPG
Santos ⁵	2 157 700	15 761 395	1 050 959
SK (BU 12 & BU 13)	692 846	4 728 458	346 668
Inpex	473 916	3 406 533	232 362
ENI	457 583	3 289 127	224 354
TTSR	383 111	2 753 820	187 840
Total	4 165 156	29 939 333	2 042 183

Produksi **dalam volume** ('000) berdasarkan komoditas:



⁵ Di Mei 2021, Santos Limited ("Santos") yang memiliki 68.4% saham partisipasi menjual 25% saham di Bayu-Undan kepada BU12 Australia PTY LTD dan BU13 Australia PTY LTD, sehingga mengurangi saham Santos di Bayu-Undan menjadi 43.4%.

Ringkasan Eksekutif

1.3 Proses Rekonsiliasi

EY ditugaskan untuk melaksanakan studi ruang lingkup guna menetapkan ruang lingkup rekonsiliasi EITI yang digunakan untuk laporan ke-14 dan untuk menghasilkan draf laporan pengumpulan data. Penugasan ini merupakan langkah awal untuk memulai proses rekonsiliasi.

Prosedur yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Melakukan pemilihan entitas berdasarkan ambang batas yang disetujui MSWG (pembayaran dan aliran pendapatan di atas USD 100.000);

Memperoleh informasi tahun 2021 tentang pajak, bukan pajak, dan pembayaran lainnya dari perusahaan ekstraktif dan otoritas pemerintah;

Perwakilan Kementerian Perminyakan dan Mineral (MPM) mengeluarkan instruksi yang meminta entitas ekstraktif dan lembaga pemerintah untuk melaporkan sesuai dengan persyaratan EITI. Templat pelaporan disediakan secara elektronik melalui email dan entitas diharuskan untuk melaporkan langsung kepada administrator, EY.

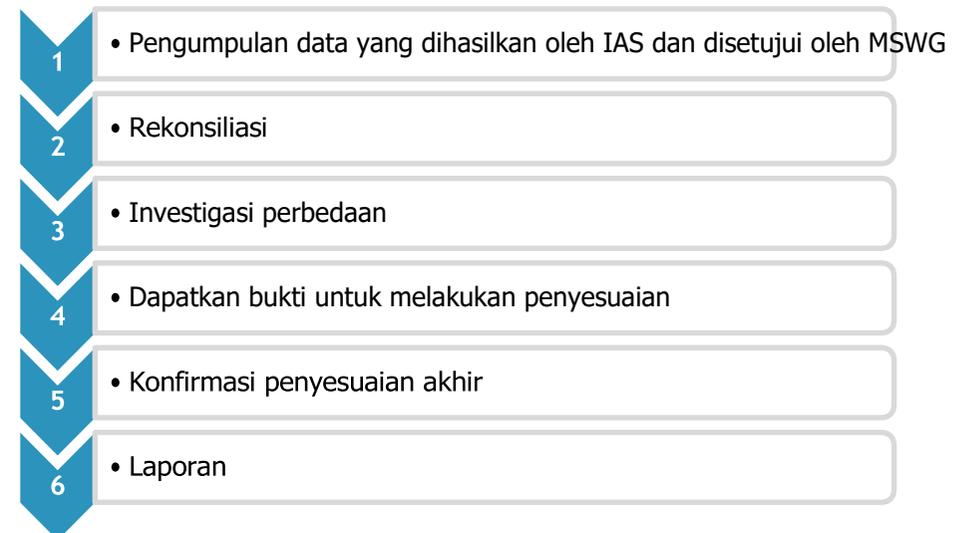


Setelah pengumpulan data, EY memulai proses rekonsiliasi. Entitas yang tidak responsif dilaporkan ke sekretariat TL EITI dan upaya baru untuk menghubungi dilakukan untuk mendapatkan informasi.

Jika terjadi perbedaan, kontak langsung antara IA dan entitas pelapor dilakukan dan dukungan yang memadai diminta (jika berlaku) untuk mendukung menyesuaikan.

Jika penjelasan yang diterima tidak meyakinkan, pertanyaan alamat baru diajukan ke otoritas pemerintah terkait untuk mendapatkan informasi terperinci tentang pembayaran.

Jika berdasarkan penjelasan yang diterima dari perusahaan dan otoritas pemerintah, perbedaan tetap tidak dapat dijelaskan, maka perbedaan tersebut dianggap, pada laporan EITI, sebagai perbedaan yang tidak direkonsiliasi.



Ringkasan Eksekutif

1.4 Ruang Lingkup (Pendapatan dan Entitas)

Entitas Pemerintah yang terlibat dalam operasi minyak dan gas Timor adalah sebagai berikut:

ENTITAS PEMERINTAH
DIREÇÃO NACIONAL DE RECEITAS PETROLÍFERAS E MINERAIS (DNRPM)
AUTORIDADE NACIONAL DO PETRÓLEO E MINERAIS (ANPM)
BANCO CENTRAL DE TIMOR-LESTE (BCTL)
TIMOR GAP E.P. (SOE)
PETROLEUM FUND (PF)

Berdasarkan informasi yang diterima oleh entitas-entitas ini dan ambang batas yang disetujui oleh MSWG, entitas-entitas yang masuk dalam ruang lingkup dipilih sebagaimana tercantum dalam Lampiran A untuk Perusahaan-perusahaan di Sektor Minyak & Gas.

Aliran pendapatan dan entitas dalam lingkup adalah sebagai berikut:

ALIRAN PENDAPATAN MINYAK DAN GAS DALAM RUANG LINGKUP
PENDAPATAN PAJAK
TIMOR-LESTE WIT KARYAWAN RESIDEN DAN TIMOR-LESTE WIT KARYAWAN NON-RESIDEN
TIMOR-LESTE RESIDEN ATAU PE PAJAK WHT DAN TIMOR-LESTE NON-RESIDEN ATAU NON-PE PAJAK WHT
PPN (VAT)
CORPORATE INCOME TAX
ADDITIONAL PROFIT TAX

ALIRAN PENDAPATAN MINYAK DAN GAS DALAM RUANG LINGKUP
PENERIMAAN BUKAN PAJAK
FTP
ROYALTIES
PROFIT OIL & GAS PAYMENTS
CONTRACT SERVICES FEE
DEVELOPMENT FEE
SEISMIC DATA FEE
SURFACE RENTAL FEE

Tabel di bawah ini menggambarkan kontraktor yang melakukan pembayaran di atas ambang batas kepada pemerintah terkait kegiatan minyak & gas (termasuk pembayaran pajak dan bukan-pajak), meskipun faktanya MSWG sepakat memilih semua kontraktor yang berada di atas ambang batas.

ENTITAS MINYAK & GAS DALAM RUANG LINGKUP KONTRAKTOR	
BU-12 Australia Pty Ltd	Inpex Timor Sea Ltd
BU-13 Australia Pty Ltd	SundaGas Banda Unipessoal, Lda
Carnarvon Petroleum Timor Unip Lda	TIMOR GAP Onshore Block, Unipessoal, Lda
Santos NA Emet Pty Ltd	TIMOR GAP GREATER SUNRISE 03-19, Unip Lda
Santos NA (19-12) Pty Ltd	TIMOR GAP Greater Sunrise RL, Unip Lda da
Santos NA (19-13) Pty Ltd	TIMOR GAP Greater Sunrise RL2, Unip Lda
Santos NA Timor Sea Pty Ltd	TIMOR GAP Greater Sunrise 03-20, Unip Lda
Santos NA Bayu-Undan Pty Ltd	TIMOR GAP Offshore Block, Unip Lda
Santos (JPDA 91-12) Pty Ltd	TIMOR GAP PSC 11-106 Unip Lda
Eni JPDA 03-13 Ltd	TIMOR GAP Onshore Block Unip Lda
Eni JPDA 06-105 Pty Ltd	Timor Resources Pty Ltd
Eni JPDA 11-106 B.V	Tokyo Timor sea Resources Pty Ltd
Eni Timor Leste S.P.A	Woodside Energy Pty Ltd
Inpex Sahul Ltd	

Ringkasan Eksekutif

1.4 Ruang Lingkup (Pendapatan dan Entitas)

Seperti tahun-tahun sebelumnya, MSWG telah memilih untuk memasukkan pembayaran pajak yang dilakukan oleh Subkontraktor Minyak & Gas ke dalam proses rekonsiliasi. Hal ini dilakukan untuk mencatat kontribusi mereka terhadap pendapatan sektor tersebut secara akurat pada tahun 2021. Kriteria yang sama yang digunakan sebelumnya diterapkan untuk memilih entitas ekstraktif yang masuk dalam cakupan - yaitu mereka yang melakukan pembayaran ke aliran pendapatan signifikan di atas USD 100.000:

ENTITAS MINYAK DAN GAS DALAM RUANG LINGKUP SUBKONTRAKTOR	
Konnekto Unipessoal Lda	MMA Offshore Vessel Operation Pty
Brunel Energy Pty Ltd	Noble Services International Limited
Caltech Unipessoal Lda	Noble Contracting II GMBH
Cameron Services International Pty Ltd	Rigforce Pty Ltd
Cape Australia Onshore Pty Ltd	Santos NA Timor Leste Pty Ltd
Clough Amec Pty Ltd	Schlumberger Australia P/L
Normant Driff AS Timor, Unipessoal Lda	SGS AUSTRALIA PTY LTD
Oceaneering Aust Pty Ltd	Sodexo Timor Unip Lda

Aliran pendapatan untuk subkontraktor dalam cakupan adalah sebagai berikut:

ALIRAN PENDAPATAN MINYAK DAN GAS DALAM RUANG LINGKUP
PENDAPATAN PAJAK
TIMOR-LESTE WIT KARYAWAN RESIDEN DAN TIMOR LESTE WIT KARYAWAN NON-RESIDEN
TIMOR-LESTE RESIDEN ATAU PE PAJAK WHT DAN TIMOR-LESTE NON-RESIDEN ATAU NON-PE PAJAK WHT
PPN (VAT)
CORPORATE INCOME TAX
ADDITIONAL PROFIT TAX

Berdasarkan hasil seleksi yang telah dilakukan, kami menyimpulkan bahwa Laporan EITI 2021 mencakup 99% dari total pendapatan, dari total jumlah entitas yang terpilih, setara dengan 1% dari total pendapatan dalam cakupan tidak terjawab selama proses sirkularisasi entitas.

Total jumlah dalam cakupan adalah sebagai berikut:

Pendapatan yang dihasilkan pada tahun 2021	Total	Jumlah (USD Juta)	
		Ruang lingkup	% ruang lingkup
Total Penerimaan Pajak yang Dilaporkan Mof	400	399	99,87%
Total Pendapatan Bukan Pajak yang dilaporkan ANPM - Royalti dan profit O&G	319	319	100,00%
Total Pendapatan Bukan Pajak yang dilaporkan oleh ANPM - Biaya	5	5	100,00%
Total Pendapatan bukan-Pajak yang dilaporkan oleh BCTL	6	6	100,0%
Total pendapatan yang dilaporkan oleh entitas pemerintah	730	729	99,93%
Biaya lain yang diduplikasi oleh entitas dalam pelaporan (lihat catatan di bawah)	-1	-1	100,00%
Total pendapatan O&G Timor-Leste	729	728	99,93%
Total Pendapatan Kontraktor	721	721	100%
Total Pendapatan Subkontraktor	8	7	93,48%

Setelah proses rekonsiliasi antara badan-badan pemerintah, ditetapkan bahwa MoF melaporkan jumlah biaya pembangunan dari ANPM. Untuk melihat secara rinci rekonsiliasi pendapatan antara PF dan badan-badan pemerintah sebagaimana dilaporkan pada templat EITI, lihat Bagian 3.5 dan Bagian 8. Untuk tujuan rekonsiliasi, jumlah dalam tabel telah dibulatkan ke jutaan terdekat.

Ringkasan Eksekutif

1.5 Ringkasan Laporan Rekonsiliasi

Kontraktor



Subkontraktor



Pendapatan yang dihasilkan pada tahun 2021	Total	Jumlah (USD Juta)	
		Ruang lingkup	% ruang lingkup
Total Penerimaan Pajak yang Dilaporkan Mof	392	392	100,00%
Total Pendapatan Bukan Pajak yang dilaporkan ANPM - Royalti dan profit O&G	319	319	100,00%
Total Pendapatan Bukan Pajak yang dilaporkan oleh ANPM - Biaya	5	5	100,00%
Total Pendapatan bukan-Pajak yang dilaporkan oleh BCTL	6	6	100,00%
Total pendapatan yang dilaporkan oleh entitas pemerintah	722	722	100,00%
Biaya lain yang digandakan oleh Kementerian Keuangan dalam pelaporan	-1	-1	100,00%
Total Pendapatan Kontraktor	721	721	100,00%

Pendapatan yang dihasilkan pada tahun 2021	Total	Jumlah (USD Juta)	
		Ruang lingkup	% ruang lingkup
Total Penerimaan Pajak yang Dilaporkan Mof	8	7,5	93,48%
Total Pendapatan SubKontraktor	8	7,5	93,48%

Silakan lihat Bagian 3.5 untuk mengamati rekonsiliasi antara pendapatan yang dilaporkan oleh PF dan entitas Pemerintah pada templat EITI. Untuk tujuan rekonsiliasi, jumlah dalam tabel telah dibulatkan ke jutaan terdekat.



Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif di Timor-Leste

2

Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif (EITI) merupakan kerangka kerja yang mendorong negara-negara untuk bersikap transparan dalam pengungkapan pendapatan yang diperoleh dari ekstraksi sumber daya alam.

Timor-Leste mematuhi EITI untuk memberikan laporan yang jelas dan akuntabel tentang pendapatan dan pembayaran kepada Pemerintah dari perusahaan minyak, gas, dan pertambangan, baik dari pembayaran pajak maupun bukan pajak yang diperoleh dari produksi dan penjualan sumber daya alam yang diekstraksi. Rekonsiliasi keuangan, oleh pihak eksternal, dilakukan untuk memverifikasi angka-angka tersebut dan hasil rekonsiliasi dipublikasikan dalam laporan EITI tahunan. Warga negara dan organisasi masyarakat sipil juga diharapkan berperan dalam memantau proses EITI.

Kantor Sekretariat TL-EITI dibentuk pada bulan Juli 2008, di bawah Kementerian Perminyakan dan Mineral serta Kelompok Kerja Multi-Pemangku Kepentingan (MSWG). MSWG mencakup perwakilan dari pemerintah, asosiasi perusahaan industri ekstraktif, dan organisasi masyarakat sipil (CSO).

2. Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif di Timor-Leste

2.1 EITI dan Timor-Leste

Konteks EITI

Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif merupakan standar global yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan mendorong tata kelola yang baik di sektor minyak dan gas dan pertambangan.

EITI Standard mendalilkan bahwa negara-negara pelaksana harus mengungkapkan data keuangan dan bukan-keuangan dari industri ekstraktifnya, memerangi korupsi, dan mempromosikan transparansi negara.

Pada tahun 2019, EITI Standard 2019 diterbitkan, menggantikan EITI Standard 2016, yang bertujuan untuk menjadi lebih inklusif, terperinci, dan jelas.

Pada tanggal 12 Juni 2023, EITI meluncurkan EITI Standard yang diamandemen. Standard baru tersebut mencakup beberapa ketentuan baru dan yang disempurnakan untuk memperkuat pengungkapan dan tata kelola EITI. Negara-negara pelaksana EITI akan dinilai berdasarkan EITI Standard 2023 mulai 1 Januari 2025.

Khusus untuk Timor-Leste, penyusunan laporan pertama berdasarkan standard baru ini diharapkan mengacu pada tahun fiskal 2022 dan diterbitkan pada akhir tahun 2024. Laporan EITI saat ini untuk tahun 2021 akan disiapkan sesuai dengan EITI standard 2019 dan standar profesional internasional.

Menerapkan dan mengelola tujuan EITI di Timor-Leste

Di Timor-Leste, keterlibatan EITI bertujuan untuk memberikan laporan yang jelas dan ringkas tentang pendapatan dan pembayaran kepada Pemerintah Timor-Leste dari perusahaan minyak, gas, dan pertambangan, dalam bentuk pembayaran dan penerimaan pajak dan bukan pajak yang diperoleh dari produksi dan penjualan sumber daya ini. Rekonsiliasi keuangan angka-angka ini oleh pihak eksternal dilakukan untuk memverifikasi angka-angka ini, dan rekonsiliasi yang dihasilkan dipublikasikan dalam laporan EITI tahunan.

Pada tahun 2010, Timor-Leste menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang dinyatakan patuh terhadap EITI.

Meskipun demikian, Timor-Leste belum meresmikan Undang-Undang EITI. Meskipun beberapa amandemen dalam legislasi Timor-Leste untuk industri ekstraktif telah dilaksanakan untuk mematuhi persyaratan pelaporan EITI

Kelompok multi-pemangku kepentingan EITI Timor-Leste

Sehubungan dengan penanggung jawab pengelolaan EITI, kantor Sekretariat TL-EITI didirikan pada tahun 2008 dengan tujuan mendukung Kelompok Kerja Multi-Pemangku Kepentingan (MSWG) dengan mengelola kontak dengan entitas yang tercakup dan menyediakan laporan akhir. Selain itu, Sekretariat bertanggung jawab untuk mempromosikan EITI di sektor publik dan swasta, mengatur pertemuan dan menyelenggarakan lokakarya dan seminar untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya EITI bagi Timor-Leste. Warga negara dan organisasi masyarakat sipil juga berperan dalam memantau proses EITI.

Keterlibatan Administrasi Independen

Kerangka kerja EITI mengharuskan administrator independen (IA) untuk merekonsiliasi data keuangan antara pembayaran perusahaan dan pendapatan aktual yang diterima Pemerintah. EY ditunjuk untuk menetapkan ruang lingkup Laporan EITI ke-14th untuk tahun 2021.

Laporan EITI tahunan sebelumnya mencakup periode 1 Januari 2008 hingga 31 Desember 2020:

Tahun	Data Publikasi	Pendapatan Minyak (USD juta)	Auditor Independen
2008	Oktober 2009	2,510	Deloitte
2009	Februari 2011	1,764	
2010	November 2012	2,150	Moore Stephens LLP
2011	Desember 2012	3,453	
2012	Februari 2015	3,800	
2013	Desember 2015	3,263	
2014	Juni 2017	1,896	EY
2015	Desember 2017	1,042	
2016	Juni 2019	243	
2017	Desember 2019	463	
2018	Desember 2020	556	
2019	Maret 2022	801	
2020	Desember 2022	302	

Lebih jauh, Sekretariat telah menyusun Laporan Kemajuan Tahunan sejak tahun 2011 untuk mengklarifikasi dan mengevaluasi kemajuan dalam memenuhi persyaratan EITI Standard dan dalam mengikuti rekomendasi IA.

Kemajuan EITI di Timor-Leste

Timor-Leste bergabung dengan EITI pada tahun 2008 dan validasi pertama dimulai pada tanggal 1 Juli 2016. Dewan sepakat bahwa Timor-Leste telah membuat kemajuan yang berarti secara keseluruhan dalam penerapan EITI Standard 2016. Dalam mengambil keputusan ini, Dewan EITI mencatat komitmen kuat Pemerintah Timor-Leste terhadap penerapan EITI dan pengawasan efektif yang diberikan oleh Kelompok Kerja Multi-Pemangku Kepentingan Timor-Leste.

⁶ Sumber: [Timor-Leste 2022 Validation Report](#)

Validasi kedua Timor-Leste dimulai pada 11 Januari 2018. Dewan EITI sepakat bahwa Timor-Leste telah sepenuhnya menangani tindakan perbaikan dari Validasi pertama negara tersebut. Akibatnya, Timor-Leste telah membuat kemajuan yang memuaskan secara keseluruhan dalam menerapkan EITI Standard 2016.

Pada bulan Februari 2023, Sekretariat Internasional EITI menerbitkan Lapornya tentang validasi Timor-Leste yang telah dilakukannya pada tahun 2022, yang menemukan bahwa Timor-Leste telah sepenuhnya memenuhi (fully met) 11 Persyaratan EITI, sebagian besar memenuhi (mostly met) sembilan dan sebagian memenuhi (partly met) enam. Skor total yang dicapai dalam penerapan EITI Standard 2019 dinilai sebagai "cukup rendah" pada 58 poin, yang mencerminkan rata-rata dari tiga skor komponen pada Keterlibatan pemangku kepentingan, Transparansi, dan Hasil dan dampak.

Validasi Sekretariat Internasional untuk Timor-Leste menekankan bahwa MSG terutama berfokus pada kepraktisan laporan EITI konvensional dan dengan demikian, bidang-bidang lain seperti penjangkauan, penyebaran, tindak lanjut rekomendasi EITI, dan tinjauan tahunan atas hasil dan dampak EITI telah diabaikan. Rencana kerja TL-EITI tahunan telah menunjukkan sedikit perubahan sejak validasi terakhir dan kurang selaras dengan prioritas nasional dari ketiga konstituen. Lebih jauh, sedikitnya upaya yang dilakukan untuk menyebarkan temuan EITI sejak 2018 dan kurangnya kebijakan data terbuka yang terdefinisi dengan baik untuk TL-EITI juga menimbulkan masalah. Hasilnya adalah bahwa data EITI tidak dipublikasikan secara terbuka, sehingga pekerjaan Administrator Independen terbatas pada persiapan berkas data ringkasan EITI. Tantangannya termasuk kebutuhan MSG untuk memperkuat perencanaan dan mekanisme untuk menindaklanjuti rekomendasi EITI, dan untuk memastikan rekomendasi ini menghasilkan kebijakan yang berarti dan reformasi praktis.

Di delapan bidang, Dewan EITI Internasional mengidentifikasi beberapa kemunduran jika dibandingkan dengan validasi sebelumnya. Dewan memberikan waktu kepada Timor-Leste hingga April 2025 untuk memperbaiki kekurangannya⁶.



Tinjauan Industri Ekstraktif Timor-Leste Pada Tahun 2021 - Minyak & Gas

Pendapatan minyak dan gas terus memainkan peran penting sebagai sumber pendapatan bagi Timor-Leste. Dana Kekayaan Perminyakan dan hasil investasinya telah digunakan untuk membiayai anggaran nasional untuk pembangunan infrastruktur. Meskipun Timor-Leste terus mengalami perbaikan ekonomi, negara ini tetap sangat bergantung pada minyak. Selama beberapa tahun terakhir, Timor-Leste telah mengalami periode pertumbuhan ekonomi yang kuat, yang sebagian besar didasarkan pada pengeluaran publik dan aktivitas sektor swasta yang didorong oleh pendapatan minyak & gas.

3. Tinjauan industri ekstraktif Timor-Leste pada tahun 2021 – Minyak & Gas

3.1 Tinjauan Pendapatan Pemerintah

Perekonomian Timor-Leste masih sangat bergantung pada minyak dan gas

Dalam hal produksi yang diharapkan, sebagaimana dicatat dalam laporan sebelumnya, ladang Bayu-Undan, yang saat ini beroperasi, telah mencapai kematangan dan produktivitasnya secara bertahap menurun sejak puncaknya pada tahun 2012. Selama beberapa tahun terakhir, Timor-Leste telah mampu menstabilkan produksi dan memperpanjang umur ladang tersebut, sehingga variasi pendapatan secara material merupakan hasil dari harga yang tinggi. Pada tahap ini, relevansi ekonomi dari pengeboran sumur produksi lainnya dan pengembangan wilayah baru menjadi penting.

Petroleum Fund tetap menjadi sumber utama pembiayaan anggaran negara setiap tahun.

Pada tahun 2021, pendapatan minyak bumi menyumbang sekitar USD 720 juta kepada Dana tersebut, sementara pengembalian investasi sebesar USD 1.144 juta sepanjang tahun. Sebanyak USD 1.147,9 juta telah ditarik untuk membiayai pengeluaran Pemerintah. Bagian 4.6 memberikan rincian lebih lanjut tentang arus ini. Jumlah tersebut disajikan di bawah ini sebagaimana dilaporkan oleh PF dalam Laporan Tahunan untuk tahun 2021. Silakan lihat Bagian 3.5 untuk rekonsiliasi antara pendapatan yang dilaporkan oleh entitas pemerintah dalam templat EITI dan Petroleum Fund.

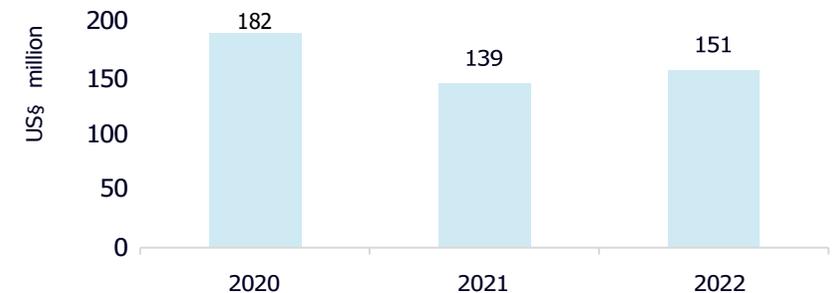
USD Juta	2019	2020	2021
Pendapatan PF	756	326	720
Pengembalian Investasi PF	2,101	1,773	1,144
Total pendapatan PF	2,857	2,099	1,864

Pendapatan pajak secara konsisten merupakan sumber pendapatan domestik terbesar di Timor-Leste

Mengenai pendapatan domestik (Pendapatan bukan-Minyak dan gas), pendapatan tersebut diperkirakan akan meningkat pada tahun 2022, berbeda dengan penurunan tajam yang dialami pada tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh Listrik Timor-Leste (EDTL) dan Bee Timor-Leste yang menjadi Badan Usaha Milik Negara dan karenanya tidak dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Namun, kemerosotan ekonomi yang terkait dengan berlanjutnya pandemi global COVID-19 juga telah memberikan tekanan ke bawah.

Prakiraan tersebut memprediksi kenaikan 8% dalam pengumpulan pendapatan domestik pada tahun 2022 seiring dengan pemulihan ekonomi dari resesi yang disebabkan oleh COVID-19 (lihat grafik di bawah). Seiring berjalannya waktu, pendapatan domestik non-migas diperkirakan akan mengalami pertumbuhan positif dari tahun ke tahun. Peningkatan pendapatan pajak, yang merupakan sumber pendapatan domestik terbesar di Timor-Leste, merupakan pendorong utama kenaikan ini. Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2022, tahun-tahun mendatang diproyeksikan akan melanjutkan kenaikan pendapatan pajak ini, rata-rata 5% per tahun, yang didorong oleh reformasi pajak baru.

Prakiraan Pendapatan Domestik



Tinjauan industri ekstraktif Timor-Leste pada tahun 2021 – Minyak & Gas

3.2 Produk Domestik Bruto (PDB/GDP) – Timor-Leste

Perubahan dalam Kompilasi Minyak

Sebagai catatan pengantar, penting untuk disebutkan bahwa sejak September 2019, terjadi perubahan dalam kompilasi minyak. Pada tahun 2018, JPDA dianggap sebagai entitas non-residen, yang menyiratkan bahwa PDB Minyak tidak akan dilaporkan, dan PDB bukan-Minyak mewakili total PDB, termasuk royalti. Pendapatan minyak hanya dipertimbangkan dalam GNI (Pendapatan Nasional Bruto).

Namun, karena Perjanjian Batas Maritim baru yang diratifikasi pada bulan Agustus 2019 (untuk informasi lebih rinci, silakan lihat Bagian 3.4 laporan), JPDA dan proyek terkait sekarang dianggap sebagai entitas residen. Ini berarti bahwa mulai September 2019 dan seterusnya, sektor minyak sekarang termasuk dalam kompilasi data PDB.

Untuk memudahkan interpretasi data perbandingan yang diungkapkan (untuk tahun 2019 dan sebelumnya), informasi disimpan dengan pemisahan antara komponen minyak dan bukan-minyak. Selain itu, perlu diperhatikan bahwa jumlah yang disajikan adalah dalam harga saat ini, yang berarti bahwa nilai harga diperkirakan berdasarkan periode yang terkait dengan pengamatan⁷.

PDB/GPD⁸

Produk Domestik Bruto tahun 2021 atas dasar harga berlaku sebesar USD 3.621,2 juta pada tahun 2021, yang terdiri dari industri bukan minyak dan gas sebesar USD 1.558,8 juta dan industri minyak dan gas sebesar USD 2.062,4 juta.

⁷ Sumber: [TIMOR-LESTE NATIONAL ACCOUNTS 2002-2021](#)

Produk Domestik Bruto meningkat signifikan pada tahun 2021 sebesar 68% terutama disebabkan oleh sektor minyak. Dibandingkan dengan tahun 2020, terjadi peningkatan sebesar USD 1481,2 juta pada industri minyak, akibat dari harga yang lebih tinggi. Harga minyak rata-rata pada tahun 2021 adalah \$70,7/b, hampir \$30/b lebih tinggi dari rata-rata tahun sebelumnya.

Dibandingkan dengan tahun 2020, sektor bukan minyak dan gas mengalami sedikit penurunan sebesar 1,2%, turun dari USD 1.577,2 juta pada tahun 2020 menjadi USD 1.558,8 juta. Penurunan PDB bukan minyak dan gas tahun 2021 ini terutama disebabkan oleh peningkatan Konsumsi terakhir sebesar 3,2% (USD 67,5 juta), yang dibarengi dengan penurunan Pembentukan modal tetap bruto sebesar 11,6% (USD 28,5 juta), penurunan berkelanjutan Persediaan sektor bukan minyak dan gas sebesar 60,5% (USD 31,6 juta), dan peningkatan signifikan Ekspor bukan minyak dan gas sebesar 152,7% (USD 34,2 juta). Namun, hal ini diimbangi oleh peningkatan impor barang dan jasa sebesar USD 60 juta.



⁸ Konten bagian ini, yang didasarkan pada data terbaru dari TL-National Accounts, dapat menyebabkan perbedaan antara data perbandingan laporan saat ini dengan laporan EITI 2021. Perbedaan tersebut dapat berasal dari pembaruan estimasi dan asumsi berdasarkan indikator baru. Selain itu, metode kompilasi telah dimodifikasi dari waktu ke waktu. Ketika metode baru diperkenalkan, TL-National Accounts menerapkannya di semua tahun untuk menjaga konsistensi data perbandingan di berbagai tahun.

Tinjauan industri ekstraktif Timor-Leste pada tahun 2021 – Minyak & Gas

3.2 Produk Domestik Bruto (PDB/GDP) – Timor-Leste

GNI

Dari tahun 2012 hingga 2020, PDB secara konsisten melampaui Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, penurunan signifikan dalam PDB telah terlihat mulai tahun 2021. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, PDB menurun dari USD 2.387 juta menjadi USD 1.888 juta, menandai penurunan 20,8%, setara dengan USD 498 juta. Jika dijabarkan berdasarkan komponen, Pendapatan Nasional Bruto bukan minyak dan gas atas dasar harga berlaku menurun dari USD 2.058,3 juta pada tahun 2020 menjadi USD 1.660,0 juta pada tahun 2021. Demikian pula, Pendapatan Nasional Bruto Minyak atas dasar harga berlaku juga menurun dari USD 328,5 juta pada tahun 2020 menjadi USD 228,2 juta pada tahun 2021. Penurunan pertumbuhan PDB selama tahun 2021 ini dapat dikaitkan dengan penurunan pendapatan yang diterima dari unit non-residen.⁹

GNI	2020	2021	Var	Var (%)
Sektor minyak	329	228	-100	-30,5%
Bukan sektor minyak	2 058	1 660	-398	-19,4%
Sektor minyak	2 387	1 888	-498	-20,8%

Ekspor dan Impor

Pada tahun 2021, Timor-Leste merupakan negara dengan ekonomi ekspor terbesar ke-176 di dunia.¹⁰

Pada tahun 2021, Timor-Leste mengekspor USD 2.314 juta dan mengimpor lebih dari USD 1.314 juta, sehingga menghasilkan neraca perdagangan yang positif. Akan tetapi, penting untuk dicatat bahwa angka-angka ini sangat dipengaruhi oleh sektor minyak. Industri minyak merupakan mayoritas ekspor (hingga 97,6%) pada tahun 2021 dan juga mewakili sebagian besar impor (36,5% pada tahun 2021). Dengan mempertimbangkan hal ini, dan meskipun neraca perdagangan secara keseluruhan tampak positif, situasinya berbeda jika kita mengeluarkan sektor minyak dari perhitungan. Sesuai dengan TL National Account 2021, neraca perdagangan sektor bukan-minyak secara konsisten negatif dari tahun 2000-2021 jika mempertimbangkan pengaruh Kompilasi Minyak. Jadi, meskipun secara keseluruhan positif ditunjukkan dalam neraca perdagangan, realitas perdagangan di Timor-Leste, jika sektor minyak tidak dimasukkan, memang negatif. Neraca perdagangan, tidak termasuk sektor minyak, negatif selama sembilan tahun terakhir, menggarisbawahi dampak yang tidak proporsional dari sektor minyak pada neraca perdagangan negara tersebut. Rincian lebih lanjut disajikan pada slide berikutnya.¹¹

⁹ Sumber: [TIMOR-LESTE NATIONAL ACCOUNTS 2002-2021](#)

¹⁰ Sumber: <https://oec.world/en/profile/country/tls>

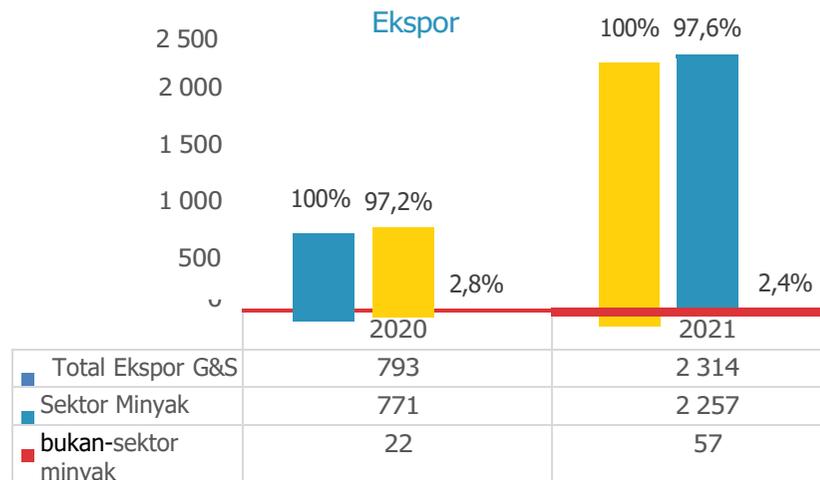
¹¹ Sumber: [TIMOR-LESTE NATIONAL ACCOUNTS 2002-2021](#)

Tinjauan industri ekstraktif Timor-Leste pada tahun 2021 – Minyak & Gas

3.3 Industri Ekstraktif

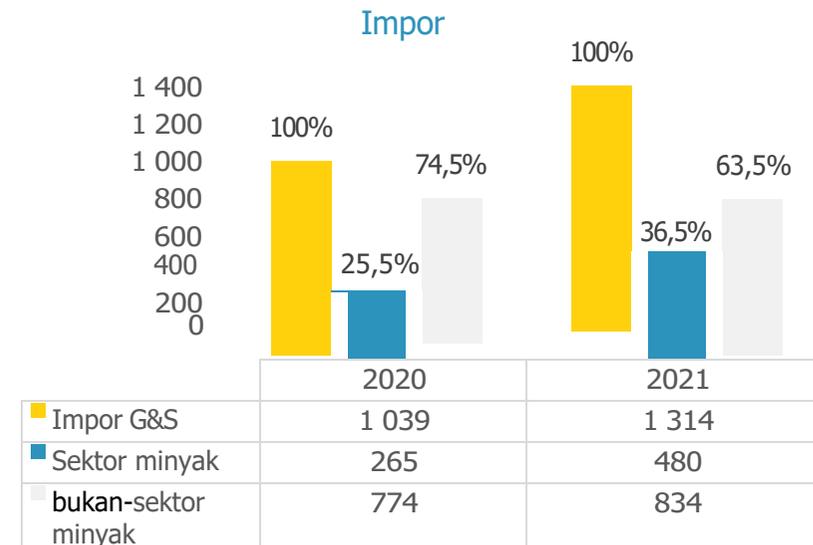
Ekspor

Dibandingkan dengan tahun 2020, ekspor sektor migas mengalami peningkatan tajam sebesar 193% dari USD 771 juta menjadi USD 2.257 juta pada tahun 2021. Terkait sektor Bukan minyak dan gas, ekspor barang dan jasa, atas dasar harga berlaku meningkat sekitar 153% dari USD 22,4 juta menjadi USD 56,6 juta. Alasan utama di balik pertumbuhan positif ini adalah kenaikan ekspor kopi (97,4%).



Impor

Pada tahun 2021 total impor, baik impor industri minyak dan gas maupun bukan minyak dan gas juga mengalami peningkatan sebesar 26,4% dari USD 1.039 juta menjadi USD 1.314 juta. Impor sektor minyak dan gas tercatat sebesar USD 480 juta. Sedangkan impor sektor bukan minyak dan gas atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan sekitar 7,7% dari USD 774 juta menjadi USD 834 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan impor barang tambang dan mesin/barang listrik.¹²



¹² Sumber: [TIMOR-LESTE NATIONAL ACCOUNTS 2002-2021](#)

Tinjauan industri ekstraktif Timor-Leste pada tahun 2021 – Minyak & Gas

3.4 Produksi

Ladang

Pada tahun 2021, serta pada tahun 2020 dan 2019, seluruh gas Timor-Leste diproduksi di ladang gas Bayu-Undan, yang terletak di Bekas Joint Petroleum Development Area (JPDA) lepas pantai. Pendapatan pemerintah diterima dalam bentuk tunai, bukan barang, dengan 100 persen bagian diberikan kepada Timor-Leste sejak Perjanjian Batas Maritim pada tanggal 29 Agustus 2019.

Selama periode tahun 2021 terdapat dua belas (12) PSC aktif di dalam Wilayah Darat dan Lepas Pantai Timor-Leste dan di Wilayah Rezim Khusus Sunrise. Dua belas (12) PSC ini terdiri dari lapangan produksi Bayu-Undan dengan dua (2) PSC terpadu, PSC Kitan yang ditangguhkan sementara yang terletak di dalam wilayah lepas pantai Timor-Leste, PSC Greater Sunrise yang masih dalam studi konsep pengembangan yang terletak di dalam Rezim Khusus, sedangkan PSC lainnya berada dalam tahap eksplorasi.

Pada Lampiran F dapat ditemukan informasi lebih rinci tentang PSC.

Bayu-Undan

Ladang gas Bayu-Undan terletak di Laut Timor, sekitar 250 km selatan Timor-Leste dan sekitar 500 km lepas pantai dari Darwin, Australia. Lapangan tersebut berada dalam wilayah kontrak PSC TL-SO-T 19-12 dan PSC TL-SO-T 19-13. Santos menjadi Operator lapangan tersebut melalui akuisisi aset ConocoPhillips pada bulan Mei 2020.

Bayu-Undan telah menghasilkan pendapatan terbesar dari semua lapangan di Timor-Leste dan telah menjadi satu-satunya lapangan yang memproduksi sejak tahun 2015. Penemuan awal terjadi pada pada awal tahun 1995, ketika sumur Bayu-1 memotong kolom kondensat gas sepanjang 177 m, pada kedalaman reservoir 3.923 m. Pada bulan Juli 1995, Undan ditemukan 10 km di barat laut Bayu, di mana terdapat kolom hidrokarbon bruto sepanjang 141 m.

Lapangan Bayu-Undan di permukaan reservoir memiliki luas sekitar 160 Km², dengan kedalaman air sekitar 80 m. Total cadangan lapangan yang dapat dipulihkan berkisar antara 350 dan 400 juta barel cairan hidrokarbon dan 3,4 tcf gas

Pada tahun 2015, pengeboran pengembangan tahap tiga menambahkan satu sumur produksi bawah laut untuk mempertahankan produksi cairan dan gas.

Proyek Bayu-Undan mencakup dua fasilitas operasi. Fasilitas lapangan tersebut mencakup Central Production and Processing Complex (DPP and CUQ), FSO, WP1, jaringan pipa bawah laut di lapangan, dan jaringan pipa ekspor gas ke Darwin. Ladang Bayu-Undan semakin matang dan produktivitas dari sumur yang ada menurun seiring dengan meningkatnya produksi air akibat masuknya air. Semua sumur injektor telah dikonversi menjadi produksi sejak tahun 2021, di mana D15 merupakan sumur injektor terakhir yang dikonversi. Pada tahun 2021, BU memiliki 18 sumur operasi, lapangan memiliki 3 sumur produksi yaitu 3 sumur R2P, 3 sumur infill dan 11 sumur produksi eksisting.

Untuk periode pelaporan tahun 2021, total produksi wet gas adalah

227,78 BCF (239 BCF pada tahun 2020) dengan tingkat produksi rata-rata 18.981 MMscf per bulan. Ekspor gas kumulatif ke Darwin LNG adalah 179,64 BCF dengan tingkat ekspor bulanan 14.970 MMscf. Produksi cairan gabungan (Kondensat dan LPG) adalah 6,21 MMbbls (6,19 MMbbls pada tahun 2020) dengan tingkat produksi rata-rata 517.278 barel per bulan.

Selain itu, selama tahun 2021 sumur injektor telah dioperasikan sesekali untuk produksi ayunan untuk tujuan manajemen pipa jika terjadi perubahan mode operasi DLNG (mode setengah vs mode penuh).

Pada tanggal 26 Mei 2021, Santos, operator dari Bayu-Undan Joint Venture, memulai program pengeboran infill fase 3C di lapangan Bayu-Undan, yang terletak di lepas pantai Timor-Leste. Setelah memulai

Proses pengeboran pada bulan Juli 2021, sumur pertama mulai mengalirkan gas. Pengeboran sumur kedua dimulai pada bulan Juni, dan akhirnya menghasilkan gas pertamanya pada bulan Oktober 2021. Dilanjutkan dengan keberhasilan pengeboran sumur ketiga, yang saat ini sedang dipersiapkan untuk produksi. Sebagai hasil dari operasi dari dua sumur produksi pertama, lebih dari 40.000 Barrel of Oil Equivalent (BoE) kini dapat diproduksi¹³.

Kitan

Lapangan Kitan ditutup pada tanggal 16 Desember 2015 karena penurunan harga minyak bersamaan dengan biaya operasi FPSO (Floating Production Storage and Offloading) yang lebih tinggi. Lapangan ini terletak di PSC TL-SO 19-10 milik JPDA, 170 km lepas pantai Timor-Leste.

ANPM dan ENI (Kontraktor Operator) sedang menganalisis metode dan waktu untuk penghentian akhir lapangan dan mengevaluasi opsi pembangunan kembali lapangan.¹⁴

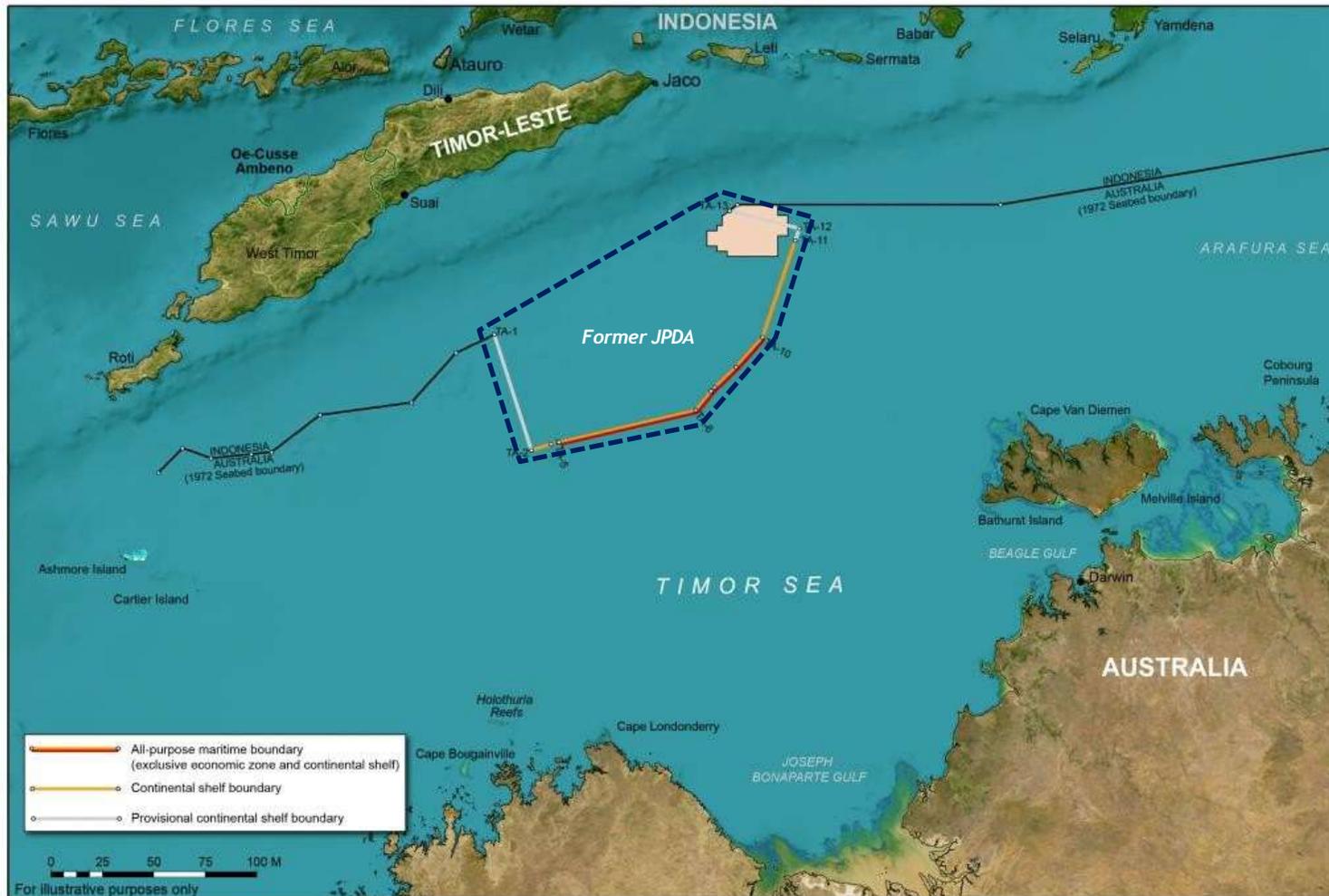
¹³ Sumber: [ANPM ANNUAL REPORT 2021](#)

¹⁴ Sumber: [ANPM ANNUAL REPORT 2021](#)

Tinjauan industri ekstraktif Timor-Leste pada tahun 2021 – Minyak & Gas

3.4 Produksi

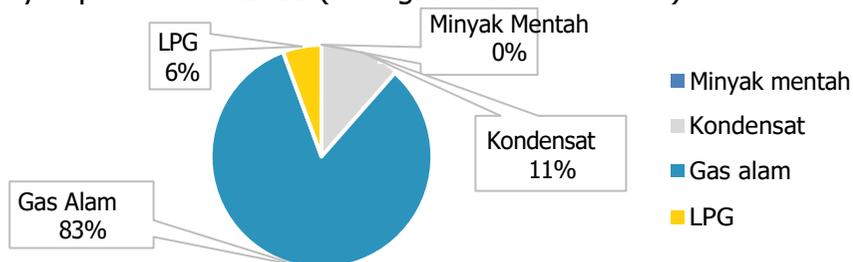
Peta ladang Greater Sunrise (Sumber: Kantor Batas Maritim)



Tinjauan industri ekstraktif Timor-Leste pada tahun 2021 – Minyak & Gas

3.4.1 Produksi dalam BOE

Bayu-Undan menghasilkan tiga produk minyak bumi, yaitu Kondensat, Liquefied Petroleum Gas dan Gas Alam, dengan produksi cairan yang terus menipis sejak puncaknya pada tahun 2012. Produksi minyak dan gas meningkat dari 35,6 juta barel setara minyak pada tahun 2020 menjadi 36,1 juta barel setara minyak pada tahun 2021 (lihat grafik Data Produksi).



Komoditas (BOE Ribuan)	Produksi	Ekspor
Minyak Mentah	-	-
Kondensat	4 165	4 165
Gas alam (LNG)*	29 939	29 939
LPG	2 042	2 042
Total	36 146	36 146

*Catatan: Perbedaan volume LNG antara Laporan Tahunan ANPM dan data situs web berasal dari penggunaan faktor konversi yang berbeda. Laporan Tahunan menggunakan faktor 1/600 BOE, sedangkan perhitungan situs web menggunakan faktor 1/5800 BOE. Hal ini menyebabkan pengajuan produksi dalam templat EITI setara dengan 36,1 BOE, berbeda dari 37,2 BOE yang disajikan di situs web.

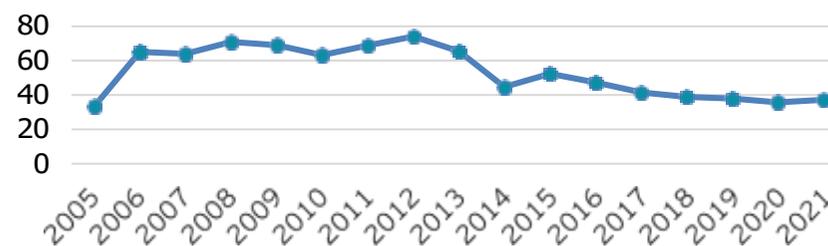
Untuk rekonsiliasi dengan entitas ekstraktif, kami menggunakan data ANPM yang diserahkan dalam templat.

Produksi produk minyak bumi di Timor-Leste telah menurun sejak 2012. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penipisan alami lapangan Bayu-Undan.

Informasi terkait total produksi tersedia di situs web ANPM (Basis Data Lafaek) yang berisi informasi terkait produksi lapangan Bayu-Undan dan Kitan, kontrak, dll.

Informasi ini umumnya dapat diakses publik¹⁵.

Total Produksi Ribuan BOE



Komoditas (BOE Ribuan)	2021	2020	Variasi	Variasi (%)
Minyak Mentah	-	-	-	-
Kondensat	4 165	4 063	102	2,5%
Gas alam (LNG)*	29 939	29 449	490	1,7%
LPG	2 042	2 123	-81	-3,8%
Total	36 146	35 635	511	1,4%

¹⁵ Sumber: [ANPM website - JPDA Production, Barrels of Oil Equivalent \(BOE\)](#) & Templat disediakan oleh ANPM dengan data 2021

Tinjauan industri ekstraktif Timor-Leste pada tahun 2021 – Minyak & Gas

3.4.2 Produksi dalam USD

Informasi di bawah ini menyajikan nilai produksi berdasarkan komoditas.

Produksi dan ekspor dalam USD ('000) pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

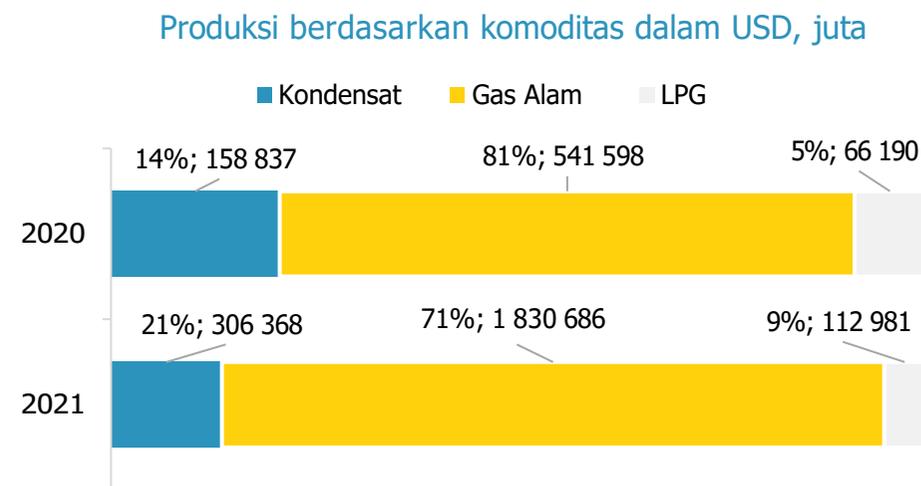
Komoditas	Produksi	Ekspor
Minyak Mentah	-	-
Kondensat	306 368	306 368
Gas Alam	1 830 686	1 830 686
LPG	112 981	112 981
Total	2 250 035	2 250 035

Nilai produksi variasi diantara 2021 dan 2020 sebagai beriku¹⁶:

Komoditas	2021	2020	Variasi	Variasi (%)
Minyak Mentah	-	-	-	0%
Kondensat	306 368	158 837	147 531	93%
Gas Alam	1 830 686	541 598	1 289 088	238%
LPG	112 981	66 190	46 791	71%
Total	2 250 035	766 625	1 483 410	193,5%

¹⁶ Sumber: Templat disediakan oleh ANPM dengan data 2021

Grafik di bawah ini menggambarkan rincian produksi komoditas dalam USD. Pada tahun 2021, proporsi komoditas yang diproduksi tetap konsisten. Gas Alam (LNG) merupakan komoditas yang paling signifikan.



Tinjauan industri ekstraktif Timor-Leste pada tahun 2021 – Minyak & Gas

3.5 Pendapatan yang diperoleh dari sektor ekstraktif

Pendapatan pada tahun 2021 meningkat signifikan dibandingkan tahun 2020, meskipun belum melampaui level sebelum COVID-19. Pendapatan yang dihasilkan dari Sektor Migas, termasuk jumlah yang diterima dari subkontraktor, mencapai USD 729 juta pada tahun 2021. Nilai ini menunjukkan peningkatan sebesar USD 427 juta, atau 141%, dibandingkan tahun 2020.

Keuntungan dari penerimaan minyak dan royalti merupakan dampak dari produksi dan harga. Produksi minyak dan gas sedikit meningkat dari 35,6 juta barel setara minyak (BOE) pada tahun 2020 menjadi 36,1 juta BOE pada tahun 2021¹⁷. Harga minyak rata-rata pada tahun 2021 adalah \$70,7/b, hampir \$30/b lebih tinggi dari harga rata-rata tahun sebelumnya. Oleh karena itu, pendapatan pada tahun 2021 lebih tinggi lebih dari 128% (USD 178,5 juta) dibandingkan tahun sebelumnya, akibat harga yang jauh lebih tinggi dan sedikit peningkatan produksi.

Selain itu, penerimaan pajak meningkat sebesar 174% (USD 254 juta) karena pertumbuhan signifikan pada penerimaan Cooperate Income Tax dan Additional Profit Tax.

Pendapatan	2021	%	2020	%	Variasi	%
Pendapatan Pajak	400	55%	146	48%	254	174%
Royalties and Oil profit	318,5	44%	140	46%	178,5	128%
Biaya lain	10,5	1%	16	5%	-5,5	-34%
Total	729	100%	302	100%	427	141%

Royalti dan profit operator dikumpulkan oleh ANPM, sebagai Otoritas yang ditunjuk. Pajak terkait minyak bumi dibayarkan langsung oleh kontraktor ke MoF, yang bertanggung jawab atas

memelihara pembukuan akuntansi untuk Petroleum Fund.

Tabel di bawah ini menyajikan penerimaan terkait minyak bumi yang dilaporkan oleh otoritas yang ditunjuk pemerintah dalam templat EITI selama tahun 2021. Rekonsiliasi antara data dari Laporan Tahunan petroleum fund dan templat pemerintah disediakan lebih lanjut dalam laporan tersebut.

Pendapatan sektor ekstraktif (USD juta)	2021	2020	Var	Var (%)
Pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan ekstraktif Minyak & Gas (Operator):	721	297	424	143%
<i>Direção Nacional de Receitas Petrolíferas e Minerais (DNRPM) kwitansi</i>	391	141	250	177%
<i>Autoridade Nacional do Petróleo e Minerais (ANPM) kwitansi - Royalties and O&G profits</i>	319	140	179	128%
<i>Autoridade Nacional do Petróleo e Minerais (ANPM) kwitansi - biaya</i>	5	5	0	0%
<i>Banco Central de Timor-Leste (BCTL) kwitansi</i>	6	11	-5	-45%
Total pendapatan yang dihasilkan dari Sektor Minyak & Gas):	8	5	3	60%
<i>Direção Nacional de Receitas Petrolíferas (DNRP) kwitansi</i>	8	5	3	60%
Total pendapatan yang dihasilkan dari sektor minyak & Gas	729	302	427	141%
Total pendapatan yang dihasilkan dari Sektor Pertambangan	2	3	-1	-33%
Pendapatan yang dihasilkan dari Sektor Ekstraktif	731	305	426	140%

¹⁷ Terdapat perbedaan volume LNG antara Laporan Tahunan petroleum fund 2021 dengan data ANPM yang disampaikan dalam format karena penggunaan faktor konversi yang berbeda. Untuk informasi lebih rinci, silakan lihat Bagian 3.4.1.

Tinjauan industri ekstraktif Timor-Leste pada tahun 2021 – Minyak & Gas

3.5 Pendapatan yang diperoleh dari sektor ekstraktif

Dengan demikian, hasil agregat penerimaan yang dihimpun oleh badan-badan pemerintah sebagai berikut:

Pendapatan yang dihasilkan pada tahun 2021	USD Juta
Total Penerimaan Pajak yang Dilaporkan oleh MoF	400
Total Penerimaan Bukan Pajak yang dilaporkan oleh ANPM – Royalti dan profit O&G	319
Total Pendapatan Bukan Pajak yang dilaporkan oleh ANPM - Biaya	5**
Total Pendapatan Bukan Pajak yang dilaporkan oleh BCTL	6
Total pendapatan yang dilaporkan oleh entitas Pemerintah	730
Biaya lain yang digandakan oleh Kementerian Keuangan dalam pelaporan	-1*
Total pendapatan yang dilaporkan oleh entitas Pemerintah	729
Pendapatan yang dihasilkan dari Sektor Pertambangan	2
Pendapatan yang di hasilkan dari Sektor Ekstraktif	731

Catatan: *Selama proses rekonsiliasi, tercatat bahwa Kementerian Keuangan melaporkan jumlah sekitar 1 juta terkait biaya pengembangan yang juga dikumpulkan oleh ANPM. Setelah proses rekonsiliasi selesai, jumlah duplikat ini dikurangkan dari pendapatan yang dilaporkan oleh Kementerian Keuangan. Penyesuaian ini juga diperhitungkan saat merekonsiliasi jumlah yang diungkapkan oleh Petroleum Fund.

** Dalam format EITI yang diajukan ANPM, dilaporkan total biaya yang dikumpulkan dari entitas ekstraktif mencapai USD 4,7 juta. Akan tetapi, Petroleum Fund mencatat sebagian biaya tersebut sebagai penyesuaian penerimaan wajib pajak berdasarkan Pasal 6.1 (e), yang berjumlah USD 3,5 juta dan USD 1,2 juta sebagai pendapatan pajak. Untuk informasi lebih

lanjut, lihat rekonsiliasi, jumlah tersebut disajikan dengan mempertimbangkan reklasifikasi ke Pendapatan Bukan Pajak yang dilaporkan oleh ANPM. Selain itu, untuk tujuan rekonsiliasi dengan PF, jumlah dalam tabel yang disajikan telah dibulatkan ke jutaan terdekat.

Rekonsiliasi antara laporan tahunan Petroleum Fund 2021 dan data yang disampaikan oleh entitas Pemerintah dalam format EITI

Laporan Tahunan Petroleum fund menyatakan bahwa total pendapatan yang dikumpulkan dari minyak bumi pada tahun 2021 adalah USD 720 juta. Pendapatan tersebut mencakup USD 401 juta dalam bentuk pajak minyak bumi dan USD 310 juta dalam bentuk royalti dan profit Oil & Gas, dan USD 9 juta dalam bentuk pembayaran lainnya. Pengumpulan ini sesuai dengan Pasal 6.1 (a), (b), dan (e) dari Undang-Undang Petroleum Fund.

Namun, ketika kami mempertimbangkan penyesuaian batas tambahan dari ANPM (transfer tunai yang dilaporkan dalam periode yang berbeda), kami menyimpulkan bahwa pendapatan yang dikumpulkan dari Minyak & Gas oleh Timor-Leste pada tahun 2021 berjumlah USD 729 juta dan USD 2 juta dari sektor pertambangan. Rekonsiliasi disajikan di bawah ini:

Pendapatan yang dihasilkan pada tahun 2021	USD juta
Pasal 6.1 (a) kwitansi	401
Pasal 6.1 (a) kwitansi	310
Pasal 6.1 (a) kwitansi	9
Jumlah yang dilaporkan dari Petroleum Fund	720
Uang tunai ANPM 01-01-2021 ¹⁸	-5
Uang tunai ANPM 31-12-2022	14
Pendapatan yang dihasilkan dari Sektor Pertambangan	2
Pendapatan yang dihasilkan dari Sektor Ekstraktif Direkonsiliasi	731

¹⁸ Sumber: [Timor Leste Petroleum Fund Annual Report 2021.pdf \(ifswf.org\)](https://www.ifswf.org/)

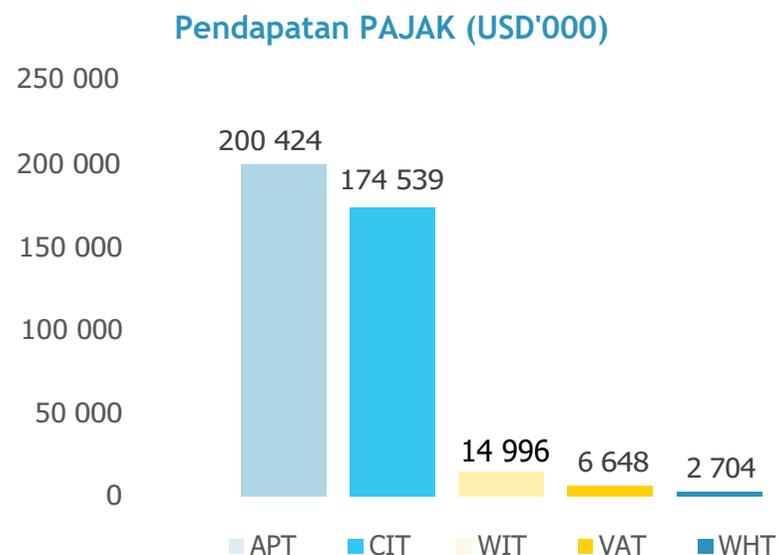
Tinjauan industri ekstraktif Timor-Leste pada tahun 2021 – Minyak & Gas

3.5.1 Penerimaan Pajak dan Penerimaan Bukan Pajak

Grafik di bawah ini menggambarkan penerimaan pajak dan bukan pajak.

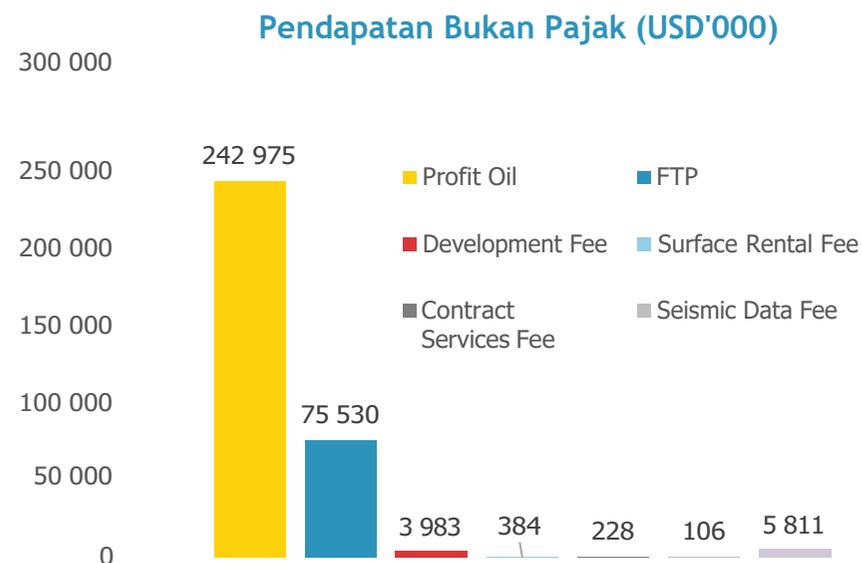
Penerimaan Pajak yang paling signifikan pada tahun 2021 adalah APT, diikuti oleh

pajak penghasilan.¹⁹ Komposisi penerimaan pajak tetap sama dibandingkan tahun 2020.



¹⁹ Sumber: Templat disediakan oleh ANPM dengan data 2021

Pendapatan bukan pajak (PNBP) sebagai profit oil & gas selama ini menjadi sumber utama penyumbang aliran penerimaan bagi Petroleum fund. FTP (First Tranche Petroleum) dan biaya yang dihimpun dari jasa kontrak dan biaya pengembangan merupakan sumber penerimaan lain bagi petroleum fund sebagaimana diuraikan dalam gambar di bawah ini²⁰.



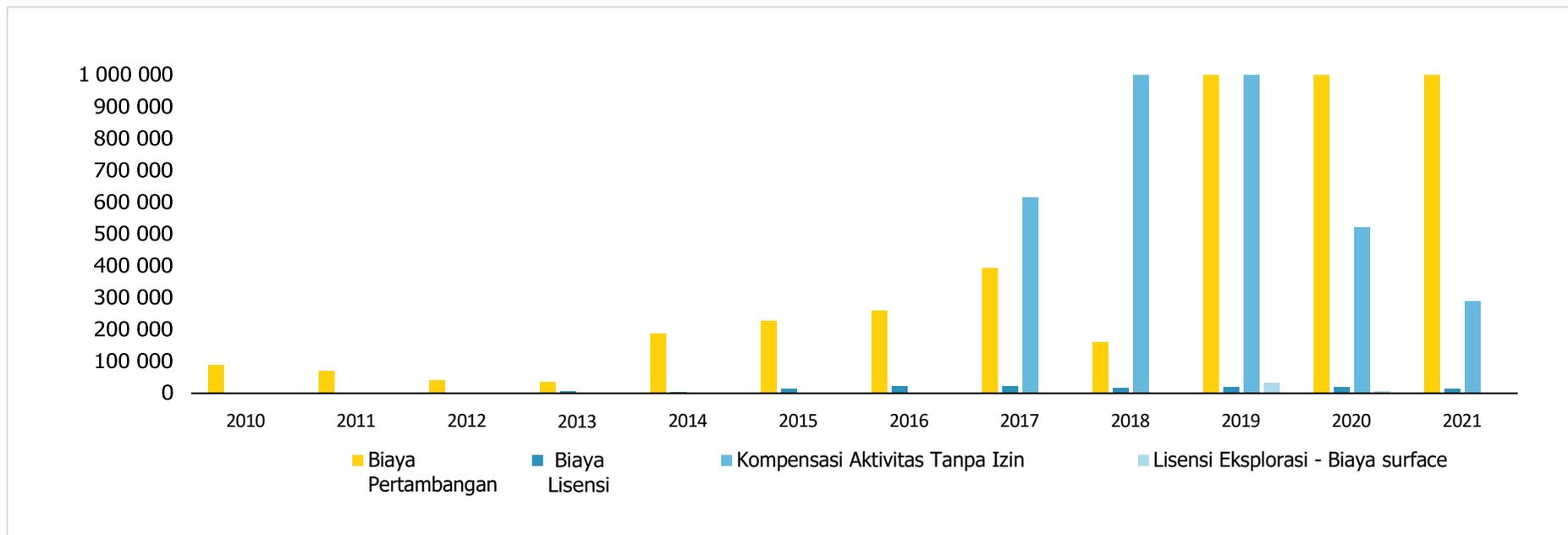
²⁰ Sumber: Templat disediakan oleh ANPM dengan data 2021

Tinjauan industri ekstraktif Timor-Leste pada tahun 2021 – Minyak & Gas

3.5.2 Pertambangan

Pada tahun 2021, pendapatan pertambangan menurun dari USD 2.815.329,56 menjadi USD 1.973.877,26 (Lampiran C dan Lampiran D menyajikan semua pembayaran mineral selama tahun 2021 dan 2020, masing-masing). Hal itu disebabkan hanya 17 izin pertambangan yang diterbitkan pada tahun 2021, dibandingkan dengan 33 izin pada tahun 2020.

Untuk rekonsiliasi sektor pertambangan, kami telah menghubungi ANPM untuk pembayaran terperinci berdasarkan biaya dan entitas (lihat Lampiran B). Menurut keputusan Menteri No. 64/2016 tanggal 16 November, kegiatan-kegiatan ini diatur sebagai pertambangan, yang menjadi alasan mengapa ANPM melaporkannya di sektor pertambangan. Lihat Bagian 8.6 untuk perincian lebih lanjut tentang sektor pertambangan.²¹ Dalam laporan tersebut, kami menyebut ANP dan ANM secara kolektif sebagai ANPM, karena pada tahun 2021, keduanya masih merupakan entitas yang bersatu. Dengan demikian, dalam hal tanggung jawab dan representasi terkait pendapatan pertambangan, ANPM tetap menjadi pemegang data. Untuk keterangan lebih rinci, silakan lihat Bagian 4.5.



²¹ Sumber: <http://www.anpm.tl/mineral/fees-collected-from-mineral-operator/>

Tinjauan industri ekstraktif Timor-Leste pada tahun 2021 – Minyak & Gas

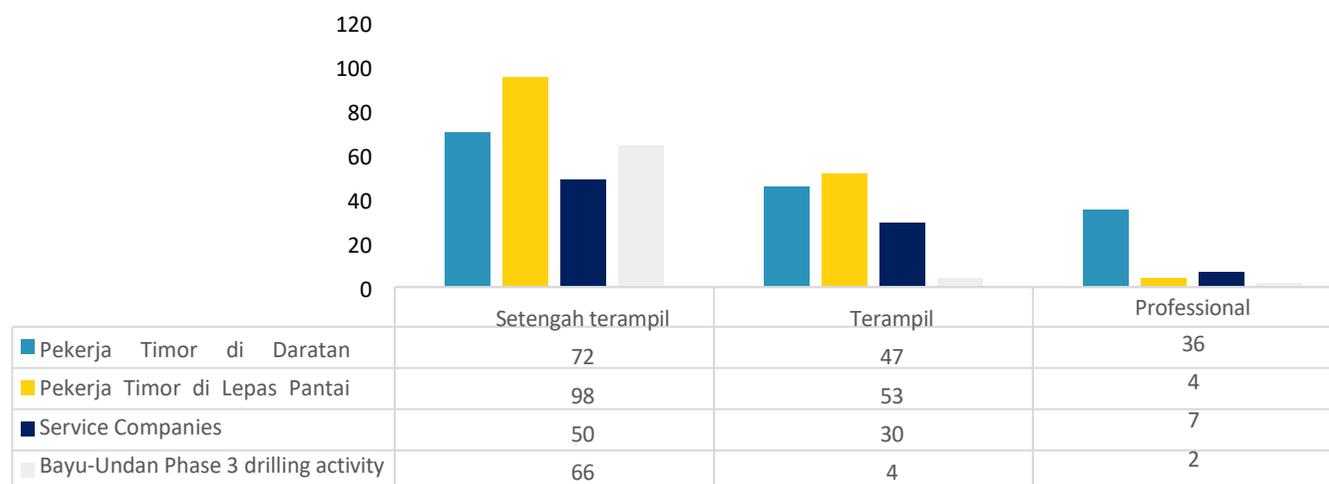
3.6 Kontribusi sektor Minyak & Gas terhadap lapangan kerja di Timor-Leste – Tinjauan ANPM

EITI Standard 2019 mencakup persyaratan yang terkait dengan kontribusi sektor ekstraktif, khususnya pelaporan ketenagakerjaan di industri ini, baik secara absolut maupun sebagai persentase dari total ketenagakerjaan. Informasi ini harus dibedakan berdasarkan jenis kelamin, perusahaan, dan tingkat pekerjaan.

Untuk memenuhi persyaratan ini, 33 dari 43 perusahaan dalam cakupan Laporan EITI 2021 telah melaporkan rincian tenaga kerja mereka. Untuk memberikan perspektif yang komprehensif tentang kontribusi ketenagakerjaan sektor ekstraktif, kami juga merujuk pada Laporan Tahunan ANPM 2021.

Dalam operasi Bayu-Undan pada tahun 2021, terdapat 469 Warga Negara dan Penduduk Tetap Timor-Leste yang dipekerjakan. Jumlah ini mencakup 155 atau 33% yang dipekerjakan di lepas pantai, 155 atau 33% lainnya yang dipekerjakan di darat, 87 atau 19% yang dipekerjakan melalui perusahaan jasa, dan 72 atau 15% yang terlibat dalam kegiatan pengeboran fase 3C. grafik di bawah ini menguraikan lebih lanjut kategori pekerjaan TLN dalam operasi BU selama tahun 2021.²². Tabel berikut menyajikan kategori pekerjaan TLN dalam operasi Bayu-Undan pada tahun 2021.

Ketenagakerjaan TLN pada Operasi Bayu-Undan Tahun 2021



²²
Sumber: [ANPM ANNUAL REPORT 2021](#)

Tinjauan industri ekstraktif Timor-Leste pada tahun 2021 – Minyak & Gas

3.6 Kontribusi sektor Minyak & Gas terhadap lapangan kerja di Timor-Leste – Data yang disediakan oleh perusahaan ekstraktif O&G

Dalam templat yang disiapkan oleh IA, salah satu pertanyaan mencakup jumlah karyawan yang dimiliki oleh perusahaan ekstraktif dan subkontraktor dalam lingkup tersebut pada tahun 2021, khususnya yang terkait dengan kegiatan di Timor-Leste. Permintaan tersebut khususnya berkaitan dengan perusahaan ekstraktif, afiliasinya, dan badan usaha milik negara (BUMN) yang terlibat dalam operasi minyak dan gas di Timor. Berikut adalah tanggapan mereka (untuk jawaban yang diterima):

Entitas		Nasional		Expatriat		Catatan
		Pria	Wanita	Pria	Wanita	
Eni JPDA 03-13 Ltd Branch	Kontraktor	-	-	-	-	Untuk mengelola PSC Eni, tiga (3) Warga Negara Timor-Leste dipekerjakan di bawah Eni JPDA 06-105 Pty Ltd di kantor Eni Timor-Leste Dili.
Eni JPDA 06-105 Pty Ltd	Kontraktor	1	2	-	-	
Eni JPDA 11-106 B.V.	Kontraktor	-	-	-	-	
Eni Timor Leste S.P.A	Kontraktor	-	-	-	-	
Santos NA Emet Pty Ltd	Kontraktor	-	-	-	-	Semua Warga Negara dipekerjakan oleh Santos NA Timor Leste Pty Ltd termasuk karyawan yang diberikan kepada Santos NA (19-12) Pty Ltd untuk bekerja pada daftar pekerja lepas pantai
Santos NA (19-12) Pty Ltd	Kontraktor	-	-	134	-	
Santos NA (19-13) Pty Ltd	Kontraktor	-	-	-	-	
Santos NA Timor Sea Pty Ltd	Subkontraktor	-	-	-	-	
Santos NA Bayu-Undan Pty Ltd	Kontraktor	-	-	-	-	
Santos (JPDA 91-12) Pty Ltd	Kontraktor	-	-	-	-	
Sundagas Banda Unipessoal, Lda	Kontraktor	1	-	-	-	
TIMOR GAP Onshore Block Unip Lda	Kontraktor	-	2	-	-	Berdasarkan Templat EITI yang diserahkan oleh anak perusahaan TIMOR GAP, dilaporkan bahwa 9 orang dipekerjakan pada tahun 2021. Namun, dengan mempertimbangkan TIMOR GAP E.P (perusahaan induk), jumlah total karyawan yang terkait dengan Unit Bisnis Hulu, yang mengawasi kegiatan eksplorasi, meningkat menjadi total 32 karyawan pada tahun 2021. Untuk rincian lebih lanjut, silakan lihat catatan klarifikasi yang terdapat di bawah tabel. Ada 80 pria nasional, 20 wanita nasional, 50 pria ekspatriat, dan 1 wanita ekspatriat dari Greater Sunrise yang memiliki kontrak berdurasi antara tiga hingga sembilan bulan (Tenaga Kerja Jangka Pendek).
TIMOR GAP Onshore Block B Unip Lda	Kontraktor	-	1	-	-	
TIMOR GAP Greater Sunrise 03-19	Kontraktor	1	-	-	-	
TIMOR GAP Greater Sunrise RL	Kontraktor	1	-	-	-	
TIMOR GAP Greater Sunrise RL2	Kontraktor	1	-	-	-	
TIMOR GAP Greater Sunrise 03-20	Kontraktor	1	-	-	-	
TIMOR GAP Offshore Block Unipessoal	Kontraktor	1	-	-	-	
TIMOR GAP PSC 11-106 Unip Lda	Kontraktor	1	-	-	-	
Timor Resources Pty Ltd	Kontraktor	101	24	54	3	
Woodside Energy Pty Ltd	Kontraktor	1	-	-	-	
Rigforce Pty Ltd	Subkontraktor	22	2	-	-	

Entitas		Nasional		Expatriat		Catatan
		Pria	Wanita	Pria	Wanita	
Santos NA Timor Leste Pty Ltd	Subkontraktor	30	4	1	-	
SGS AUSTRALIA PTY LTD	Subkontraktor	-	-	8	1	
Cape Australia Onshore Pty Ltd	Subkontraktor	3	-	10	-	
Total		165	35	207	4	
Carnarvon Petroleum Timor Unip Lda	Kontraktor	-	-	-	-	
Caltech Unipessoal Lda	Subkontraktor	-	-	-	-	
BU12 Australia P/L	Kontraktor	-	-	-	-	
BU13 Australia P/L	Kontraktor	-	-	-	-	
Inpex Sahul Ltd	Kontraktor	-	-	-	-	Entitas melaporkan tidak ada karyawan
Inpex Timor Sea Ltd	Kontraktor	-	-	-	-	
Tokyo Timor Sea Resources	Kontraktor	-	-	-	-	
Brunel Energy Pty Ltd	Subkontraktor	-	-	-	-	
Konnekto Unipessoal Lda	Subkontraktor	-	-	-	-	
Cameron Services International Pty Ltd	Subkontraktor	-	-	-	-	
Clough Amec Pty Ltd	Subkontraktor	-	-	-	-	
Normant Driff AS Timor, Unipessoal Lda	Subkontraktor	-	-	-	-	
MMA Offshore Vessel Operation Pty	Subkontraktor	-	-	-	-	Entitas tidak merespons
Noble Services International Limited	Subkontraktor	-	-	-	-	
Noble Contracting II GMBH	Subkontraktor	-	-	-	-	
Schlumberger Australia P/L	Subkontraktor	-	-	-	-	
Sodexo Timor Unip Lda	Subkontraktor	-	-	-	-	
Oceaneering Aust Pty Ltd	Subkontraktor	-	-	-	-	
TOTAL		165	35	207	4	

Catatan: TIMOR GAP mempekerjakan total 141 orang, termasuk konsultan, pada tahun 2021. Klarifikasi tambahan dari TIMOR GAP merinci distribusi karyawan berikut ini:

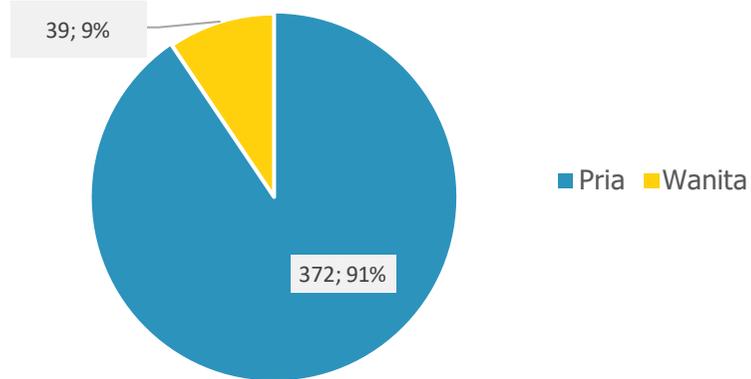
- Staf Suai Airport Jet Avtur - 2 karyawan
- Staf Suai Fuel Station - 11 karyawan
- Staf Tasi Mane Project (Kantor Covalima) - 3 karyawan
- Tenaga kerja yang tersisa (Kantor Pusat TIMOR GAP) - 125 karyawan

Terkait dengan kegiatan eksplorasi lepas pantai dan darat, Unit Bisnis Hulu memiliki 32 karyawan yang ditugaskan, yang meliputi

individu dari anak perusahaan TIMOR GAP. Perlu dicatat bahwa karyawan dari Unit Hulu ini dianggap sebagai bagian dari 125 karyawan yang ditempatkan di kantor pusat di Dili. Distribusi gender di Unit Hulu pada tahun 2021 menunjukkan rincian 11 perempuan dan 21 laki-laki.

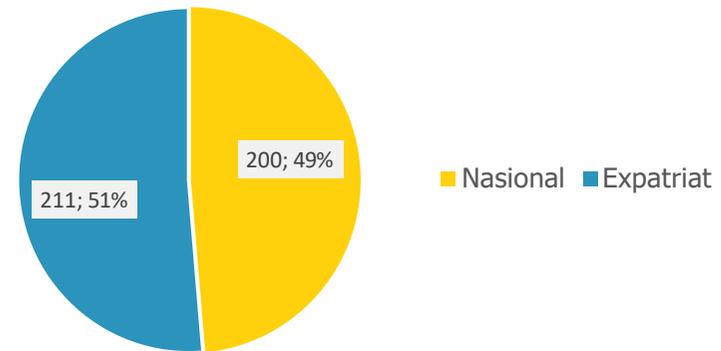
Jumlah perempuan secara keseluruhan adalah 39 orang atau sekitar 9% dari jumlah tenaga kerja pada tahun 2021.

Pekerjaan berdasarkan gender



Distribusi persentase karyawan menurut Warga Negara Timor-Leste dan Non-residen disajikan di bawah ini.

Karyawan non-residen dan karyawan yang berdomisili di Timor Leste



Informasi ketenagakerjaan di sektor ekstraktif yang disajikan dalam Laporan Tahunan ANPM 2021 berbeda dengan data yang diberikan oleh perusahaan. Perbedaan 35 karyawan ini terutama disebabkan oleh 10 subkontraktor yang tidak memberikan tanggapan (sekitar 20 karyawan tidak diungkapkan) serta beberapa perbedaan batas antara data yang dilaporkan oleh pemangku kepentingan dan data yang disampaikan dalam templat (15 karyawan).

TL Ketenagakerjaan yang dilaporkan oleh perusahaan ekstraktif dan subkontraktor:	434
termasuk	
Templat EITI yang diserahkan	411
TIMOR GAP E.P. (lihat Catatan di atas)	23
Data ketenagakerjaan TL yang dilaporkan dikumpulkan oleh ANPM	469



Kerangka Regulasi Industri Ekstraktif Pada Tahun 2022

Timor-Leste secara resmi memperoleh kembali kedaulatannya pada tanggal 20 Mei 2002. Setelah referendum yang diadakan pada tahun 1999, administrasi Timor-Leste telah didelegasikan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Administrasi Transisi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor-Leste (UNTAET). Selama masa transisi, UNTAET mewakili pemerintah Timor-Leste dalam negosiasi ulang pembagian sumber daya minyak bumi di Joint Petroleum Development Area (JPDA).

Hingga tahun 2019, Timor-Leste dan Australia belum menetapkan batas maritim terakhir di Laut Timor. Sebelumnya, kedua pemerintah telah menetapkan serangkaian pengaturan sementara yang rumit untuk pembagian minyak bumi yang diekstraksi dari zona pengembangan bersama yang tumpang tindih di Laut Timor yaitu Joint Petroleum Development Area (JPDA). Berdasarkan Timor Sea Treaty (TST), wilayah tersebut diatur berdasarkan Production Sharing Contract (PSC) yang ditandatangani antara perusahaan ekstraktif dan ANPM. Untuk Wilayah Eksklusif Timor-Leste (TLEA), kerangka hukumnya sesuai dengan Petroleum activities law (law No. 13/2005) dan wilayah tersebut diatur berdasarkan Production Sharing Contract (PSC) yang ditandatangani antara perusahaan ekstraktif dan Pemerintah.

Pada tahun 2003, Timor-Leste dan Australia membentuk Timor Sea Treaty (TST) yang menyediakan kerangka kerja untuk semua eksplorasi dan pengembangan minyak bumi di JPDA. TST (pasal 4) menetapkan bahwa semua minyak bumi yang diproduksi di JPDA dibagi antara Timor-Leste dan Australia dengan basis 90/10.

Pada tahun 2019, Resolusi No. 15/2019 tanggal 27 Agustus dibuat untuk melaksanakan Ratifikasi Perjanjian Batas Laut antara Australia dan Republik Demokratik Timor-Leste, yang mendefinisikan batas laut antara Australia dan Timor-Leste. Saat ini, (1) Great Sunrise diatur oleh Resolusi ini dan diatur oleh ANPM. (2) Bekas JPDA berada di bawah yurisdiksi eksklusif Timor-Leste dan diatur juga oleh ANPM.

4

4. Kerangka Regulasi Industri Ekstraktif pada tahun 2021

4.1 Berita dalam kerangka peraturan industri ekstraktif Timor-Leste

Meluncurkan operasi pengeboran darat pertama. Pada tanggal 27 Oktober 2021, Perdana Menteri RDTL, Taur Matan Ruak secara resmi meluncurkan operasi pengeboran darat pertama untuk PSC TL-OT-17-09 di sumur Feto Kmaus di Suai, Covalima. Operasi pengeboran ini merupakan operasi pengeboran pertama di wilayah darat Timor-Leste, 50 tahun sejak sumur terakhir dibor di wilayah darat Timor setelah Timor-Leste memperoleh kemerdekaannya pada tahun 2002.

Program pengeboran infill fase 3c. Pada tanggal 26 Mei 2021, Santos sebagai operator Bayu-Undan Joint Venture mengumumkan dimulainya program pengeboran infill fase 3C di lapangan Bayu-Undan, di perairan lepas pantai Timor-Leste. Pengeboran sumur pertama menghasilkan gas pada bulan Juli 2021. Sementara pengeboran sumur kedua dimulai pada bulan Juni, gas pertama dari sumur kedua dihasilkan pada bulan Oktober 2021. Sumur ketiga kemudian dibor dan berhasil serta sekarang sedang dalam persiapan produksi. Dengan demikian, dari dua sumur produksi pertama, Timor-Leste sekarang dapat memproduksi lebih dari 40.000 barrels of oil equivalent (BoE). Setelah mengakuisisi aset ConocoPhillips di Australia Utara dan Timor-Leste pada bulan Mei 2020, Santos menjadi operator baru Bayu-Undan Joint Venture dengan kepemilikan saham sebesar 68,4%. Pada bulan Mei 2021, Santos Limited yang memegang 68,4% saham partisipasi menjual 25% saham di Bayu-Undan kepada BU12 Australia PTY LTD dan BU13 Australia PTY LTD, sehingga mengurangi saham Santos di Bayu-Undan menjadi 43,4%.

Penandatanganan perjanjian penangkapan dan penyimpanan karbon. Pada tanggal 13 September 2021, ANPM dan Santos Ltd, operator di lapangan Bayu-Undan menandatangani Nota Kesepahaman (MOU) untuk menilai kelayakan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon (CCS) di Bayu-Undan di Laut Timor. reservoir dan fasilitas Bayu-Undan berpotensi menjadi proyek CCS terkemuka di dunia, dan CCS di Bayu-Undan memiliki potensi kapasitas sekitar 10 juta ton per tahun.

Penandatanganan Kontrak Bagi Hasil Pualaca pada tahun 2021. Pada tanggal 7 Desember 2021, ANPM dan Blok Timor Gap Pualaca Unipessoal, Lda menandatangani Kontrak Bagi Hasil Produksi (PSC) baru untuk PSC TL-OT-21-17. PSC darat ini diberikan kepada Blok TIMOR GAP Pualaca, Unipessoal, Lda., anak perusahaan perusahaan minyak nasional Timor-Leste TIMOR GAP, E.P. sebagai satu-satunya anggota JV (100%). Saat ini, PSC memasuki tahun pertama periode pertama dan berfokus pada studi G&G.

Peristiwa selanjutnya. Beberapa kontrak baru ditandatangani pasca-2021. Kami tidak menambahkannya ke dalam daftar PSC (lihat Lampiran F) karena tidak termasuk dalam cakupan Laporan EITI 2021. Meskipun demikian, kami yakin penting untuk mencatat PSC yang baru-baru ini ditandatangani, karena hal tersebut menekankan kegiatan operasional saat ini di negara ini.

Pada bulan Desember 2022, ANPM menandatangani kontrak PSC untuk blok TL-OT-22-18 dengan Timor Gap Rarahana Block Unipessoal, Lda, anak perusahaan TIMOR GAP, E.P. Kontrak ini memberikan izin kepada Timor Gap Rarahana Block Unipessoal, Lda untuk memulai kegiatan perminyakan awal, seperti survei data seismik 2D dan pengeboran sumur di blok PSC TL-OT-22-18 yang terletak di wilayah munisipalitas Lautem. Tujuannya adalah untuk mengeksplorasi potensi minyak dan gas. Kontrak ini akan berlangsung selama tiga tahun.

Pada bulan Desember 2023, Autoridade Nacional do Petróleo (dulu ANPM) menandatangani Petroleum Sharing Contract PSC TL-SO-22-23 blok P dengan Eni Timor 22-23 B.V untuk melakukan kegiatan eksplorasi di blok wilayah kontrak P.

Pada bulan Maret 2024, ANP menandatangani PSC TL-OT-22-22 dengan HTS Exploration Ltd (HTS) untuk melakukan kegiatan eksplorasi di blok wilayah kontrak F. HTS adalah perusahaan eksplorasi dan produksi minyak dan gas yang berkantor pusat di Kazakhstan. PSC tersebut memperkirakan partisipasi Timor-Leste dalam Operasi Perminyakan melalui perusahaan minyak nasional TIMOR GAP E.P., baik melalui fase eksplorasi maupun fase pengembangan.

Kerangka Regulasi Industri Ekstraktif pada tahun 2021

4.2 Wilayah Hukum Eksklusif Timor-Leste (TLEA)

TLEA mengacu pada Wilayah Timor-Leste sebagaimana didefinisikan oleh Undang-Undang Perminyakan (Undang-Undang No.13/2005 sebagaimana diubah dari waktu ke waktu) Republik Demokratik Timor-Leste. Undang-Undang ini berlaku untuk operasi perminyakan di laut teritorial, termasuk zona ekonomi eksklusif dan landas kontinennya, di mana, menurut Hukum Internasional, Timor-Leste memiliki hak kedaulatan untuk tujuan eksplorasi sumber daya.

Kerangka hukum yang relevan untuk operasi minyak bumi yang berada di bawah mandat Autoridade Nacional do Petróleo e Minerais (ANPM), dan kontrak perminyakan yang ada adalah sebagai berikut:

Legislasi

- Petroleum Activities Law (UU No.13/2005) - Amandemen Pertama UU No.1/2019 tanggal 18 Januari dan Amandemen Kedua UU No.6/2019 tanggal 4 Desember;
- Autoridade Nacional do Petróleo (ANP) (Dekrit hukum No.20/2008) – Amandemen Pertama melalui Dekrit Hukum No.1/2016 tanggal 9 Februari dan Amandemen kedua melalui Dekrit Hukum No.27/2019 tanggal 27 Agustus;
- Tender Umum Terkait Pemberian Kontrak Perminyakan (Dekrit hukum No.7/2005);
- Dekrit hukum tentang Operasi Perminyakan Lepas Pantai di Timor-Leste (Dekrit hukum No. 32/2016);
- Dekrit hukum tentang Operasi Perminyakan Darat di Timor-Leste (Dekrit hukum No.18/2020);

Production Sharing Contracts

- PSC TL-SO-T 15-01
- PSC S-06-04 (Area Kontrak E)
- PSC TL-OT-17-08 (Block A) dan amandemennya
- PSC TL-OT-17-09 (Block C) dan amandemennya
- PSC TL-T-19-14
- PSC TL-SO-19-16
- PSC TL-OT-21-17

Petroleum Activities Law (Law N°13/2005)

Berdasarkan hukum internasional, Timor-Leste memiliki hak kedaulatan untuk tujuan eksplorasi, eksploitasi, dan pengelolaan sumber daya alamnya, termasuk sumber daya minyak bumi. Petroleum activities law No. 13/2005 berlaku untuk operasi perminyakan di laut teritorial, termasuk zona ekonomi eksklusif dan landas kontinennya, di mana, menurut Hukum Internasional, Timor-Leste memiliki hak kedaulatan untuk tujuan eksplorasi, eksploitasi, dan pengelolaan sumber daya alamnya, termasuk sumber daya minyak bumi. Timor-Leste berhak atas semua sumber daya minyak bumi yang ada di bawah tanah wilayahnya, baik di darat maupun di lepas pantai. Tujuan dari petroleum activities law (Undang-Undang) adalah untuk memberikan manfaat sebanyak mungkin bagi Timor-Leste dan rakyatnya dengan membangun rezim regulasi yang akan memungkinkan perusahaan minyak bumi untuk mengembangkan sumber daya minyak bumi tersebut.

Undang-Undang tersebut memberdayakan Kementerian untuk memberi wewenang kepada perusahaan minyak bumi untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya minyak bumi. Rezim perminyakan lainnya telah dipertimbangkan untuk membangun rezim yang kompetitif secara internasional dan membantu menarik investasi dalam pengembangan kegiatan perminyakan.

Kerangka Regulasi Industri Ekstraktif pada tahun 2021

4.2 Wilayah Hukum Eksklusif Timor-Leste (TLEA)

Sumber daya minyak bumi yang dimiliki oleh Timor-Leste merupakan komponen strategis dari perekonomiannya, memiliki nilai potensial yang tinggi, dan diharapkan dapat menghasilkan pendapatan yang signifikan bagi negara.

Selain bertujuan untuk memaksimalkan pendapatan minyak Timor Leste, Undang-Undang tersebut juga bertujuan untuk membantu mencapai tujuan pembangunan negara yang luas. Pendapatan minyak dan pengembangan sumber daya ini akan memungkinkan Timor-Leste untuk menangani kebutuhan dan prioritas pembangunan secara lebih efektif, memperkuat sumber daya manusianya, mengkonsolidasikan kemajuan yang telah dicapai sejauh ini, mempercepat dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Timor-Leste.

Tujuan lain dari Undang-Undang ini adalah untuk memastikan stabilitas dan transparansi dalam mengatur pengembangan sumber daya minyak bumi. Dalam hal ini, Undang-Undang ini melengkapi persyaratan transparansi yang telah diterapkan di Timor-Leste, atau yang belum ditetapkan, termasuk yang berkaitan dengan publikasi informasi dan penghematan pendapatan minyak.

Amandemen Undang-Undang (No. 6/2019) terus mempertahankan hak partisipasi Negara, badan hukum, dan badan hukum lain yang sepenuhnya dimiliki atau dikendalikan oleh mereka, hingga partisipasi maksimum 20%, dalam setiap pemberian otorisasi berdasarkan ketentuan undang-undang. Lebih lanjut, partisipasi dapat lebih tinggi dari 20% berdasarkan transaksi komersial antara pihak-pihak berdasarkan otorisasi yang diberikan. Undang Undang ini segera berlaku dan mulai berlaku pada tahun pelaporan terakhir 2019.

Pasal 13 of Petroleum Activities Law: Undangan untuk mendaftar

- (a) Kementerian akan mengundang, melalui pemberitahuan publik, permohonan untuk Otorisasi.
- (b) Terlepas dari ayat 13.1(a) di atas, Kementerian dapat memilih untuk memberikan Otorisasi melalui negosiasi langsung tanpa mengeluarkan undangan tersebut:
 - (i) dalam hal Otorisasi Akses; atau
 - (ii) dalam hal semua jenis Otorisasi lainnya di mana hal tersebut merupakan kepentingan publik untuk melakukannya;
- (c) Jika Kementerian memberikan Otorisasi tanpa mengundang permohonan sebagaimana ditetapkan dalam paragraf 13.1(b) di atas, Kementerian harus memberikan alasan yang kuat untuk melakukannya

Kerangka Regulasi Industri Ekstraktif pada tahun 2021

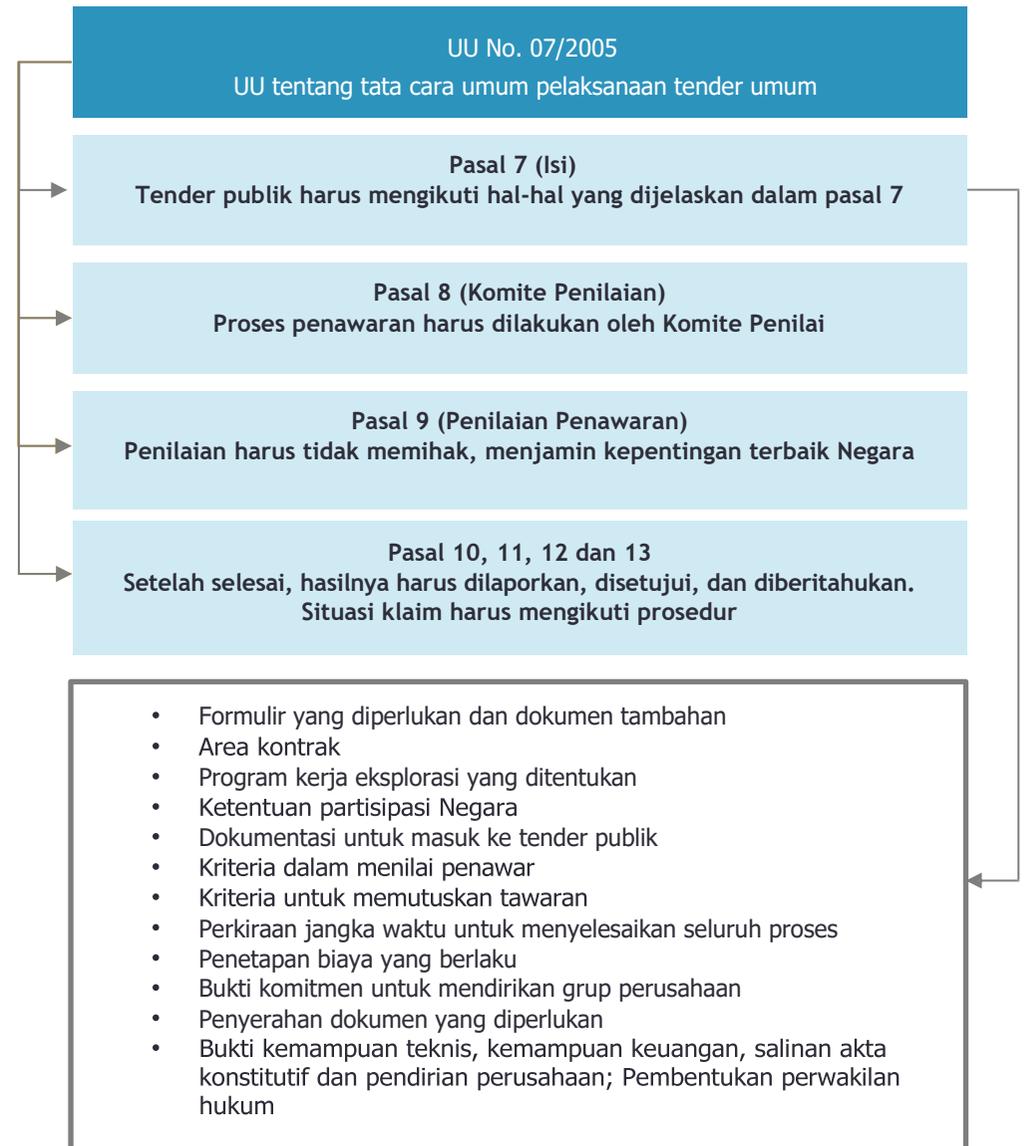
4.2 Wilayah Hukum Eksklusif Timor-Leste (TLEA)

Tender Umum untuk Kontrak Perminyakan (Dekrit hukum No.7/2005)

Undang-Undang No. 13/2005, tanggal 2 September (law on petroleum activities) menetapkan bahwa pemberian izin, termasuk pemberian kontrak perminyakan, harus didahului dengan tender umum. UU ini telah menetapkan prinsip-prinsip yang bertujuan untuk memberikan manfaat sebanyak mungkin bagi Timor-Leste dan penduduknya, dengan menetapkan rezim regulasi bagi perusahaan-perusahaan perminyakan.

Dekrit hukum No. 7/2005 menetapkan ketentuan tentang bagaimana Kementerian akan melanjutkan pemberian otorisasi kegiatan perminyakan. Undang-Undang tersebut menyatakan partisipasi Negara dalam kegiatan perminyakan dan juga bagaimana kegiatan tersebut dikembangkan. Transparansi dan informasi publik juga dibahas, di mana informasi yang tidak benar akan dikenai sanksi sebagaimana dinyatakan.

Perusahaan dan/atau kelompok perusahaan akan dipilih berdasarkan penawaran yang diajukan, dan pemberitahuan publik yang dikeluarkan oleh Menteri Perminyakan dan Mineral, Kebijakan Mineral dan Energi mengenai tender umum yang relevan. Menteri yang dimaksud akan bertanggung jawab atas seluruh proses penawaran dan juga menjadi orang yang bertanggung jawab untuk memberikan otorisasi prospeksi.



Kerangka Regulasi Industri Ekstraktif pada tahun 2021

4.2 Wilayah Hukum Eksklusif Timor-Leste (TLEA)

Dekret Hukum No. 20/2008

Dekret Hukum No. 20/2008, tanggal 19 Juni, yang membentuk Badan Perminyakan Nasional (BPPN) (ANP), memberikan amanat kepada badan yang sama, antara lain, tanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi sektor/industri yang berkaitan dengan minyak bumi dan gas alam serta turunannya di negara ini, dengan demikian bertindak sebagai otoritas pengatur negara.

Berdasarkan Dekrit Hukum No. 1/2016 tanggal 9 Februari, amandemen pertama Dekrit Hukum No. 20/2008 tanggal 19 Juni, lembaga publik Autoridade Nacional do Petróleo e Minerais (ANPM) bertanggung jawab untuk mengelola dan mengatur kegiatan perminyakan dan pertambangan di wilayah Timor-Leste, baik di lepas pantai maupun di daratan dan di Joint Petroleum Development Area (JPDA) sesuai dengan Dekrit Hukum tentang pembentukan ANPM, petroleum activities law Timor-Leste, Timor Sea Treaty dan Mining code.

Operasi Perminyakan Lepas Pantai di Timor-Leste (Dekret hukum No. 32/2016)

Dekret hukum Lepas Pantai mengatur operasi perminyakan di sumber daya minyak lepas pantai di Wilayah Timor-Leste, yang bertujuan untuk mencapai praktik eksplorasi dan eksploitasi yang efisien dan mencegah pemborosan dan polusi.

Operasi Perminyakan di wilayah Daratan Timor-Leste (Dekret hukum No. 18/2020)

Dekret hukum Perminyakan di wilayah Darat mengatur operasi perminyakan darat di Timor-Leste.

Dekret hukum Perminyakan di wilayah Darat ini bertujuan untuk:

- i. Memastikan pemulihan maksimum Sumber Daya Perminyakan Timor-Leste
- ii. Mencegah pemborosan dan pencemaran;
- iii. Menegakkan penggunaan praktik eksplorasi dan eksploitasi yang aman dan efektif serta praktik eksplorasi;
- iv. Memungkinkan pemantauan, pengawasan, dan inspeksi operasi perminyakan yang efektif;
- v. Mencegah pelanggaran hak-hak orang yang terkena dampak secara melawan hukum;
- vi. Berkontribusi untuk mencapai tujuan umum dan prioritas pembangunan Timor-Leste.

Kerangka Regulasi Industri Ekstraktif pada tahun 2021

4.3 Kerangka Hukum Joint Petroleum Development Area (JPDA) Sebelumnya

Kami akan memberikan informasi mengenai apa yang sebelumnya berlaku di bawah JPDA, karena kami yakin hal tersebut masih memiliki pengaruh terhadap data tahun 2021.

Timor Sea Treaty, yang ditandatangani pada tahun 2002, membentuk Joint Petroleum Development Area (JPDA) di Laut Timor. Perjanjian ini memungkinkan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya minyak bumi di JPDA untuk kepentingan rakyat Timor-Leste dan Australia.

Peraturan Legislasi yang berlaku untuk operasi JPDA adalah sebagai berikut²³:

- Timor Sea Treaty (TST)
- Interim Petroleum Mining Code
- Petroleum Mining Code
- Peraturan Sementara yang dikeluarkan berdasarkan Pasal 37 Interim Petroleum Mining Code
- Arahan Sementara yang dikeluarkan berdasarkan Pasal 37 Interim Petroleum Mining Code
- Pedoman Administratif Sementara untuk Joint Petroleum Development Area
- Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea
- Greater Sunrise – Memorandum of Understanding
- Greater Sunrise - International Unitization Agreement (IUA)

Production Sharing Contracts (PSC)

Kontrak minyak bumi meliputi:

- PSC TL-SO-T 19-12 (sebelumnya JPDA PSC 03-12)
- PSC TL-SO-T 19-13 (sebelumnya JPDA PSC 03-13)
- JPDA PSC 03-19
- JPDA PSC 03-20
- PSC TL-SO-T 19-10 (sebelumnya JPDA PSC 06-105)
- PSC TL-SO-T 19-11 (sebelumnya JPDA PSC 11-106)

Informasi lebih lanjut mengenai PSC dapat ditemukan di Lampiran F, khususnya mengenai sumber daya minyak dan gas bawah laut.

²³ Sumber: [ANPM website - JPDA Production, Barrels of Oil Equivalent \(BOE\)](#)
Sumber: [ANPM ANNUAL REPORT 2021](#)

Kerangka Regulasi Industri Ekstraktif pada tahun 2021

4.4 Perjanjian Khusus Dengan Australia Mengenai Eksplorasi Minyak & Gas

Pada tahun 2006, Timor-Leste dan Australia sepakat untuk menandatangani Perjanjian Internasional mengenai pengaturan maritim di Laut Timor:

- Timor Sea Treaty yang disebutkan sebelumnya
- Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea (CMATS) (perjanjian ini tidak berlaku lagi sejak tahun 2016)
- International Unitization Agreement untuk Greater Sunrise (IUA)

Selain itu, Memorandum of Understanding (MOU) Greater Sunrise menetapkan pengaturan tambahan di bidang ini.

Timor Sea Treaty (TST)

Secara resmi dikenal sebagai Timor Sea Treaty yang ditandatangani antara Pemerintah Timor-Leste dan Pemerintah Australia di Dili, pada tanggal 20 Mei 2002, hari ketika Timor-Leste memperoleh kemerdekaannya dari kepemimpinan Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk bergabung dalam eksplorasi minyak bumi di Laut Timor oleh kedua negara.

Perjanjian tersebut mulai berlaku pada tanggal 2 April 2003, setelah pertukaran nota diplomatik. Perjanjian tersebut berlaku selama 30 tahun sejak tanggal mulai berlaku atau saat batas dasar laut dapat ditetapkan, mana yang lebih dulu.

Timor Sea Treaty mengatur pembagian hasil dari sumber daya minyak bumi yang teridentifikasi di wilayah dasar laut yang disepakati yang dikenal sebagai Joint Petroleum Development Area dan tidak menentukan kedaulatan dan batas laut antara kedua negara. Perjanjian tersebut secara tegas menyatakan bahwa hak salah satu negara untuk mengklaim bagian dasar laut yang tumpang tindih tetap dipertahankan.

Pada tahun 2019, Resolusi No. 15/2019 tanggal 27 Agustus tentang Pengesahan Perjanjian Batas Maritim antara Australia dan Republik Demokratik Timor-Leste diterbitkan untuk memperbaiki Timor Sea Treaty (lihat blok baru di Lampiran K). Timor-Leste dan Australia menyimpulkan batas maritim definitif antara kedua Negara melalui Perjanjian tersebut dan bahwa penetapan batas tersebut memiliki implikasi pada kepemilikan, yurisdiksi, dan pengelolaan sumber daya minyak di Laut Timor.

Kerangka Regulasi Industri Ekstraktif pada tahun 2021

4.4 Perjanjian Khusus Dengan Australia Mengenai Eksplorasi Minyak dan Gas

Greater Sunrise - International Unitization Agreement (IUA)

Ladang gas dan kondensat Sunrise dan Troubadour, yang secara kolektif dikenal sebagai ladang Greater Sunrise, terletak sekitar 150 kilometer di tenggara Timor-Leste dan 450 kilometer di barat laut Darwin, Northern Territory.

Pada bulan April 2019, pemerintah Timor-Leste, melalui TIMOR GAP, membeli 56,56% gas dan kondensat Greater Sunrise, yang dimiliki oleh ConocoPhillips (30%) dan Shell (26,56%). Woodside masih memegang 33,44% (Operator) dan Osaka Gas dengan 10%.

IUA Greater Sunrise, bersama dengan kerangka hukum lainnya, mengatur kegiatan perminyakan di Unit Area dan Unit Reservoir.

Pada tahun 2019, Resolusi No.15/2019 tanggal 27 Agustus diterbitkan untuk menyampaikan Pengesahan Perjanjian Batas Maritim antara Australia dan Republik Demokratik Timor-Leste. Resolusi ini memperbaiki Timor Sea Treaty dan International Unitization Agreement dengan menetapkan garis geodesik sementara baru di Kawasan Greater Sunrise. Garis geodesik final hanya akan berlaku setelah Timor dan Indonesia menetapkan batas-batas pada landasan benua dan penipisan Kawasan Greater Sunrise.

Greater Sunrise – Memorandum of Understanding (MOU)

Memorandum of Understanding Greater Sunrise menetapkan nilai biaya yang berkaitan dengan Penyatuan Greater Sunrise yang akan dialihkan Pemerintah Australia kepada Pemerintah Timor-Leste.

Petroleum Mining Code (PMC)

Sesuai dengan Pasal 7 (a) Timor Sea Treaty, dan tunduk pada ketentuan Perjanjian tersebut, Petroleum Mining Code berikut diadopsi untuk mengatur eksplorasi, pengembangan, dan eksploitasi Minyak Bumi di dalam JPDA, serta ekspor Minyak bumi dari wilayah yang sama.

Interim Petroleum Mining Code (Interim PMC)

Interim PMC mengatur kegiatan perminyakan di JPDA. Terlepas dari kenyataan bahwa PMC didirikan, Interim PMC terus mengatur PSC berikut:

- PSC TL-SO-T 19-12 (sebelumnya JPDA PSC 03-12)
- PSC TL-SO-T 19-13 (sebelumnya JPDA PSC 03-13)
- JPDA PSC 03-19
- JPDA PSC 03-20

Kerangka Regulasi Industri Ekstraktif pada tahun 2021

4.4 Perjanjian khusus dengan Australia mengenai Eksplorasi Minyak & Gas - undang-undang baru sejak 08/19

Greater Sunrise

Resolusi No.15/2019 tanggal 27 Agustus, sebagaimana disebutkan sebelumnya, terkait dengan Perbaikan Perjanjian Batas Maritim antara Australia dan Republik Demokratik Timor-Leste. Mengenai Rezim Khusus Greater Sunrise, Australia dan Republik Demokratik Timor-Leste memiliki hak atas semua minyak bumi yang diproduksi dengan membagi pendapatan hulu (khususnya first tranche petroleum, profit oil dan perpajakan), yang diperoleh dari eksploitasi hulu minyak bumi yang diproduksi di Ladang Greater Sunrise²⁴:

- Dalam rasio 70 persen untuk Timor-Leste dan 30 persen untuk Australia jika Ladang-ladang Greater Sunrise dikembangkan melalui Pipa ke Timor-Leste; atau
- Dalam rasio 80 persen untuk Timor-Leste dan 20 persen untuk Australia jika Ladang-ladang Greater Sunrise dikembangkan melalui Pipa ke Australia.

Di Bawah Bekas Wilayah JPDA

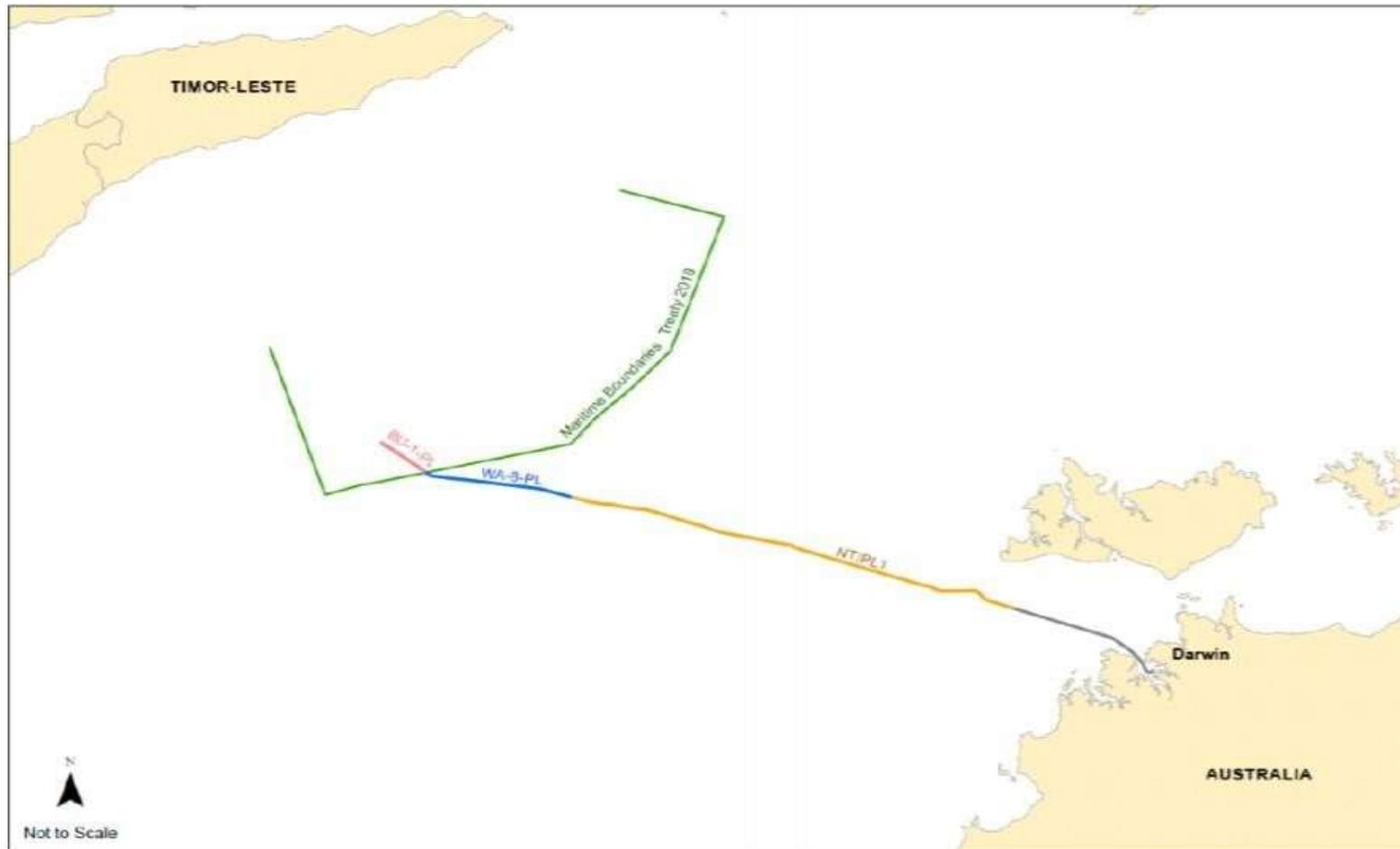
Berdasarkan Resolusi No. 15/2019 tanggal 27 Agustus, Wilayah JPDA menjadi 100% Yurisdiksi Eksklusif Timor-Leste dan diatur oleh ANP. Lebih jauh, diperlukan adanya "kerja sama antara ANP, DIIS dan NOPSEMA terkait dengan regulasi Lapangan Gas Bayu-Undan yang aman dan efisien, termasuk Fasilitas Bayu-Undan dan Pipa Bayu-Undan, yang terakhir melintasi landas kontinen Timor-Leste dan Australia dan di mana Australia menjalankan yurisdiksi eksklusif atas Pipa tersebut". Dengan demikian:

1. ANP akan bertanggung jawab penuh untuk mengatur Fasilitas Bayu-Undan, yaitu infrastruktur lepas pantai hulu yang terpasang di Lapangan Gas Bayu-Undan yang mengekstraksi dan memproses gas dan cairan serta menyimpan cairan yang diproduksi dari Lapangan Gas Bayu-Undan tetapi tidak termasuk Pipa Bayu-Undan.
2. The Department of Industry, Innovation and Science of Commonwealth of Australia (DIIS) akan bertanggung jawab atas rezim yang mengatur hak dan aktivitas minyak di daerah aliran sungai Pesisir (di luar 3 mil laut setelah laut teritorial) hingga batas terluar Zona Ekonomi Eksklusif Australia.
3. Australian National Offshore Petroleum Safety and Environmental Management Authority (NOPSEMA) akan secara eksklusif mengatur Pipa Bayu-Undan, yang tercakup dalam lisensi BU-1-PL, WA-8-PL, dan NT/PL1.

²⁴ Sumber: <http://www.anpm.tl/wp-content/uploads/2019/09/Resolu%C3%A7%C3%A3o-do-Parlamento-Nacional-No-15-2019-de-27-de-Agosto.pdf>

Kerangka Regulasi Industri Ekstraktif pada tahun 2021

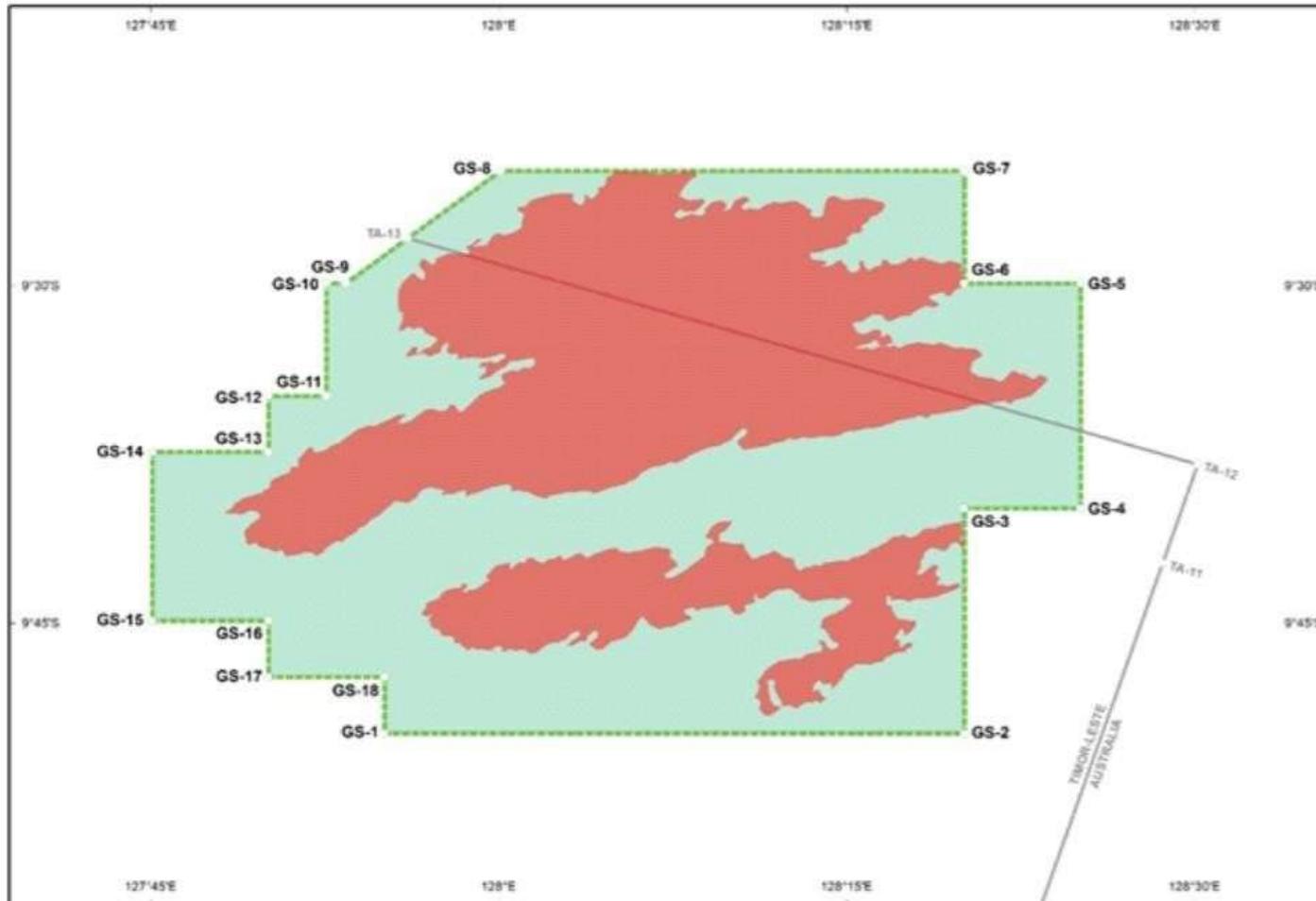
4.4 Perjanjian khusus dengan Australia: Batas Maritim – Resolusi Parlemen 15/2019²⁵



²⁵ Sumber: <http://www.anpm.tl/wp-content/uploads/2019/09/Resolucao-do-Governo-No-22-2019-de-27-de-Agosto.pdf>

Kerangka Regulasi Industri Ekstraktif pada tahun 2021

4.4 Perjanjian khusus dengan Australia: Batas Maritim – Resolusi Parlemen 15/2019²⁶



²⁶ Sumber: <http://www.anpm.tl/wp-content/uploads/2019/09/Resolucao-do-Parlamento-Nacional-No-15-2019-de-27-de-Agosto.pdf>

Kerangka Regulasi Industri Ekstraktif pada tahun 2021

4.5 ANPM

4.5.1 Autoridade Nacional do Petróleo e Minerais (ANPM)

Autoridade Nacional do Petróleo e Minerais (ANPM) adalah lembaga publik Timor-Leste yang dibentuk berdasarkan Dekrit Hukum No. 1/2016 tanggal 9 Februari (amandemen pertama Dekrit Hukum No.20/2008 tanggal 19 Juni).

Dekrit Hukum No. 20/2008 tanggal 19 Juni yang membentuk Autoridade Nacional do Petróleo (ANP) mempercayakan badan yang sama dengan tanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi sektor/industri yang berkaitan dengan minyak bumi dan gas alam serta turunannya di negara tersebut, sehingga bertindak sebagai otoritas pengatur negara.

Berdasarkan Dekrit Hukum No. 1/2016 tanggal 9 Februari, amandemen ke-1 Dekrit Hukum No. 20/2008 tanggal 19 Juni, lembaga publik Autoridade Nacional do Petróleo e Minerais (ANPM) diketahui bertanggung jawab untuk mengelola dan mengatur kegiatan perminyakan dan pertambangan di wilayah Timor-Leste, baik di lepas pantai maupun di daratan dan di Joint Petroleum Development Area (JPDA) sesuai dengan Dekrit Hukum tentang pembentukan ANPM, Petroleum activities law Timor-Leste, Timor Sea Treaty dan Mining Code.

Selanjutnya, berdasarkan Dekrit Hukum No. 27/2019, terdapat amandemen kedua terhadap Undang-Undang aslinya. Amandemen ini terkait dengan delimitasi definitif batas maritim antara kedua Negara oleh Timor-Leste dan Australia melalui Perjanjian (Resolusi No. 15/2019) dan juga delimitasi tersirat atas kepemilikan, yurisdiksi, dan pengelolaan sumber daya minyak di Laut Timor.

Oleh karena itu, ketika Resolusi No.15/2019 mulai berlaku, ANPM akan menjalankan fungsinya sebagai otoritas yang ditunjuk untuk tujuan Wilayah Rezim Khusus Greater Sunrise dan menjalankan fungsinya di Bekas JPDA, yang menjadi bagian dari yurisdiksi Eksklusif Timor-Leste.

Oleh karena itu, ANPM akan bertanggung jawab untuk mengelola dan mengatur kegiatan perminyakan dan pertambangan di Yurisdiksi Eksklusif Timor-Leste, yang mencakup Bekas JPDA dan Wilayah Rezim Khusus Greater Sunrise, sesuai dengan Undang-Undang Keputusan (yang membentuk ANPM) dan undang-undang serta peraturan berikut:

- petroleum activities law Timor-Leste, yang diubah dengan Undang-Undang No. 1/2019 tanggal 18 Januari dan Undang-Undang No. 6/2019 tanggal 4 Desember;
- Resolusi No. 15/2019, yang mengubah Timor Sea Treaty;
- Semua legislasi baru yang diperkenalkan menyusul perbaikan Perjanjian Batas Maritim pada bulan Agustus 2019;
- Resolusi sebelumnya sebelum Agustus 2019;
- Petroleum Mining Code dan kerangka hukum terkait untuk Wilayah rezim khusus Greater Sunrise;

Namun, perubahan terbaru telah diperkenalkan pada tahun 2023. Dengan berlakunya Undang-Undang No.62/2023 tanggal 6 September 2023, amandemen ke-3 Undang-Undang No.20/2008 tanggal 19 Juni 2008 (Undang-Undang Amandemen), ANPM kini telah berganti nama menjadi Autoridade Nacional do Petróleo (ANP).

Kerangka Regulasi Industri Ekstraktif pada tahun 2021

4.5.2 Autoridade Nacional do Petróleo (ANP) – Setelah 2023

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, setelah pemberlakuan Dekrit hukum Nomor 62/2023 pada tanggal 6 September 2023, ANP terus menegakkan tujuan dan tanggung jawab komprehensif yang berfokus pada sektor minyak dan gas. ANM, yang akan dibahas lebih rinci, akan mengambil peran sebagai regulator untuk sektor sumber daya mineral, sesuai dengan regulasi yang ditentukan dalam mining code. Untuk rincian lebih lanjut, silakan merujuk ke Bagian 6.

ANP tetap bertanggung jawab untuk mengelola dan mengatur kegiatan perminyakan hulu dan hilir di wilayah Timor-Leste dan di wilayah yang diatur di bawah rezim khusus Greater Sunrise yang diatur dalam Perjanjian Batas Maritim antara Timor-Leste dan Australia. Tanggung jawab ini sekarang juga mencakup pengawasan dan regulasi (a) Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS), (b) Produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan pemasaran hidrogen dan aktivitas terkait lainnya, dan (c) Produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan pemasaran bahan bakar sintetis dan aktivitas terkait lainnya sesuai dengan amandamen Dekrit hukum dan Petroleum Activities Law Timor-Leste.

Sehubungan dengan perubahan ini, ANP tetap berkomitmen untuk menghormati kewajibannya berdasarkan kontrak yang ada. Proses administratif hukum internal dilakukan untuk memberi tahu semua pihak tentang perubahan masing-masing.

Dewan Menteri juga menyetujui Dekrit hukum tentang Pembentukan Otoritas Mineral Nasional (ANM) dengan kewenangannya sebagai regulator sektor sumber daya mineral sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam mining code.

Dengan persetujuan ini, ANPM tidak ada lagi, ketika dekrit hukum ini telah disahkan oleh Presiden Republik dan Diterbitkan dalam Jurnal Republik; dan ANPM akan dibagi menjadi

ANP (Autoridade Nacional Petróleo) dan ANM (Autoridade Nacional dos Minerais). Untuk tujuan laporan saat ini, kami mempertahankan referensi ke ANPM karena selama tahun 2021 ANPM adalah penunjukan entitas dan bertanggung jawab atas informasi yang diberikan. Saat ini, pada tingkat operasional karena pemisahan baru-baru ini, inisiatif pelaporan masih saling melengkapi antara entitas menjadi ANP (Autoridade Nacional Petróleo) dan ANM (Autoridade Nacional dos Minerais). Untuk tujuan laporan saat ini, kami mempertahankan referensi ke ANPM karena selama tahun 2021 ANPM adalah penunjukan entitas dan bertanggung jawab atas informasi yang diberikan. Saat ini, pada tingkat operasional karena pemisahannya baru-baru ini, inisiatif pelaporan masih saling melengkapi antara Autoridade Nacional Petróleo) and ANM (Autoridade Nacional dos Minerais).

Kerangka Regulasi Industri Ekstraktif pada tahun 2021

4.6 Petroleum Fund

Petroleum Fund didirikan untuk memenuhi persyaratan konstitusional yang ditetapkan oleh Pasal 139 Konstitusi Republik yang mengamankan penggunaan sumber daya alam secara adil dan merata sesuai dengan kepentingan nasional, dan bahwa pendapatan yang diperoleh dari eksploitasi sumber daya tersebut harus mengarah pada pembentukan cadangan keuangan wajib²⁷.

Parlemen Timor-Leste menetapkan kerangka hukum untuk Petroleum Fund melalui Undang-Undang Petroleum Fund, yang diperbarui dengan amandemen petroleum activities law. Dana tersebut dibentuk sebagai rekening Kementerian Keuangan yang disimpan di Banco Central Timor-Leste (BCTL, Banco Central de Timor-Leste).

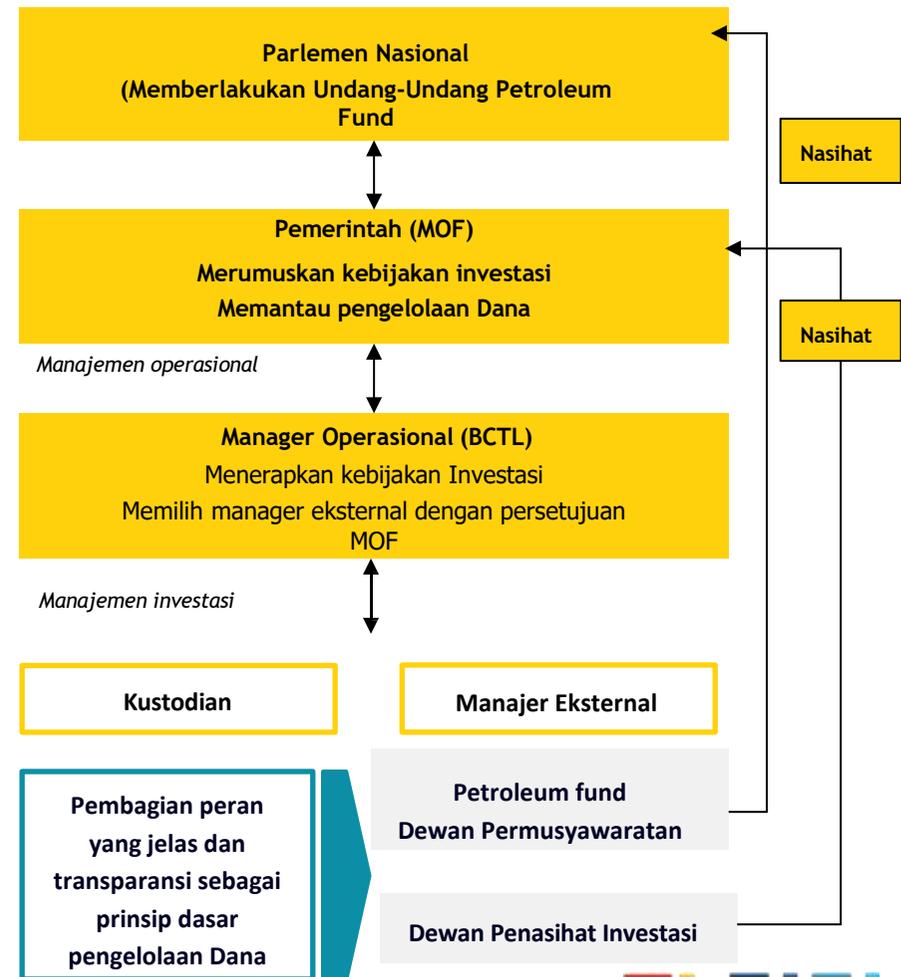
Undang-Undang Petroleum Fund:

- Menyediakan mekanisme yang membantu Timor-Leste mengelola pendapatan minyak bumi secara berkelanjutan;
- Merinci parameter untuk mengoperasikan dan mengelola Petroleum Fund;
- Menentukan alokasi aset dan batasan risiko;
- Mengatur pengumpulan dan pengelolaan penerimaan yang terkait dengan kekayaan minyak bumi;
- Mengatur transfer ke anggaran negara, dan
- Menyediakan akuntabilitas dan pengawasan pemerintah atas kegiatan-kegiatan ini.

Undang-Undang Petroleum Fund mengharuskan semua

²⁷ Sumber: [Timor Leste Petroleum Fund Annual Report 2021.pdf \(ifswf.org\)](https://www.ifswf.org/)

pendapatan minyak bumi ditransfer sepenuhnya ke Dana tersebut dan diinvestasikan di luar negeri dalam bentuk aset keuangan. Pengeluaran Dana tersebut hanya ditransfer kembali ke anggaran - anggaran pemerintah pusat, sesuai dengan persetujuan DPR melalui Undang-Undang No.9/2005 (3 Agustus 2005)



Kerangka Regulasi Industri Ekstraktif pada tahun 2021

4.6 Petroleum Fund

Undang-Undang Petroleum Fund menyediakan mekanisme yang membantu Timor-Leste mengelola pendapatan minyak bumi secara berkelanjutan, merinci parameter untuk mengoperasikan dan mengelola Petroleum fund, menetapkan pedoman alokasi aset dan batasan risiko, mengatur pengumpulan dan pengelolaan penerimaan, mengatur transfer ke Anggaran Negara, menetapkan peran dan tanggung jawab yang jelas dari entitas yang terlibat dalam pengelolaan Dana dan menyediakan akuntabilitas dan pengawasan pemerintah atas kegiatan-kegiatan ini.

Dana tersebut memisahkan aliran masuk pendapatan minyak bumi dari pengeluaran pemerintah. Semua pendapatan minyak bumi awalnya masuk ke dalam Dana sebelum transfer apa pun dilakukan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Jumlah transfer dipandu oleh Estimated Sustainable Income (ESI), yang ditetapkan sebesar 3% dari total Kekayaan Minyak Bumi.

Estimated Sustainable Income (ESI)

Kekayaan Minyak mencakup saldo petroleum fund dan Nilai net present value dari pendapatan minyak bumi masa depan yang diharapkan. Alasan di balik penggunaan ESI adalah untuk memperlancar pengeluaran pendapatan minyak yang sementara tinggi dan melindungi dari volatilitas arus masuk minyak bumi dan menjaga penggunaan keuangan publik yang berkelanjutan

Dana tersebut hanya diinvestasikan dalam aset keuangan internasional. Tujuan investasi adalah untuk mencapai pengembalian riil 3% dalam jangka panjang untuk berkontribusi pada keberlanjutan kebijakan fiskal.

Berdasarkan manajemen yang baik dan kebijakan investasi yang hati-hati (sebagai pemenuhan ESI) maka dimungkinkan untuk memiliki peningkatan yang stabil selama bertahun-tahun dari Nilai Pasar dana tersebut bahkan memperhatikan bahwa penerimaan minyak bumi telah menurun setelah tahun 2012 akibat dari penurunan harga minyak.

Saldo petroleum fund²⁸

Saldo Dana meningkat sebesar USD 716,1 juta pada tahun 2021 sehingga menutup tahun tersebut pada angka USD 19.621 juta. Pendapatan minyak bumi menyumbang sekitar USD 720 juta kepada Dana tersebut, sementara pengembalian investasi sebesar USD 1.144 juta sepanjang tahun.

Total penarikan dari petroleum fund untuk Tahun Anggaran 2021 adalah USD 1.147,9 juta yang merupakan USD 600,0 juta lebih tinggi dari jumlah Estimated Sustainable Income (ESI) sebesar USD 547,9 juta yang diproyeksikan untuk tahun tersebut²⁹. Ini merupakan sedikit peningkatan dari ESI pada tahun 2020 karena peningkatan saldo petroleum fund. Bagian berikut memberikan rincian lebih lanjut tentang arus ini.

²⁸ Jumlah yang disajikan dalam bab ini adalah sebagaimana dilaporkan oleh PF dalam Laporan Tahunan tahun 2021.
Silakan lihat bagian 3.5 untuk rekonsiliasi antara pendapatan yang dilaporkan oleh entitas pada templat dan PF.

²⁹ Sumber: [Timor Leste Petroleum Fund Annual Report 2021.pdf \(ifswf.org\)](https://www.ifswf.org/Timor-Leste-Petroleum-Fund-Annual-Report-2021.pdf)

Kerangka Regulasi Industri Ekstraktif pada tahun 2021

4.6 Petroleum Fund

Penarikan

Penarikan dari petroleum fund adalah jumlah yang membiayai hampir seluruh Anggaran Negara Umum Pemerintah. Parlemen menyetujui penarikan dari petroleum fund sebesar USD 1.377,6 juta. Pada bulan April 2021, Parlemen menyetujui usulan Anggaran perbaikan Pemerintah 2021 yang terkait dengan COVID-19, termasuk subsidi untuk mahasiswa pendidikan tinggi, dukungan pekerjaan, dan subsidi tagihan listrik. Total penarikan dari Dana tersebut tetap seperti dalam anggaran awal yang disetujui. Anggaran yang diperbaiki diumumkan pada bulan Mei 2021. Secara total, Pemerintah menarik USD 1.147,9 juta dari Dana tersebut selama tahun 2021, yang merupakan 83% dari jumlah yang disahkan dalam Undang-Undang Anggaran 2021. Penarikan dana pada tahun 2021 lebih tinggi sebesar USD 600,0 juta dibandingkan dengan ESI sebesar USD 547,9 juta yang

dipublikasikan dalam Buku Anggaran akhir tahun 2021, rata-rata 5% dari PF, bukan 3% yang ditetapkan. Meskipun terjadi peningkatan di Timor-Leste pada tahun 2021, yang dibuktikan dengan kinerja pasar investasi di bursa saham yang memecahkan rekor, ketergantungan pada penarikan PF tetap menjadi perhatian.

Pengembalian pajak (Tax Refund)

Pada tahun 2018, Pemerintah Timor-Leste menyetujui pengembalian pajak terkait kelebihan pembayaran Corporate Income Tax (CIT) dan Supplemental Petroleum Tax (SPT) selama periode fiskal 2011, 2012 dan 2013 dari operasi Kitan. Ada kemungkinan bahwa pengembalian pajak di masa mendatang dapat dibayarkan pada tahun-tahun mendatang dari petroleum fund, meskipun selama tahun 2021 tidak ada pengembalian pajak terkait tahun sebelumnya³⁰



³⁰ Sumber: [Timor Leste Petroleum Fund Annual Report 2021.pdf \(ifswf.org\)](https://www.ifswf.org/)

* Jumlah yang disajikan untuk penerimaan memperhitungkan pajak minyak bumi, royalti, dan profit oil & Gas

Kerangka Regulasi Industri Ekstraktif pada tahun 2021

4.6 Petroleum Fund

Kinerja Petroleum Fund pada tahun 2021

Pada tahun 2021, Petroleum Fund mencatat total laba sebesar 6,25%, didorong oleh laba sebesar 22,7% dalam portofolio ekuitas. Portofolio bunga tetap mengurangi kinerja dengan laba sebesar -2,25%, sementara pinjaman ke Timor Gap memberikan laba sebesar 13,9%.

Dana tersebut telah mengamati peningkatan laba tahunan menjadi 4,9% sejak awal, didukung oleh kinerja yang kuat dalam beberapa tahun terakhir. Sementara portofolio bunga tetap telah menghasilkan laba sebesar 2,5% per tahun sejak tahun 2005, alokasi ekuitas telah menghasilkan laba sebesar 11,6% per tahun setelah peluncurannya pada tahun 2010.

Laba riil tahunan Dana tersebut sejak awal adalah 2,9%, dengan memperhitungkan inflasi AS. Setelah ekuitas mencapai bobot alokasi strategis sebesar 40% pada tahun 2014, laba riil telah mencapai 3,8% per tahun, melampaui tujuan teoritis di bawah model dana abadi.

Kerangka Regulasi Industri Ekstraktif pada tahun 2021

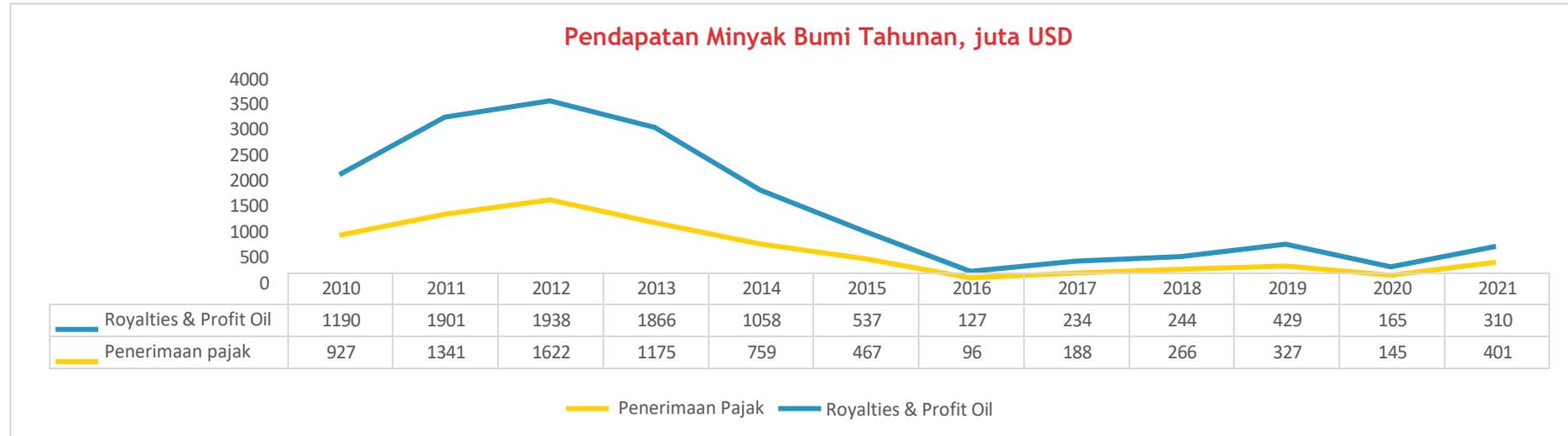
4.6 Petroleum Fund

Total pendapatan minyak bumi yang terkumpul selama tahun 2021 adalah USD 720 juta. Pendapatan tersebut mencakup USD 401 juta dalam bentuk pajak minyak bumi dan USD 310 juta dalam bentuk royalti dan profit oil & gas, serta USD 9 juta pembayaran lainnya.

Produksi minyak dan gas meningkat sedikit dari 35,6 juta BOE pada tahun 2020 menjadi 36,1 juta BOE pada tahun 2021³¹. Pendapatan pada tahun 2021 lebih dari 120% lebih tinggi dari tahun sebelumnya karena harga dan produksi yang lebih tinggi. Harga minyak rata-rata pada tahun 2021 adalah USD 70,7/b, hampir USD 30/b lebih tinggi dari rata-rata tahun sebelumnya. Total produksi dari tahun 2004 hingga 2021 adalah 935 juta BOE.

Tingkat produksi dipertahankan pada tingkat yang sama selama beberapa tahun terakhir dengan keberhasilan pelaksanaan sumur pengisian Bayu Undan pada tahun 2018. Ada 7 kargo kondensat dan 4 kargo LPG yang dijual pada tahun 2021, jumlah yang sama seperti pada tahun 2020.

Total penerimaan dana sejak awal adalah USD 23.922 juta yang terdiri dari penerimaan pasal 6.1(a) sebesar USD 10.251 juta, penerimaan pasal 6.1(b) sebesar USD 13.371 juta, penerimaan pasal 6.1(e) sebesar USD 95 juta, dan yang ditransfer dari Pemerintah sebesar USD 205 juta. Silakan lihat tabel di bawah ini yang menunjukkan pendapatan minyak bumi tahunan sejak tahun 2010.



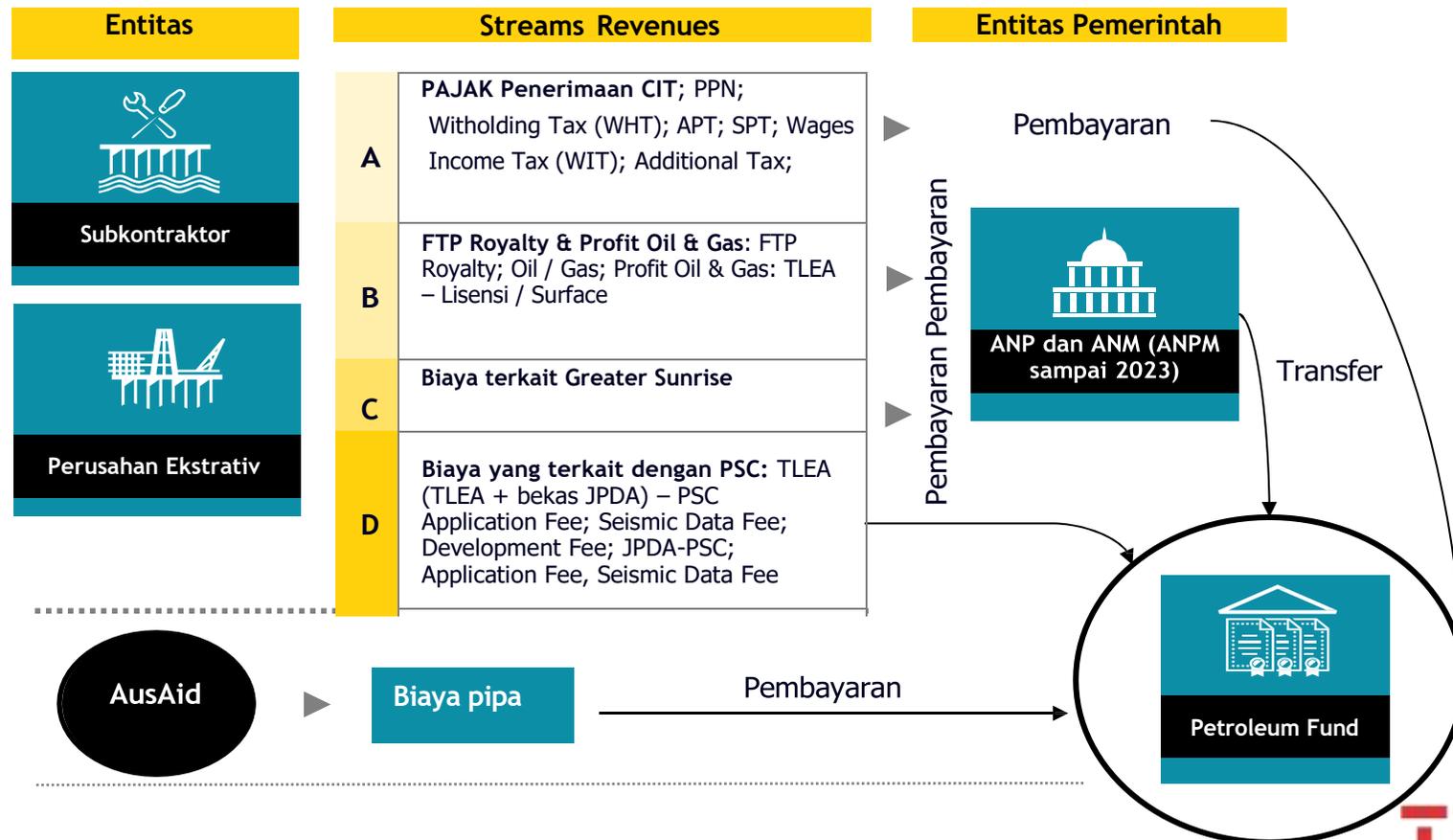
³¹ Data yang disajikan sesuai dengan template ANPM 2021. Terdapat perbedaan volume LNG antara Laporan Tahunan Petroleum fund 2021 dan data ANPM yang disampaikan dalam templat karena penggunaan faktor konversi yang berbeda. Untuk informasi lebih rinci, silakan lihat Bagian 3.4.1.

Kerangka Regulasi Industri Ekstraktif pada tahun 2021

4.7 Ringkasan Proses Pembayaran

Gambar di bawah ini menggambarkan komponen pendapatan minyak bumi Timor-Leste yang mengalir dari entitas ekstraktif dan subkontraktornya. Seperti yang anda lihat, mereka terorganisasi dengan baik dalam menyalurkan dana. ANP dan ANM (sebelumnya dikenal sebagai ANPM hingga 2023) mewakili pemerintah dan mengatur pasar, mengumpulkan biaya dan mentransferkannya ke Petroleum fund.

Hampir tidak ada hubungan langsung dari sektor perminyakan ke sektor ekonomi lainnya. Semua produksi minyak bumi dilakukan di lepas pantai dan diserahkan kepada perusahaan asing. Pendapatan minyak bumi mengalir ke Petroleum fund lepas pantai Timor-Leste, yang sebagiannya diambil melalui anggaran pemerintah, yang menguntungkan sektor bukan minyak.



Kerangka Regulasi Industri Ekstraktif pada tahun 2021

4.8 Badan Usaha Milik Negara (SOE's)

Undang-Undang Perminyakan (UU No. 2005/13) - Pasal 22 "Partisipasi Negara dalam Operasi Perminyakan", memungkinkan Perusahaan Minyak Nasional (NOC) milik negara untuk berpartisipasi dalam usaha bersama (JV) untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya minyak bumi di Timor-Leste. Undang-undang ini tidak berlaku untuk JPDA, karena ruang lingkupnya hanya terbatas pada yurisdiksi Timor-Leste. Selanjutnya, dengan pembentukan TIMOR GAP, Negara bertujuan untuk memfasilitasi, melalui NOC, partisipasi dalam setiap otorisasi yang dikeluarkan di bawah JPDA, dan yurisdiksi lainnya, mengikuti praktik industri terbaik.

TIMOR GAP, E.P.

TIMOR GAP, E.P. didirikan sebagai perusahaan nasional Timor-Leste dengan Dekrit hukum no 31/2011 sebagaimana kemudian diubah. Tujuan utamanya adalah untuk bertindak atas nama Negara dalam menjalankan bisnis di sektor Minyak dan gas³².

Perusahaan ini menerima pendanaan pemerintah berupa transfer publik tahunan untuk tujuan mendukung kegiatan operasionalnya sesuai dengan UU APBN. Transfer publik ke TIMOR GAP dilakukan melalui anggaran tahunan Kementerian Perminyakan dan Sumber Daya Mineral (MPRM). Dana yang dialokasikan untuk TIMOR GAP didasarkan pada rencana tahunan perusahaan yang disetujui oleh Dewan Menteri.

Kesepakatan tentang pelaksanaan anggaran dan pelaporan ditandatangani setiap tahun antara MPRM dan TIMOR GAP sebelum pencairan dana ke rekening bank yang ditunjuk, perusahaan. Berdasarkan Pasal 4 Dekrit hukum no 31/2011, TIMOR GAP wajib menyampaikan laporan setiap triwulanan kepada MPRM pada penggunaan transfer publik yang sesuai. Rincian transfer disebutkan pada laporan tahunan 2020 TIMOR GAP.

Entitas ini memiliki anak perusahaan yang bergerak di bidang kegiatan hulu dan layanan minyak dan gas.

Subsidiari Perusahaan Upstream (Block Kepentingan SPVs)

Aktivitas subsidiari perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh TIMOR GAP bervariasi dari wilayah darat hingga lepas pantai. Pada tahun 2020 TIMOR GAP memiliki kepentingan sebagai berikut:

- Pada tahun 2012 TIMOR GAP mendirikan subsidiari perusahaan yang dimiliki penuh, TIMOR GAP PSC 11-106 yang bertanggung jawab atas eksplorasi, produksi minyak mentah dan gas alam dan kegiatan penjualan masing-masing terkait dengan PSC TL-SO-T 19-11. Kemitraan antara TIMOR GAP PSC 11-106, Eni JPDA 11-106 B.V., dan Inpex untuk PSC ini di wilayah JPDA sebelumnya telah berlaku efektif pada tanggal 23 Oktober 2013. TIMOR GAP memiliki 24% saham di JV.
- Didirikan pada Oktober 2015, TIMOR GAP Seismic Services, Unipessoal, Lda. dimiliki oleh TIMOR GAP (60%) dan subsidiari perusahaan China National Petroleum Corporation, BGP Geoservices Pte, Ltd (40%) dengan tujuan untuk menyediakan layanan survei seismik di wilayah Timor-Leste.
- Didirikan pada tahun 2015, TIMOR GAP OFFSHORE BLOCK, Unipessoal, Lda. adalah kendaraan tujuan khusus untuk blok lepas pantai TL-SO-15-01. Pada tanggal 18 Desember 2015, ini subsidiari perusahaan memulai eksplorasi lepas pantai di blok TL-SO-15-01 yang memegang 100% saham di PSC
- TIMOR GAP Chuditch, Unipessoal, Lda. didirikan pada tahun 2016, untuk memperluas portofolio Eksplorasi & Produksi TIMOR GAP. Pada 8 November 2019, TIMOR GAP CHUDITCH, dan mitra usaha bersama, SundaGas Banda Unipessoal, Lda., menandatangani PSC

³² Sumber: [Timor Gap 2021 Annual Report & Accounts](#)

untuk area kontrak TL-SO-19-16 dengan ANPM. Timor GAP memiliki 25% saham di JV

- BLOK DARAT TIMOR GAP, Unipessoal, Lda. didirikan pada tahun 2017, sebagai SPV dengan tujuan masuk ke dalam PSC TL-OT-17-08, dengan TIMOR RESOURCES untuk eksplorasi dan eksploitasi Blok A darat, berbagi kemitraan 50% saham.
- Pada tahun 2017, TIMOR GAP ONSHORE BLOCK B, Unipessoal, Lda. diciptakan sebagai SPV untuk berpartisipasi dalam kegiatan di Blok B darat.
- Didirikan pada tahun 2017, TIMOR GAP ONSHORE BLOCK C, Unipessoal, Lda. adalah SPV untuk blok TL-OT-17-09 yang ditandatangani dengan TIMOR RESOURCES, berbagi kemitraan 50%. Silakan periksa Lampiran J untuk Blok Daratan Timor GAP.
- Pada tahun 2017, TIMOR GAP Drilling & Services, Unipessoal, Lda. tercipta karena kompleksitas penyediaan layanan dalam bisnis hulu. Tujuan utamanya adalah untuk menarik dan meningkatkan nilai ekonomi komersial.

Didirikan pada tahun 2018, ada empat anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki didirikan, sebagai berikut:

- TIMOR GAP GREATER SUNRISE RL2, Unipessoal, Lda., dengan tujuan untuk memegang kepentingan yang berpartisipasi dalam Retention Lease NT/RL2 dari bidang Greater Sunrise.
- TIMOR GAP GREATER SUNRISE RL, Unipessoal, Lda., dengan tujuan memegang kepentingan yang berpartisipasi dalam Retention Lease NT/RL dari bidang Greater Sunrise.
- TIMOR GAP GREATER SUNRISE 03-19, Unipessoal, Lda., dengan tujuan untuk memegang kepentingan yang diikutsertakan dalam PSC JPDA 03-19 lapangan Greater Sunrise.
- TIMOR GAP GREATER SUNRISE 03-20, Unipessoal, Lda., dengan tujuan untuk memegang kepentingan yang berpartisipasi dalam PSC JPDA 03-20 bidang Greater Sunrise

Pada tahun 2021, TIMOR GAP mendirikan anak perusahaan baru yang sepenuhnya dimiliki untuk berpartisipasi dalam eksplorasi dan produksi:

- Didirikan pada tahun 2021, TIMOR GAP PUALACA BLOCK, Unipessoal, Lda. subsidiari perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh TIMOR GAP, diberikan kontrak PSC TL-OT-21-17 (Blok Pualaca) onshore, memegang 100% participating interest dan mengambil peran sebagai Operator.

Selain itu, in 2022, Pada tahun 2022, TIMOR GAP mendirikan subsidiari perusahaan baru yang sepenuhnya dimiliki oleh TIMOR GAP RARAHANA BLOCK, Unipessoal, Lda., untuk berpartisipasi dalam kegiatan eksplorasi dan produksi di PSC TLOT-22-18 onshore yang diberikan tahun ini kepada perusahaan.

Subsidiari Perusahaan Downstream

- Didirikan pada tahun 2014, TIMOR GAP Oil & Gas Marine and Logistics, Unipessoal, Lda menyediakan layanan umum untuk industri kelautan dan layanan pendukung untuk industri perminyakan.
- Didirikan pada tahun 2020, WESTSTAR-GAP Aviation, Lda. adalah perusahaan bersama yang didirikan oleh TIMOR GAP dan WESTSTAR AVIATION TIMOR, Unipessoal, Lda, afiliasi dari PT. WESTSTAR AVIATION INDONESIA, yang mengkhususkan diri dalam penyediaan layanan transportasi penerbangan khususnya untuk industri minyak dan gas lepas pantai. TIMOR GAP memiliki 45% saham subsidiari perusahaan, sedangkan WESTSTAR AVIATION TIMOR, Unipessoal, Lda. memiliki 55%.

Proyek Subsidiari Tasi Mane

- Didirikan pada tahun 2015, The South Horizon Offshore Services, Lda, subsidiari perusahaan dari TIMOR GAP Oil & Gas Marine and Logistics, Lda, menyediakan layanan dukungan untuk kapal dan fasilitas lepas pantai yang beroperasi di Laut Timor, untuk memiliki dan mengoperasikan kapal pendukung lepas pantai dan untuk memberikan layanan lain untuk industri kelautan dan minyak & gas.

Pendapatan dan Hasil Keuangan

- TIMOR GAP menerima dana pemerintah sebesar 65.739.700 USD selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 (2020: 15.227.966 USD).
- Selain bergantung pada dana pemerintah untuk menutupi sebagian besar biaya proyek, perusahaan juga memperoleh pendapatan dari bisnis perdagangan pasokan bahan bakar EDTL, E.P. dan dari penjualan bahan bakar dari SPBU Suai yang mencatat total penjualan gabungan sebesar 20.665.059 USD (2020: 147.914 USD). Bisnis perdagangan pasokan bahan bakar EDTL, E.P. merupakan bisnis baru bagi TIMOR GAP untuk tahun 2021.
- Secara grup, laba/rugi operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mencapai -26.152.277 USD (2020: -698.142.082 USD). Laba/(Rugi) atas dasar kelompok dikurangi lagi dengan total pajak penghasilan dan beban pajak tangguhan sebesar -257.686 USD (2020: -832.628 USD)³³.

Catatan Singkat tentang Pemberian Izin Langsung dari Pemerintah kepada TIMOR GAP

TIMOR GAP, E.P., perusahaan minyak nasional Timor-Leste, diberikan izin eksplorasi hidrokarbon eksklusif untuk Blok Daratan (44/2015) oleh Resolusi Pemerintah 44/2017 pada bulan Desember 2015. Selanjutnya Blok wilayah darat dibagi menjadi 3 sub-blok (A, B & C), masing-masing dengan luas sekitar 1000km².

Karena sifat entitas, dianalisis Undang-Undang 13/2005, yang menjelaskan bahwa pemberian izin langsung dimungkinkan dan diizinkan oleh hukum. Menurut petroleum activities law 13/2005 tentang pasal 13 b):

"... Kementerian dapat memilih untuk memberikan Otorisasi melalui negosiasi langsung tanpa mengeluarkan undangan tersebut:

³³ Sumber: [Timor Gap 2021 Annual Report & Accounts](#)

³⁴ Sumber: [LAW No. 13 / 2005 ON PETROLEUM ACTIVITIES](#)

(i) dalam hal Otorisasi Akses; atau

(ii) dalam kasus semua jenis Otorisasi lainnya, di mana itu adalah kepentingan publik untuk melakukannya."³⁴

Dengan mempertimbangkan misi dan tujuan TIMOR GAP, E.P., sebagai perusahaan minyak nasional yang masih muda, Kementerian menganggap pemberian otorisasi ini diberikan untuk kepentingan publik nasional dan tonggak penting bagi TIMOR GAP, E.P. untuk berkembang sebagai perusahaan minyak dan gas.

Peran TIMOR GAP E.P. dalam eksplorasi wilayah darat adalah kunci untuk mencapai manfaat maksimal bagi Timor dan partisipasi maksimal warga negara Timor. Seperti yang dicatat dalam Program Pemerintah Konstitusional Keenam, operasi dan aktivitas perusahaan adalah "pusat strategi pengembangan industri perminyakan kami" dan menyediakan "jalan bagi Timor-Leste untuk memiliki saham bisnis langsung dan mendapatkan manfaat dari perluasan sektor ini."

Bertindak sesuai dengan petroleum activities law, Kementerian dengan ini memberikan kontrak minyak bumi ini melalui negosiasi langsung berdasarkan kepentingan publik kepada TIMOR GAP Onshore Block (untuk memungkinkan peningkatan pengetahuannya di sektor hulu dan meningkatkan pengalaman dan kemampuannya) didirikan dan diselenggarakan berdasarkan undang-undang Republik Demokratik Timor-Leste yang ada, dan TIMOR RESOURCES PTY LTD, sebuah perusahaan yang didirikan di Australia, dan kedua belah pihak secara kolektif disebut sebagai "Kontraktor" untuk production Sharing Contract (PSC) TL- OT-17-08, yang mencakup Kotamadya Covalima dan Bobonaro dan (PSC) TL-OT-17-09, yang mencakup Kotamadya Manufahi dan Ainaro.

Kerangka Regulasi Industri Ekstraktif pada tahun 2021

4.9 Pengungkapan Lisensi / Kontrak

ANPM bertanggung jawab atas pengungkapan publik kontrak dan lisensi yang memberikan ketentuan eksploitasi minyak, gas, dan mineral.

EITI Standard 2019 mengharuskan adanya pengungkapan terkait lisensi dan kontrak untuk memberikan informasi yang relevan kepada para pemangku kepentingan. Semua informasi terkait kontrak dan lisensi yang aktif tersedia di situs web ANPM³⁵.

Mengikuti persyaratan 2.2, Timor-Leste harus mengungkapkan:

- i. deskripsi proses untuk mentransfer atau memberikan lisensi;
- ii. Kriteria teknis dan keuangan yang digunakan;
- iii. Informasi tentang penerima lisensi yang telah ditransfer atau diberikan;
- iv. Penyimpangan material dari kerangka hukum dan peraturan yang berlaku yang mengatur transfer dan pemberian lisensi.

Selain itu, pemerintah harus mengungkapkan proses pemberian atau pengalihan lisensi dari suatu penawaran, dan aturan yang menentukan bagaimana para kandidat dipilih³⁶.

Oleh karena itu, ANP mengungkapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mengajukan permohonan lisensi atau penawaran, dan daftar lisensi dan kontrak di situs web berikut³⁷.

³⁵ Sumber: <http://www.anpm.tl/list-of-licenses-2006-2023/>

Sumber: <http://web.anpm.tl/webs/anptlweb.nsf/pgLafaekPSCList>

Sumber: <http://www.anpm.tl/timor-leste-eiti/>

Sektor Minyak dan Gas Timor-Leste pada umumnya diatur di bawah production sharing contract (PSC) yang ditandatangani antara perusahaan-perusahaan minyak dan gas dan ANP.

ANP diharapkan untuk mengungkapkan salinan kontrak dan informasi lain yang relevan tentang lisensi yang masih aktif. Selain tautan yang disebutkan di atas, Anda juga dapat, berdasarkan permintaan, meminta informasi lebih lanjut di situs mereka³⁸.

Catatan Lainnya

Selama proses pemberian lisensi, entitas harus memulai dengan mengajukan permohonan untuk mendapatkan lisensi. Setelah aplikasi, ANP melakukan analisis terperinci dari setiap entitas dalam daftar pemohon dan mereka yang berada dalam parameter, akan dapat melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu proses penawaran. Pada saat penawaran, penerima lisensi akan ditentukan. Rincian tentang keseluruhan proses dapat ditemukan di situs web ANP, termasuk sesi yang berlangsung selama putaran ini dan informasi tentang setiap penerima lisensi. Pada tab rilis media, Anda dapat menemukan beberapa dokumen tambahan yang dikeluarkan oleh ANP, dengan informasi terbaru tentang sektor ini.

³⁶ Sumber: EITI Standard 2019

³⁷ Sumber 1: <http://www.anpm.tl/category/annual-report/> Sumber 2: <http://www.anpm.tl/how-to-apply-for-the-downstream-activity-license/> Sumber 3: <http://www.anpm.tl/jpda2/> & <http://www.anpm.tl/tlea/>

³⁸ Sumber: <http://web.anpm.tl/webs/anptlweb.nsf/pgRequest>

Kerangka Regulasi Industri Ekstraktif pada tahun 2021

4.10 Perspektif Masyarakat Sipil

Selama periode 2021, tahun fiskal laporan EITI ini, organisasi masyarakat sipil di Timor-Leste (CSO) memiliki akses terbatas untuk menjalankan kegiatan mereka karena pembatasan COVID-19 yang diberlakukan oleh Pemerintah. Selain dampak COVID-19, hujan lebat di seluruh Timor-Leste dari 29 Maret hingga 4 April mengakibatkan banjir bandang dan tanah longsor di seluruh 13 kotamadya, dengan ibu kota Dili dan daerah dataran rendah di sekitarnya yang paling parah terkena dampak. Bencana tersebut memengaruhi lebih dari 31.000 rumah tangga, 82 persen di antaranya berada di kotamadya Dili. Bisnis terkena dampak buruk, dan pengangguran meningkat.³⁹

Sehubungan dengan persyaratan EITI 1.3, 1.5 dan 7.1, CSO telah secara aktif terlibat dalam proses konsultasi dengan Timor Resource P/L, serta berkoordinasi dengan otoritas pemerintah dan BUMN (TIMOR GAP, E.P.) tentang kegiatan di lapangan yang terlibat. Secara umum, dari topik-topik yang dibahas dalam rapat, CSO mendorong entitas-entitas tersebut untuk memberikan informasi yang jelas mengenai aspek lingkungan di balik operasional perusahaan serta tanggung jawab perusahaan dan lokal konten.

Berdasarkan referensi EITI di atas, CSO telah menjamin upaya untuk berkontribusi pada proses EITI yang transparan dan memastikan ambang batas materialitas yang substansial yang mendorong pengumpulan data dari entitas pelapor dari sektor pertambangan dan minyak dan gas di negara ini. Meskipun ambang batas yang disepakati secara substansial mencakup informasi yang direkonsiliasi dari minyak dan gas, CSO tetap mengkhawatirkan pendapatan dari industri pertambangan yang tidak dilaporkan karena jumlahnya di bawah batasan ambang batas. Dengan demikian, CSO akan terus mengadvokasi pencantuman cakupan kegiatan pertambangan secara rinci yang mencakup pendapatan pemerintah dari sektor pertambangan dengan menekankan pada anggaran negara.

³⁹ <https://matadalaninstitute.blogspot.com/>



Rezim Pajak

Menurut persyaratan 2.1 EITI Standard 2023, Timor-Leste harus mengungkapkan deskripsi rezim fiskal yang mengatur industri ekstraktif.

Sektor perminyakan Timor-Leste saat ini terdiri dari dua yurisdiksi berbeda dengan rezim hukum dan fiskal yang berbeda:

Wilayah rezim khusus Greater Sunrise – dikelola bersama oleh Australia dan Timor-Leste:

Yang tercakup dalam Perjanjian Batas Maritim tercakup dalam ladang Greater Sunrise;

Timor-Leste mengoperasikan sistem Production Sharing Contract (PSC). Operasi perminyakan di Wilayah rezim khusus Greater Sunrise dan yurisdiksi eksklusif Timor-Leste dilakukan menurut PSC yang disepakati antara Autoridade Nacional do Petróleo e Minerais (ANPM) yang juga dikenal sebagai Otoritas Tertunjuk berdasarkan Perjanjian Batas Maritim dan Kontraktor.

Selain itu, berdasarkan Perjanjian Batas Maritim, Timor-Leste telah menerima semua pendapatan minyak bumi dari Bayu-Undan sejak September 2019.

Pada tahun 2019, Undang-Undang baru mulai berlaku karena Resolusi 15/2019 tentang Pengesahan Perjanjian Batas Maritim. Menurut Undang-Undang 5/2019, ada perubahan pada legislasi pajak untuk bekas kontraktor JPDA. Sebagaimana yang disyaratkan berdasarkan Perjanjian Batas Maritim dan undang-undang fiskal baru, rezim khusus Greater Sunrise harus dirumuskan.

Bagian ini merangkum rezim fiskal untuk setiap yurisdiksi.

5

5. Rezim Pajak

5.1 TLEA – Wilayah Eksklusif Timor-Leste

MBT (Yurisdiksi Eksklusif Timor-Leste + bekas JPDA)

Rezim pajak yang berlaku untuk yurisdiksi eksklusif TLEA Timor-Leste adalah:

- Regulasi UNTAET No. 2000/18;
- Petroleum tax act No. 7/2005, digantikan oleh Taxes and Duties Act berdasarkan Dekrit hukum No. 8/2008, diubah dengan Undang-Undang No. 5/2019.

Untuk Bekas JPDA, selain Bayu Undan dan Greater Sunrise, ketentuan pajak berikut diberikan berdasarkan Undang-Undang No. 5/2019 tanggal 27 Agustus dan Amandemen Pertama Undang-Undang No. 8/2008 tanggal 30 Juni 2008, yang menyetujui tax and duties Act. Perubahan khusus yang diperkenalkan adalah:

- Pada SPT, tarif untuk Bekas JPDA dikurangi dari 22,5% menjadi 19,8% dan untuk Bekas yurisdiksi Australia dikurangi dari 22,5% menjadi 0%;
- Designated Service Tax dan withholding tax dikurangi sebesar 90% selama fase eksploitasi dan pengembangan. Pengurangan tarif ini tidak akan diterapkan sampai tanggal produksi pertama.
- Pembebasan custom duties untuk semua impor untuk operasi perminyakan di bekas Wilayah Kontrak JPDA dan hanya akan dikenakan custom duties ketika barang impor tersebut ditransfer secara permanen ke wilayah Timor-Leste selain dari Bekas Wilayah Kontrak JPDA.

Income Tax

Income tax berlaku untuk Kontraktor dengan tarif 30%.

Withholding Tax

Tarif 6% akan diterapkan pada Penghasilan Bruto Barang dan Jasa (WHT) untuk Subkontraktor dan pemasok lain yang menyediakan layanan dalam kegiatan perminyakan di TLEA.

Import Duty

Import Duty berlaku untuk barang yang diimpor ke Timor-Leste. Tarif import duty adalah 6%.

Abandonment provision

Untuk tujuan pajak, sejumlah, yang diizinkan oleh PSC dan disetujui oleh ANPM, dari cadangan untuk pendanaan abandonment dapat diklaim untuk pengurangan pajak, untuk menghitung income tax.

Wages Income TAX

Karyawan yang menyediakan layanan sehubungan dengan kegiatan perminyakan di TLEA dikenakan Wages Income Tax (WIT) di Timor-Leste atas remunerasi mereka.

Tarif WIT Timor-Leste yang berlaku bagi karyawan yang merupakan residen Timor-Leste adalah 10% (di bawah USD 550) dan 30% x jumlah upah (di atas USD 550) atas Penghasilan kotor gaji karyawan residen atau remunerasi serupa.

Kredit pajak bulanan sebesar USD 10 juga berlaku bagi karyawan residen yang merupakan orang pribadi.

Dalam kasus karyawan yang non-residen, tarif WIT tetap adalah 20% dari remunerasi.

Rezim Pajak

5.1 TLEA – Wilayah Eksklusif Timor-Leste

MBT (Yurisdiksi Eksklusif Timor-Leste + bekas JPDA) - lanjutan

Supplemental Petroleum TAX (SPT)

Kontraktor TLEA juga dikenakan SPT (SPT adalah pajak tambahan di Timor-Leste yang dibayarkan oleh kontraktor atas keuntungan hulu) dan akan dikenakan terhadap kontraktor yang memiliki jumlah penerimaan bersih yang terakumulasi positif untuk operasi minyak bumi tahun itu yang dihitung menurut rumus berikut:

$$\text{ANR} \times 19,8\% \times (1-r), \text{ and } \text{ANR} = ((A \times 116.50\%) - (I \times (1-r))) + B$$

Dimana:

ANR - akumulasi penerimaan bersih kontraktor;

r – Pajak penghasilan (saat ini 30%)

A - Akumulasi penerimaan bersih dari tahun-tahun sebelumnya;

B – Penerimaan bersih untuk tahun berjalan

I – Beban bunga

Rezim Pajak

5.2 Bekas JPDA – Ladang Bayu-Undan & Greater Sunrise

Rezim yang berlaku untuk kedua bidang ini adalah sebagai berikut:

Bayu-Undan:

- Regulasi UNTAET No. 18/2000
- Timor Sea Treaty digantikan oleh Perjanjian Batas Maritim setelah 30 Agustus 2019
- UU 5/2019 (mengubah UU 3/2003 dan 4/2003) setelah 30 Agustus 2019

Greater Sunrise:

- Regulasi UNTAET No. 1/1999 pada tanggal 25 Oktober 1999
- Timor Sea Treaty digantikan oleh Perjanjian Batas Maritim setelah tanggal 30 Agustus 2019
- Income Tax Law pada tanggal 25 Oktober 1999
- Regulasi UNTAET No. 18/2000

Bekas JPDA - Rezim pajak ladang Bayu-Undan

Lapangan Bayu-Undan (mencakup PSC TL-SO-T 19-12 dan TL-SO-T 19-13 (bekas JPDA 03-12 dan 03-13 pra-MBT) berada di Bekas JPDA dan karenanya diatur oleh Timor Sea Treaty (TST) hingga 30 Agustus 2019, di mana secara hukum menjadi bagian dari wilayah Timor-Leste MBT. Undang-undang perpajakan umum (disebut sebagai Law on Income Tax - Indonesian tax laws pada tanggal 25 Oktober 1999) telah mengalami modifikasi lebih lanjut sebagai akibat dari ToBuca dan Undang-Undang tentang Pengembangan Perminyakan Laut Timor (Tax Stability Act) diploma yang diamandemen oleh Undang-Undang 5/2019 setelah Resolusi 15/2019. Undang-undang baru memformalkan transisi kondisi fiskal sebelumnya ke perjanjian baru.

Income Tax

- Corporate Income Tax kepada Kontraktor dengan tarif tetap 30% atas Penghasilan Kena Pajak Tahunan;
- Corporate Income Tax kepada Subkontraktor mengikuti tarif pajak progresif: 10%, 15% dan 30% atas Penghasilan Kena Pajak Tahunan.

Abandonment provision

Untuk keperluan pajak, sejumlah dana cadangan untuk pendanaan abandonment, yang diizinkan oleh PCS dan disetujui oleh ANPM, dapat diklaim untuk pengurangan pajak, guna menghitung income tax. Pengurangan yang diizinkan untuk keperluan APT didasarkan pada biaya abandonment yang dikeluarkan dan dikurangi dengan proporsi Timor-Leste yang dibagi berdasarkan TST sebesar 90%.

Withholding tax

Terdapat beberapa tarif yang akan diterapkan terhadap Penghasilan Bruto Barang dan Jasa (WHT) bagi Subkontraktor dan pemasok lain yang menyediakan jasa dalam kegiatan perminyakan di JPDA sebagaimana disebutkan dalam pasal 8 UU 3/2003 yang telah direvisi. Tarif WTT yang berlaku bervariasi tergantung pada jenis jasa (yaitu jasa pengeboran (rig); jasa konstruksi; jasa teknis, manajemen, hukum, dan akuntansi, royalti, dan lain-lain). Lihat pasal 8 pada UU 5/2019.

VAT

PPN dengan tarif 9% dikenakan pada "taxable services" yang diberikan di JPDA dari jasa yang diberikan atau sewa barang oleh perusahaan pemasok (yaitu, Subkontraktor).

Additional Profit TAX (APT)

Kontraktor Bayu-Undan juga dikenakan APT (APT juga merupakan pajak tambahan di Timor-Leste yang dibayarkan oleh kontraktor atas keuntungan hulu) dan akan dikenakan terhadap kontraktor yang memiliki jumlah penerimaan bersih akumulasi positif untuk operasi perminyakan tahun itu yang dihitung menurut rumus berikut:

$ANR \times 21.50\% \times (1-r)$, and $ANR = ((A \times 116.50\%) - (I \times (1-r))) + B$

Dimana:

ANR - akumulasi penerimaan bersih kontraktor;

r – Pajak penghasilan (saat ini 30%)

A – Akumulasi penerimaan bersih dari tahun-tahun sebelumnya;

B – Penerimaan bersih untuk tahun berjalan

I – Beban bunga

Wages Income Tax

Karyawan yang menyediakan layanan terkait kegiatan perminyakan di Lampiran E JPDA dikenakan Wages Income Tax (WIT) di Timor-Leste atas remunerasi mereka. Tarif WIT Timor-Leste yang berlaku bagi karyawan yang merupakan residen Timor-Leste adalah 10%, 15%, dan 30% atas Penghasilan kotor dari gaji karyawan residen atau remunerasi serupa.

Misalnya, dalam kasus karyawan yang non-residen, tarif WIT tetap adalah $20\% \times 90\% = 18\%$ dari remunerasi.

Bekas rezim pajak JPDA - Ladang Greater Sunrise

Lapangan Greater Sunrise (meliputi PSC JPDA 03-19 dan 03-20) sebagian terletak di dalam MBT (di bekas JPDA) dan sebagian lagi di luar dan di bawah yurisdiksi eksklusif Australia.

Rezim pajak setelah 30 Agustus 2019 diatur sesuai dengan Lampiran B dari MBT.

Perbedaan utama antara rezim pajak ladang Bayu-Undan dan rezim

pajak ladang Greater Sunrise adalah kenyataan bahwa pembagian hasil produksi ketentuannya adalah 30% untuk Timor dan 70% untuk Australia jika jaringan pipa yang dikembangkan terhubung ke Australia, 70% untuk Timor dan 30% untuk Australia jika jaringan pipa yang dikembangkan terhubung ke Timor-Leste, Branch profits tax sebagai pengganti Additional Profit Tax.

Income Tax

- Income Tax Law adalah tarif tetap 30% atas penghasilan kena pajak untuk Kontraktor;
- Corporate Income Tax untuk subkontraktor mengikuti tarif progresif: 10%, 15% dan 30% atas Penghasilan kena pajak.

VAT

PPN sebesar 9% dikenakan pada "taxable services" yang diberikan di JPDA dari jasa yang diberikan atau sewa barang oleh perusahaan pemasok (yaitu Subkontraktor).

Branch Profits Tax (BPT)

Kontraktor Greater Sunrise dikenakan BPT sebesar 20% atas 90% dari 20,1% keuntungannya setelah pajak. Berdasarkan TST, BPT sebesar 20% dikurangi menjadi 15% apabila perusahaan tersebut merupakan residen Australia atau Timor-Leste.

Withholding tax

Ada beberapa tarif yang akan diterapkan pada Penghasilan Bruto Barang dan Jasa (WHT) untuk Subkontraktor dan pemasok lain yang menyediakan layanan dalam kegiatan perminyakan di JPDA dan rezim khusus Greater Sunrise di masa mendatang.

Wages Income Tax

Karyawan yang menyediakan layanan dalam kaitannya dengan kegiatan perminyakan dikenakan pajak penghasilan upah (WIT) di Timor-Leste atas remunerasi mereka.

Karyawan yang menyediakan layanan dalam kaitannya dengan kegiatan perminyakan dikenakan pajak penghasilan upah (WIT) di Timor-Leste atas remunerasi mereka.

Jika seorang karyawan non-residen, maka tarif WIT tetap adalah $20\% \times 90\% = 18\%$ dari remunerasi, berdasarkan Regulasi UNTAET No. 1999/1, 25 Oktober

Bekas JPDA - Selain Ladang Bayu Undan dan Greater Sunrise

Rezim pajak yang berlaku untuk operasi perminyakan yang dilakukan di bekas JPDA, selain Bayu Undan dan Greater Sunrise, juga dikenakan basis 90% karena adanya TST.

Rezim pajak di bidang lain bekas JPDA:

- Timor Sea Treaty
- Regulasi UNTAET No. 2000/18
- Petroleum Tax Act No. 7/2005, digantikan oleh Taxes and Duties Act berdasarkan Dekrit hukum Perubahan No. 8/2008
- Income Tax Law

Wages Income Tax

Karyawan yang menyediakan layanan terkait kegiatan perminyakan di bekas JPDA dikenakan WIT di Timor-Leste atas remunerasi mereka.

Tarif WIT Timor-Leste yang berlaku bagi karyawan yang merupakan residen Timor-Leste adalah 10%, 15%, dan 30% atas Penghasilan kotor dari gaji karyawan residen atau remunerasi serupa.

Misalnya saja, dalam kasus seorang pegawai yang bukan penduduk tetap

Income tax

- Pajak penghasilan dikenakan kepada Kontraktor dengan tarif 30%;
- Subkontraktor atau semua penyedia layanan dikenakan pemotongan final sebesar 6%.

Withholding tax

Tarif sebesar 5,4% akan diterapkan pada Penghasilan Bruto Barang dan Jasa (PPN) bagi Subkontraktor dan pemasok lain yang menyediakan jasa dalam kegiatan perminyakan di JPDA.

Tarif PPN yang berlaku bervariasi tergantung pada jenis jasa (misalnya, jasa pengeboran (rig); jasa konstruksi; jasa teknis, manajemen, hukum, dan akuntansi, royalti, dan lain-lain).

Tarif PPN tetap adalah $20\% \times 90\% = 18\%$ dari remunerasi.

Abandonment provision

Untuk keperluan pajak, sejumlah cadangan untuk penghentian pendanaan, yang diizinkan oleh PCS dan disetujui oleh ANPM, dapat diklaim untuk pengurangan pajak, guna menghitung pajak penghasilan. Pengurangan ini dikurangi dengan proporsi Timor-Leste yang dibagi berdasarkan TST sebesar 90%.



Gambaran Umum Industri Ekstraktif Timor-Leste Pada Tahun 2021 -Pertambangan

6

Timor-Leste telah (melalui keputusan menteri) membedakan definisi pertambangan skala kecil, menengah, dan besar. Pertambangan skala kecil tidak dipertimbangkan dalam definisi karena aktivitas aktual (produksi dan biaya yang dikumpulkan) merupakan porsi yang kecil, dibandingkan dengan sektor Minyak & Gas dan bahkan dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya.

Selain itu, pertambangan skala kecil mengacu pada pertambangan manual murni dengan penggunaan maksimum 60 ton/bulan bahan bangunan.

According to the available data, the mining sector in Timor-Leste is the artisanal small scale and the decision was to use EITI standard guidance (according with volume / activity) and disclose the information available about the sector with some additional information about revenue (licensing revenue).

6. Gambaran Umum Industri Ekstraktif Timor-Leste Pada Tahun 2021 -Pertambangan

6.1 TLEA – Wilayah Eksklusif Timor-Leste

ANM (sebelumnya dikenal sebagai ANPM) bertanggung jawab untuk mengelola dan mengatur sektor mineral di wilayah Timor-Leste sesuai dengan Dekrit hukum tentang pembentukan ANM, Undang-Undang No. 12/2021 tanggal 30 Juni, tentang mining code.

Mengenai peraturan tentang pertambangan, pada tahun 2008, pemerintah menyetujui keputusan menteri No. 1/2008 tanggal 30 Juli, tentang aturan khusus untuk perizinan kegiatan ekstraksi massa mineral (tambang dan penggalian) dan penambangannya dalam skala industri. Keputusan menteri ini telah diamandemen dua kali:

- Keputusan Menteri 1/2009, tanggal 12 Agustus 2009;
- Keputusan Menteri 2/2014, tanggal 19 Februari 2014.

Amandemen ke-1 memperkenalkan larangan ekstraksi pasir pantai untuk memulihkan lanskap maritim atau pesisir dan menciptakan kondisi untuk penciptaan infrastruktur guna meningkatkan penggunaan area tersebut, sebagai manfaat langsung bagi penduduk dan untuk memungkinkan pengembangan sektor pariwisata.

Amandemen ke-2 memperkenalkan formulir untuk tujuan perizinan, yang mencakup kegiatan ekstraksi mineral skala menengah dan besar.

Keputusan menteri no. 1/2008 tidak berlaku lagi karena telah dicabut oleh Keputusan Menteri No. 64/2016 tanggal 16 November.

Keputusan Menteri yang baru menyempurnakan persyaratan perizinan dan memperkenalkan prinsip-prinsip yang lebih selaras dengan rancangan Undang-Undang Pertambangan.

Legislasi yang berlaku⁴⁰:

⁴⁰ Sumber: <http://www.mj.gov.tl/jornal/?q=node/4914>
Sumber: <http://www.anpm.tl/mineral/>

- Keputusan Menteri Nomor 64/2016 tanggal 16 November;
- Undang-Undang No. 12/2021 tanggal 30 Juni tentang Mining Code;
- Dekrit hukum No. 5/2011 tentang Perizinan Lingkungan;
- Keputusan Menteri No. 27/2022 tanggal 26 Oktober 2022;
- Keputusan Menteri No. 55/2022 tanggal 16 November 2022

Keputusan Menteri No. 64/2016 tanggal 16 November

Keputusan Menteri Timor-Leste No. 64/2016 tanggal 16 November menjelaskan perlunya perbaikan lebih lanjut terhadap Administrasi perizinan, kewajiban umum pemegang izin, klasifikasi kegiatan dan penilaian biaya terkait, peningkatan persyaratan teknis untuk evaluasi, perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan, inspeksi, audit dan pelaporan kegiatan pertambangan.

Keputusan ini mempromosikan partisipasi koperasi atau perusahaan Timor-Leste yang didirikan berdasarkan Hukum Timor-Leste dalam penelitian dan eksplorasi yang terkait dengan bahan konstruksi dengan kepentingan partisipasi minimum lebih dari 50% yang dimiliki dan dikendalikan oleh orang Timor-Leste.

Izin yang diberikan oleh ANPM seperti Izin Prospeksi, Izin Eksplorasi dan Izin Pertambangan, kecuali untuk batu dimensi dan batu hias, semua izin mempunyai durasi satu (1) tahun, kecuali dalam surat keputusan persetujuan masing-masing menentukan lain.

Gambaran Umum Industri Ekstraktif Timor-Leste Pada Tahun 2021 -Pertambangan

6.1 TLEA – Wilayah Eksklusif Timor-Leste

Keputusan Menteri No. 64/2016 tanggal 16 November - lanjutan

Keputusan Menteri tersebut menjelaskan, sejalan dengan konstitusi negara, bahwa semua sumber daya mineral di tanah publik dan swasta di wilayah Timor-Leste dianggap milik publik negara, dan bahwa negara dapat memperoleh, termasuk melalui pengambilalihan, tanah swasta tempat sumber daya tersebut berada atau ditemukan.

Undang-Undang No. 12/2021, Tanggal 30 Juni, Mining Code

Pada tanggal 30 Juni 2021, Undang-Undang No. 12/2021 diterbitkan, yang menyetujui Mining code untuk wilayah Timor-Leste. Pemerintah bertujuan untuk:

- Memberikan pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan bagi negara;
- Menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan taraf hidup masyarakat yang tinggal di wilayah pertambangan;
- Melindungi lingkungan dengan meminimalkan dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh kegiatan geologi dan pertambangan terhadap lingkungan, serta pemulihan lingkungan;
- Menjamin pengembangan sumber daya manusia nasional, khususnya melalui program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang bekerja sama antara sektor publik dan swasta;
- Menjamin mainstreaming gender dan memerangi praktik diskriminasi dalam industri ini;
- Menjamin penerimaan pajak bagi negara;
- Mencegah praktik pertambangan ilegal;
- Menetapkan rezim pemberian hak pertambangan yang efisien dan transparan;
- Mendorong penanaman modal kembali di negara ini;

- Mempromosikan penggunaan sumber daya mineral nasional.

Mining code telah disetujui oleh Parlemen dan diumumkan oleh Presiden Republik Demokratik Timor-Leste pada tahun yang sama dengan Undang-Undang No. 12/2021 tanggal 30 Juni 2021. Meskipun Undang-Undang tersebut akan mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021 (dalam jangka waktu 180 hari setelah tanggal Publikasinya tanggal 30 Juni 2021), Dekrit hukum tentang regulasi Mining code atau undang-undang tambahan dan regulasi untuk mengoperasikan Mining code belum diformalkan dan karenanya, dekrit hukum yang baru belum berlaku.

Sebelum Mining code mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022, semua kegiatan pertambangan diatur oleh Keputusan Menteri yang lama.

Pada tanggal 8 Juni 2022, Dekrit Hukum Nomor 43/2022 diterbitkan, yang menetapkan konstitusi perusahaan pertambangan nasional, yang disebut Companhia Mineira de Timor-Leste, S.A.

CMTL, S.A., sebuah perusahaan terbatas publik yang sepenuhnya dimiliki oleh Negara, bertujuan untuk partisipasi yang setara di sektor pertambangan. Diatur oleh undang-undang dari Pemerintah, perusahaan ini berfokus pada distribusi kekuasaan yang seimbang. Tujuan utama perusahaan adalah untuk terlibat dalam berbagai kegiatan pertambangan, termasuk eksplorasi, eksploitasi, dan komersialisasi, sambil juga menawarkan layanan dan konsultasi pelengkap di sektor ini.

Gambaran Umum Industri Ekstraktif Timor-Leste Pada Tahun 2021 -Pertambangan

6.2 Proses perizinan

Peraturan perundang-undangan yang berlaku: Keputusan Menteri No.64/2016 tanggal 16 November

1. Biaya dan Klasifikasi

Biaya dan Klasifikasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Tahun 2016 berlaku sesuai dengan keputusan menteri No. 2/2014 tanggal 19 Februari mulai berlaku bulan Januari sampai dengan bulan November 2016 dan keputusan menteri No. 64/2016 tanggal 16 November mulai berlaku bulan Desember 2016 sampai dengan sekarang.

Klasifikasi biaya lisensi skala kecil, menengah, dan besar seperti yang diilustrasikan di bawah ini.



Biaya Lisensi – pasal. 7

Biaya lisensi yang diterapkan untuk berbagai kegiatan seperti klasifikasi di atas adalah sebagai berikut:

Licensing fees for new/extension requests according to article 7

Activity	Fee (USD)
No tax Artisanal	0
Prospecting	500
Exploration	1.500
Mining/Extraction (Medium scale)	500
Mining/Extraction (large scale)	1.500

Biaya Pertambangan/Ekstraksi – Pasal 8

Biaya eksplorasi pertambangan berdasarkan klasifikasi ton yang ditambang adalah sebagai berikut:

Jornal da República

	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (em USD/ton exploradas)		MATERIAIS DE TRANSFORMAÇÃO (em USD/ton exploradas)			ROCHAS ORNAMENTAIS (em USD/ton exploradas)	
	Outros 716cm	Areia (dimensão =16cm)	Calcário	Argila	Gesso	Calcário, Onix e Mármore	Outros previstos no artigo 23
Artisanal	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Escala Média							
Grande Escala	1.00	1.00	0.75	0.50	0.75	8.00	7.00

2. Perizinan

Ruang lingkup perizinan meliputi perizinan penelitian ilmiah, perizinan eksplorasi, dan perizinan pertambangan (Pasal 12 dan 13 keputusan menteri 64/2016 tanggal 16 November). Persyaratan perizinan harus diterapkan sebagai berikut:



Gambaran Umum Industri Ekstraktif Timor-Leste Pada Tahun 2021-Pertambangan

6.3 Legislasi lingkungan

Dekret hukum No. 5/2011

Mengingat persyaratan baru, 6.4, dari EITI Standard 2019, penting untuk menganalisis posisi Timor-Leste terkait Legislasi lingkungan.

Dekrit Hukum No.5/2011 diterbitkan untuk mengungkapkan penciptaan perizinan lingkungan untuk mencegah dampak negatif terhadap lingkungan alih-alih memerangi dampaknya di kemudian hari.

Undang-undang ini menetapkan Sistem Perizinan Lingkungan yang dipahami sebagai sistem tambahan untuk menanggapi kebutuhan untuk mencegah dampak lingkungan negatif yang diakibatkan oleh proyek-proyek yang kompleks dan memenuhi realitas sosial dan ekonomi Timor-Leste. Lebih jauh, sistem ini membayangkan pemberian izin lingkungan dan pemantauannya sebagai konsekuensi logis dari proses penilaian lingkungan terhadap proyek-proyek, sehingga menciptakan proses terpadu dan prosedur yang disederhanakan untuk mencegah dampak lingkungan negatif dan mengendalikan polusi dari proyek-proyek.

Selain itu, EITI Standard 2019 mengharuskan pembayaran lingkungan diungkapkan.

Dekret hukum No. 26/2012

Dekret hukum No. 26/2012 tentang Lingkungan mengatur tentang asas-asas kebijakan lingkungan, pedoman untuk pelestarian dan perlindungan lingkungan, serta pelestarian dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Terkait dengan industri ekstraktif, undang-undang ini menjelaskan beberapa langkah yang dapat meminimalkan dampak langsung kegiatan industri ekstraktif terhadap lingkungan.

Gambaran Umum Industri Ekstraktif Timor-Leste Pada Tahun 2021-Pertambangan

6.4 Aktivitas Pertambangan di Timor-Leste

Jumlah Lisensi

Dari tahun 2006 hingga 2022, jumlah izin yang dicatat oleh ANPM berfluktuasi. Terjadi peningkatan yang signifikan pada tahun 2015 dan 2016 dibandingkan dengan tahun-tahun berikutnya. Hal ini dibenarkan oleh diperkenalkannya amandemen ke-2 dan peraturan baru yang membuat penyesuaian dalam proses aplikasi perizinan menjadi lebih mudah dan terarah. Lihat rincian lebih lanjut tentang perizinan di Lampiran E.

Sumber: <http://www.anpm.tl/list-of-licenses-2006-2023/>

Pendapatan

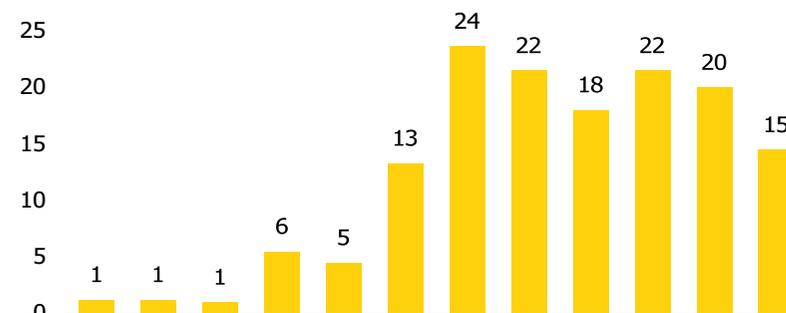
Sejak tahun 2014, pendapatan yang diperoleh dari ekstraksi dan biaya lisensi di sektor mineral telah berkembang sebagaimana ditunjukkan dalam grafik berikut. Hal ini terutama dibenarkan oleh Legislasi dan beberapa kontrol yang diterapkan oleh Kementerian Perminyakan dan Mineral, dengan penurunan tahun 2021 dipengaruhi oleh pandemi.

Pada tahun 2021, total penerimaan mineral yang dihimpun ANPM lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, dari USD 2.815.329 pada tahun 2020 menjadi USD 1.973.877. penerimaan pada tahun 2021 menurun terutama dari penerimaan iuran pertambangan yang turun dari USD 2.267.129 pada tahun 2020 menjadi USD 1.669.916. Pada tahun 2021, iuran perizinan dan ganti rugi kegiatan tidak berizin masing-masing menurun sebesar USD 5.500 dan USD 233.268.

Sumber: [Statement of petroleum revenue receipt and payments for the year ended 31 December 2021](#)

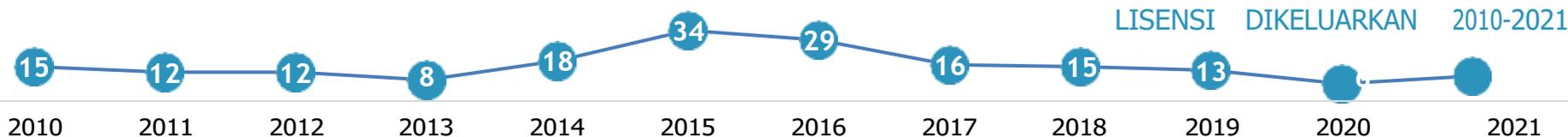
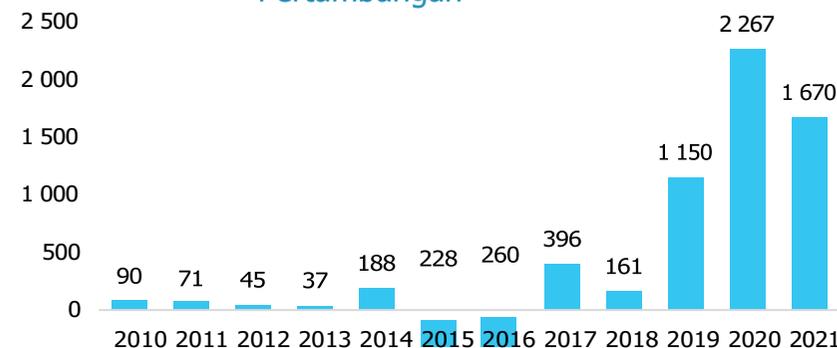
Ribuan dollars

Biaya Lisensi



Ribuan dollars

Biaya Pertambangan

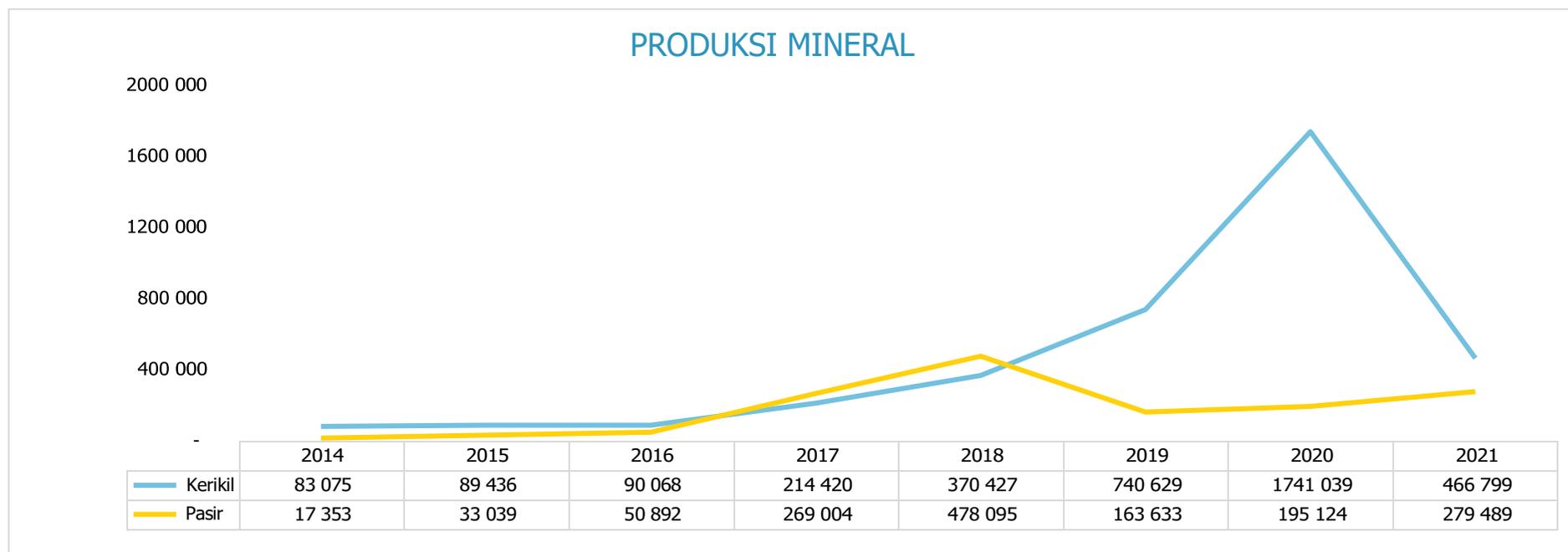


Gambaran Umum Industri Ekstraktif Timor-Leste Pada Tahun 2021-Pertambangan

6.4 Aktivitas Pertambangan di Timor-Leste

Produksi

Produksi material konstruksi tahun 2021 yang berhasil ditambang adalah sebesar 746.288,91 ton, terdiri dari kerikil sebanyak 466.799,44 ton dan pasir sebanyak 279.489,47 ton. Jumlah produksi material konstruksi tahun 2021 mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan produksi tahun 2020 akibat situasi COVID-19 dan kebijakan pembatasan sosial yang ditetapkan oleh Pemerintah⁴¹.



⁴¹ Sumber: [ANPM ANNUAL REPORT 2021](#)

Gambaran Umum Industri Ekstraktif Timor-Leste Pada Tahun 2021-Pertambangan

6.4 Aktivitas Pertambangan di Timor-Leste

Ruang lingkup Pertambangan artisanal dan skala kecil (ASM)

Menurut Persyaratan EITI 6.3, laporan EITI diharapkan mencakup "estimasi aktivitas sektor informal, termasuk tetapi tidak terbatas pada pertambangan skala kecil dan artisanal." dalam informasi yang terkait dengan kontribusi industri ekstraktif terhadap perekonomian untuk tahun fiskal yang dicakup.

Dalam fase penentuan ruang lingkup, MSWG harus mengevaluasi apakah operasi pertambangan formal atau informal dengan bentuk eksplorasi, ekstraksi, pemrosesan, dan transportasi yang sebagian besar disederhanakan harus atau tidak boleh dimasukkan dalam laporan EITI. Namun, masih merupakan sektor informal yang khas dengan kesenjangan data (statistik produksi yang dipisahkan berdasarkan lokasi tambang dan mineral, dan yang dikumpulkan di tingkat nasional) dan aliran pendapatan formal (yang berasal dari izin perizinan dan biaya produksi di lokasi tambang).

Timor-Leste telah (melalui keputusan menteri) membedakan antara definisi artisanal, menengah, dan besar. Pertambangan skala kecil tidak dipertimbangkan dalam definisi karena aktivitas aktual (produksi dan biaya yang dikumpulkan) sangat minim, dibandingkan dengan sektor Minyak & Gas dan bahkan sektor ekonomi lainnya.

Selain itu, artisanal mengacu pada pertambangan manual murni dengan penggunaan maksimum 60 ton / bulan bahan konstruksi. Untuk menentukan klasifikasi apakah itu artisanal atau tidak juga harus mempertimbangkan:

- Apabila kegiatan tersebut dilakukan dengan cara pertambangan manual murni tanpa didukung dengan mesin-mesin yang terbaru untuk mendukung kegiatan tersebut (artisanal)

- Apabila metode ekstraksi menggunakan mesin-mesin terbaru seperti traktor dan excavator, maka meskipun diketahui jumlahnya kurang dari 60 ton/bulan, tetap harus ada perizinan dan biaya pembayaran

MSWG perlu mempertimbangkan masalah proporsionalitas, yaitu seberapa banyak upaya, waktu, dan sumber daya yang sesuai untuk jumlah informasi yang akan digunakan. Pengumpulan data dapat memiliki implikasi biaya yang signifikan sehingga diasumsikan bahwa tahap penentuan ruang lingkup akan bergantung pada informasi primer atau sekunder yang tersedia di Timor-Leste. Dengan informasi yang tersedia pada tahap penentuan ruang lingkup ini, kami telah memverifikasi bahwa pendapatan pertambangan masih tidak material seperti yang dijelaskan di bawah ini (dan juga lihat pertimbangan ambang batas dan material).

Pilihan yang direkomendasikan untuk ASM/skala kecil yang berlaku untuk pelaporan Timor-Leste adalah:

Opsi 1 - Memberikan gambaran umum sektor ASM;

Opsi 2 – Memberikan gambaran umum aktivitas ASM, produksi dan data ekspor;

Opsi 3 – Memberikan gambaran umum aktivitas ASM, produksi, ekspor, dan data pendapatan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kelompok MSWG sepakat bahwa sektor pertambangan di Timor-Leste adalah ASM/skala kecil dan Opsi 3 masih merupakan yang paling tepat, dengan mempertimbangkan informasi yang tersedia seperti gambaran umum sektor pertambangan, kerangka hukum, data bahan bangunan yang diekstraksi selama periode pelaporan, dengan beberapa informasi tambahan tentang pendapatan (pendapatan perizinan).



7 Metodologi dan pendekatan

EY dilibatkan untuk melakukan studi pelingkupan untuk menetapkan ruang lingkup rekonsiliasi EITI yang digunakan untuk Laporan Timor-Leste EITI ke-15. Penugasan ini merupakan langkah awal untuk melakukan proses rekonsiliasi

Tujuan dari studi ruang lingkup adalah untuk mendefinisikan dengan jelas ruang lingkup latihan rekonsiliasi EITI, templat pelaporan, proses pengumpulan data, dan jadwal kerja, sesuai dengan Persyaratan EITI (EITI Standard 2023). Penilaian ini juga memungkinkan remediasi rekomendasi dari laporan EITI sebelumnya dan mempertimbangkan beberapa rekomendasi dari sekretariat Internasional yang dibahas dalam Validasi Timor-Leste terakhir.

7. Metodologi dan pendekatan

7.1 Ruang Lingkup dan AI

Administrator Independen

Sebagai Administrator Independen, EY melakukan tugas-tugas berikut selama evaluasi teknis-ekonomi:

- Mengidentifikasi perusahaan, BUMN dan lembaga yang harus berada dalam lingkup sesuai dengan persyaratan 4.1 EITI standard.
- Mengidentifikasi dan mencantumkan perusahaan minyak dan gas (industri ekstraktif) dan industri pertambangan Timor-Leste yang telah melakukan pembayaran substansial kepada Negara dan harus berada dalam ruang lingkup pelaporan sesuai dengan persyaratan 4.1 (c) EITI standard.
- Mengidentifikasi dan mencantumkan badan-badan pemerintah yang menerima pembayaran substansial dari perusahaan minyak dan gas serta industri pertambangan Timor-Leste yang harus berada dalam lingkup pelaporan sesuai dengan persyaratan 4.1 (c) EITI standard.
- Mengidentifikasi hambatan legislatif, peraturan, administratif, atau praktis untuk pengungkapan penuh dari total pendapatan yang diperoleh dari setiap aliran manfaat yang disepakati dalam volume yang diperlukan untuk laporan EITI, termasuk pendapatan yang berada di bawah ambang batas yang disepakati, signifikan bagi templat pelaporan, sesuai dengan persyaratan 4.1 (d) EITI standard.
- Memberi saran kepada MSWG tentang cara menentukan tingkat pemisahan yang akan diterapkan pada data yang akan diterbitkan.
- Mengidentifikasi prosedur audit dan melakukan prosedur

konfirmasi dalam perusahaan dan lembaga publik yang terlibat dalam penyusunan laporan EITI, untuk mengkonfirmasi kepatuhan terhadap persyaratan 4.9 (a) EITI Standard.

Ini mencakup kajian terhadap undang-undang dan peraturan internal yang relevan, setiap inisiatif untuk reformasi atau yang sedang diperkenalkan, dan apakah prosedur ini memenuhi standar internasional

Terakhir, EY telah mengeluarkan draf laporan yang menjadi dasar analisis yang dilakukan pada tahap awal (laporan studi pelingkupan) yang diserahkan dan disetujui untuk diadopsi oleh MSWG.

Lingkup Pekerjaan

Cakupan laporan ke-14 adalah tahun fiskal 2021. Ambang batas materialitas yang ditetapkan oleh MSWG mencakup semua aliran pendapatan di atas 100.000 USD dan perusahaan yang telah melakukan pembayaran (ke aliran pendapatan material) di atas jumlah yang sama pada tahun 2021. Ambang batas ini memungkinkan untuk memperoleh sekitar 99% dari pendapatan yang diterima oleh Pemerintah dari kegiatan perminyakan pada tahun 2021.

Selain itu, hal-hal berikut dipertimbangkan:

- Pajak nasional yang dibayarkan kepada DNRPM untuk mencantumkan dalam proses EITI, dan karenanya, semua bukan pajak yang dibayarkan kepada ANPM atau kepada Dana.
- Semua aliran pendapatan dari TL (DNRPM, ANPM dan PF) menjadi dasar untuk perhitungan aliran material yang relevan dengan laporan EITI.

- Informasi tersebut direkonsiliasi (tetapi tidak divalidasi – ini hanya akan dilakukan dalam fase rekonsiliasi) dengan informasi piutang yang dinyatakan pada Laporan Keuangan akhir tahun audit petroleum fund yang dianggap sebagai total piutang dalam ruang lingkup).
- Jumlah/% yang dipertimbangkan adalah gabungan jumlah aliran pendapatan/jumlah entitas untuk menjamin bahwa laporan akan mencakup lebih dari 99% piutang. Angka ini dapat dicapai karena ukuran dan konsentrasi sektor ini hanya beberapa pemain
- Data pembayaran sosial wajib belum dikumpulkan oleh Pemerintah di seluruh industri. Biaya ini cukup besar bagi perusahaan. Oleh karena itu, akan berguna bagi EITI untuk menjadi mekanisme untuk memungkinkan industri dan pemerintah mengumpulkan data ini secara tahunan, dan sistematis.

Berdasarkan informasi yang diterima dari instansi pemerintah maupun informasi dari sumber terbuka mengenai penerimaan pembayaran pajak dan bukan pajak pada tahun 2021, dasar untuk menentukan ruang lingkup laporan telah terpenuhi.

Sejak tahun lalu, IA telah berupaya untuk meningkatkan data Beneficial ownership dan PEP yang diungkapkan dalam laporan, karena keterbatasan negara dalam hal penyediaan data ini untuk publik. Untuk melakukan ini, IA telah berupaya mendorong kontraktor dan subkontraktor untuk memberikan informasi mengenai kedua topik ini. Pada tahun 2021, selain menerima informasi dari kontraktor, kami menerima informasi dari dua subkontraktor yang memberikan data menggunakan templat EITI. Untuk detail lebih lanjut tentang status data yang dikumpulkan terkait BO dan PEP, silakan lihat Bagian 9.1.

Metodologi dan pendekatan

7.2 Ambang batas materialitas untuk pengungkapan perusahaan

Materialitas

EITI Standard mendefinisikan materialitas sebagai berikut: "Pembayaran dan pendapatan dianggap material jika kelalaian atau kesalahan penyajiannya dapat secara signifikan memengaruhi kelengkapan Laporan EITI." Berbagai cara dapat digunakan untuk mendefinisikan materialitas untuk Laporan 2020. MSWG telah mendefinisikan materialitas dalam hal nilai minimum pembayaran kepada pemerintah (100.000 USD).

Sektor

Pada tahun 2021, Timor-Leste menghasilkan total pendapatan sebesar USD 731 juta termasuk pendapatan mineral. Namun, USD 2 juta berasal dari perusahaan pertambangan, penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Meskipun beberapa perusahaan pertambangan melampaui ambang batas materialitas USD 100.000, kontribusi gabungan mereka hanya 0,27% dari total pendapatan, yang menunjukkan dampak yang relatif kecil pada keseluruhan pendapatan untuk tahun itu. Mempertimbangkan upaya, waktu, dan biaya yang terkait dengan pengumpulan data dari sektor ini, pengembalian yang rendah tidak mengimbangnya. Lebih jauh, faktor kematangan seperti tahap pengembangan industri dan masalah waktu juga berperan. Mempertimbangkan persyaratan standar mengenai ambang batas pelaporan yang signifikan dan entitas yang bertanggung jawab, kami menyarankan agar fokus laporan diarahkan pada sektor Minyak dan Gas. Sebaliknya, sektor pertambangan dapat diperlakukan sebagai Pertambangan Skala Kecil Artisanal (ASM) dan dicakup dalam opsi 2, yang memberikan gambaran umum tentang aktivitas, produksi, dan ekspor ASM, yang memastikan keseimbangan antara pelaporan yang komprehensif dan efisiensi.

Subkontraktor

MSWG telah memutuskan untuk memasukkan Subkontraktor yang telah melakukan pembayaran ke aliran pendapatan yang signifikan (hanya Pajak) dari kegiatan Minyak & Gas di atas ambang batas.

Metodologi dan pendekatan

Entitas ruang lingkup

Daftar entitas Minyak & Gas (Kontraktor, Subkontraktor dan Pemerintah) dalam lingkup adalah sebagai berikut:

ENTITAS MINYAK & GAS DALAM LINGKUP - KONTRAKTOR		
BU-12 Australia Pty Ltd BU-13 Australia Pty Ltd Carnarvon Petroleum Timor Unip Lda Santos NA Emet Pty Ltd Santos NA (19-12) Pty Ltd Santos NA (19-13) Pty Ltd Santos NA Timor Sea Pty Ltd Santos NA Bayu-Undan Pty Ltd Santos (JPDA 91-12) Pty Ltd	ENI JPDA 03-13 Ltd ENI JPDA 06-105 Pty Ltd Eni JPDA 11-106 B.V Eni Timor Leste S.P.A Inpex Sahul Ltd Inpex Timor Sea Ltd SundaGas Banda Unipessoal, Lda Timor Resources Pty Ltd Tokyo Timor sea Resources Pty Ltd	TIMOR GAP Onshore Block, Unipessoal, Lda TIMOR GAP GREATER SUNRISE 03-19, Unipessoal, Lda TIMOR GAP Greater Sunrise RL, Unipessoal, Lda TIMOR GAP Greater Sunrise RL2, Unipessoal, Lda TIMOR GAP Greater Sunrise 03-20, Unipessoal, Lda TIMOR GAP Offshore Block, Unipessoal, Lda TIMOR GAP PSC 11-106 Unip Lda TIMOR GAP Onshore Block Unip Lda Woodside Energy Pty Ltd
ENTITAS MINYAK & GAS DALAM LINGKUP - SUBKONTRAKTOR		
Konnekto Unipessoal Lda Brunel Energy Pty Ltd Caltech Unipessoal Lda Cameron Services International Pty Ltd Cape Australia Onshore Pty Ltd Clough Amec Pty Ltd	Normant Driff AS Timor, Unipessoal Lda Oceaneering Aust Pty Ltd MMA Offshore Vessel Operation Pty Noble Services International Limited Noble Contracting II GMBH	Rigforce Pty Ltd Santos NA Timor Leste Pty Ltd Schlumberger Australia P/L SGS AUSTRALIA PTY LTD Sodexo Timor Unip Lda
ENTITAS PEMERINTAH		LAINNYA (BIAYA PIPA)
Direção Nacional de Receitas Petrolíferas e Minerais (DNRPM) Autoridade Nacional do Petróleo e Minerais (ANPM) Petroleum Fund (PF)	Banco Central de Timor-Leste (BCTL) TIMOR GAP E.P. (SOE)	AusAid

Metodologi dan pendekatan

7.2 Ambang Batas Materialitas Untuk Pengungkapan Perusahaan

Aliran Pendapatan

Pendapatan pemerintah dari industri ekstraktif terdiri dari:

- Pendapatan Bukan Pajak
- Pendapatan Pajak

Aliran pendapatan pajak entitas Minyak & Gas dalam lingkup adalah sebagai berikut

PENDAPATAN OIL & GAS STREAM	
PENDAPATAN BUKAN PAJAK	DESKRIPSI
Corporate Income Tax	Pajak atas penghasilan kena pajak dari wajib pajak untuk setiap tahun pajak
Additional Profits Tax	Pajak penghasilan tambahan dibayarkan oleh Kontraktor yang memiliki jumlah positif akumulasi penerimaan bersih yang berasal dari Bayu-Undan Project untuk tahun pajak.
PPN	Pajak atas Barang dan Jasa.
Wages Withholding tax	withholding pajak gaji karyawan (Residen dan non Residen).
Withholding Tax Payments	Ini adalah pajak di mana setiap orang atau perusahaan yang melakukan pembayaran tertentu diharuskan untuk memotong dari pembayaran tersebut dan mengirimkan kepada Direktorat Nasional Minyak dan Mineral Pendapatan (NDPMR). Pembayaran yang menarik WHT adalah pembayaran untuk layanan yang termasuk manajemen dan biaya konsultasi, komisi, dividen sewa dan pembayaran kepada kontraktor bukan-residen.

Aliran pendapatan bukan pajak entitas Minyak & Gas dalam lingkup adalah sebagai berikut:

PENDAPATAN MINYAK & GAS STREAM	
PENDAPATAN BUKAN PAJAK	DESKRIPSI
FTP	Pembayaran produksi dilakukan sesuai dengan PSC antara Pemerintah TL dan Perusahaan yang berkaitan dengan penjualan Minyak dan Gas.
Royalti	Pembayaran royalti dilakukan sesuai dengan PSC mereka antara Pemerintah TL dan Perusahaan yang berkaitan dengan penjualan Minyak dan Gas.
Pembayaran Profit Oil & Gas	Pembayaran produksi yang dilakukan sesuai dengan PSC antara Pemerintah TL dan Perusahaan yang berkaitan dengan keuntungan penjualan minyak dan gas cost oil recovery.
Fee's Payable	Contract service fee - Biaya yang dibayarkan kepada wilayah Kontrak yang diperoleh berdasarkan jumlah dan ukuran tetap/km di TLEA. CSF diakui ketika hak untuk menerima biaya layanan kontrak telah ditetapkan dan dapat diukur secara andal. Development Fee - Berlaku ketika penemuan komersial dinyatakan oleh kontraktor. Biaya berdasarkan ukuran penemuan cadangan minyak dan gas Surface Fee - Biaya eksplorasi dihitung berdasarkan luas permukaan eksplorasi dikalikan dengan tarif yang disepakati per hektar. Seismic Data Fee - Biaya berdasarkan data yang diperoleh dari sistem inventaris yang mengumpulkan semua data Seismik yang relevan.
Pembayaran lainnya (Biaya Pipa)	Biaya yang harus dibayar oleh pemerintah Australia disetujui oleh kedua negara.

Metodologi dan pendekatan

7.3 Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data memiliki langkah-langkah sebagai berikut:

- Penyusunan draf templat pengumpulan data oleh IA (sebagai bagian dari studi pelingkupan).
- Diskusi dan templat yang disesuaikan setelah komentar, pengamatan dan rekomendasi yang diberikan oleh MSWG.
- Penyusunan permintaan tersendiri kepada masing-masing entitas pemerintah (DNRPM, Petroleum Fund, BCTL, ANPM), daftar entitas dalam lingkup dan milik negara (TIMOR GAP E.P.).
- Sekretariat Nasional Timor-Leste mengirimkan templat permintaan data dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh perwakilan Menteri Perminyakan dan Sumber Daya Mineral.
- Setelah diselesaikan oleh entitas dalam ruang lingkup dan entitas pemerintah, kuesioner (templat) yang dirujuk dikirim melalui email ke IA.
- Pemrosesan informasi dilakukan oleh Administrator Independen.
- Pembahasan perbedaan dan menyesuaikan perbedaan oleh IA (melibatkan kedua bagian).

Permintaan informasi spesifik dimasukkan ke dalam templat pelaporan untuk memenuhi persyaratan EITI dan mempertahankan skor yang dikeluarkan oleh Sekretariat Internasional EITI pada validasi terakhir.

- Draft kesimpulan yang dibuat oleh IA dan dibahas dengan MSWG.

Kualitas Data

Kualitas data keseluruhan sektor ekstraktif memadai. Ada area yang perlu ditingkatkan seperti pengungkapan kontrak penuh dan informasi kadaster, seperti yang dijelaskan di atas dalam analisis kontekstual. Area untuk perbaikan ini berada di luar bidang studi pelingkupan, terutama karena belum disetujui oleh MSWG. Namun, perbaikan dari validasi terakhir sudah dicatat.

Tidak ada kesulitan yang signifikan di sektor minyak dan gas sehubungan dengan templat pelaporan entitas pemerintah dan perusahaan. Mereka harus disetujui dan secara rinci sesuai dengan persyaratan EITI.

Jaminan Data

Menurut persyaratan 4.9 (a), audit laporan keuangan oleh pihak independen, dan penjelasan tata cara penjaminan cukup untuk menjamin pemenuhan persyaratan ini.

Metodologi dan pendekatan

7.4 Jaminan Data

Metode Penjaminan di Sektor Publik

Ada entitas pemerintah (seperti ANP dan Petroleum Fund) yang memiliki laporan konfirmasi, dari auditor eksternal mereka, yang dihasilkan sebagai bagian dari program audit normal dan validasi laporan keuangan mereka, yang mengkonfirmasi pendapatan yang disajikan. Selain itu, BCTL (Banco Central Timor-Leste), Petroleum Fund, dan TIMOR GAP juga memiliki laporan keuangan yang diaudit, dan yang terbaru diaudit oleh Pengadilan Audit.

Langkah-langkah proses penjaminan/audit yang disebutkan sebelumnya, harus dilaksanakan secara hukum untuk seluruh badan publik di sektor ekstraktif. Oleh karena itu, data yang diminta dari administrator independen diharapkan dapat diteliti melalui proses yang disebutkan di atas.

Metode Jaminan di Sektor Swasta

Keadaan yang berbeda diterapkan untuk perusahaan swasta yang terlibat dalam sektor ekstraktif. Kinerja operasional dan keuangan mereka dicantumkan dalam laporan tahunan dan keuangan, terutama untuk perusahaan publik atau dengan ketergantungan pada sistem pengendalian internal yaitu, di sebagian besar entitas, kepatuhan SOX.

Hukum dan Regulasi mengenai proses audit belum berlaku untuk Timor-Leste. Karena proses rekonsiliasi EITI, membutuhkan data dengan keandalan tinggi, kami memiliki:

- Meminta dan menerima format pelaporan yang ditandatangani oleh pejabat yang bertanggung jawab beserta rincian pembayaran bulanan (tanggal dan jumlah);
- Kami telah meminta laporan keuangan yang telah diaudit (bila berlaku) dan/atau laporan auditor;
- Melakukan tinjauan analitik terhadap data dan informasi eksternal yang tersedia;

Eni, Woodside, ANP, DNRPM, PF dan BCTL) kami mempertanyakan perbedaan informasi yang dilaporkan, untuk memastikan bahwa data dilaporkan dengan benar dan untuk menetapkan kontrol internal untuk tujuan validasi.

Setiap kali ada perbedaan/keraguan tentang informasi yang dilaporkan, kami meminta entitas untuk mengirim ulang informasi yang diperbarui.

Metodologi dan pendekatan

7.5 Pertimbangan Lain

Transportasi

Rencana Pengembangan Lapangan Bayu-Undan, terdiri dari pemasangan pipa bawah laut dan pembangunan pabrik LNG Darwin. Pipa sepanjang 500 kilometer 26" ini memasok gas dari Bayu-Undan untuk diolah menjadi fasilitas Natural Gas berkapasitas desain 3,7 MTPA – Darwin Natural Gas, yang berlokasi di Northern Territory Australia. LNG terus dijual berdasarkan perjanjian penjualan jangka panjang (SPA) antara Darwin LNG dan Tokyo Gas (TG) dan JERA. Gas alam diangkut ke Darwin, Australia, melalui jaringan pipa, di mana gas tersebut dicairkan di pabrik pengolahan darat di Darwin dan kemudian dijual sebagai LNG kepada pelanggan seperti Tokyo Electric (TE) dan JERA.

Darwin dan kemudian dijual sebagai LNG kepada pelanggan seperti Tokyo Electric (TE) dan JERA. Pasal 8 (b) Perjanjian Laut Timor menyatakan: "Pendaratan pipa di Timor-Leste akan berada di bawah yurisdiksi Timor-Leste. Pendaratan pipa di Australia akan berada di bawah yurisdiksi Australia".

Berdasarkan analisis yang dilakukan dan melanjutkan kriteria yang digunakan pada tahun-tahun sebelumnya, tidak ada pendapatan transportasi yang diidentifikasi. Biaya pipa adalah biaya perjanjian

antara kedua negara, bukan pendapatan transportasi. Tidak ada pembayaran lain yang terkait dengan transportasi, yang dilakukan oleh kontraktor atau subkontraktor, yang diidentifikasi.

Penyediaan Infrastruktur dan Pengaturan Barter

Untuk minyak dan gas, sebagaimana dimaksud di atas, Timor-Leste mengikuti mekanisme PSC. Di bawah mekanisme PSC, semua Infrastructure Provision and Barter Arrangement dimiliki oleh kontraktor.

Regulasi penyediaan infrastruktur oleh perusahaan swasta

belum disiapkan. Untuk menghimpun informasi sepihak, kami telah memasukkan permintaan informasi dalam templat pelaporan.

berdasarkan tanggapan yang diterima, kami menyimpulkan bahwa di Timor-Leste konsep pengaturan barter untuk semua tujuan praktis tidak ada (dikonfirmasi oleh informasi yang diunggah pada templat pelaporan yang diterima oleh semua entitas).

Namun, ada Komitmen Lokal (wajib dan sukarela) yang disajikan di Bagian 11.

Pembayaran dan Transfer Subnasional

Sesuai dengan laporan sebelumnya, berdasarkan prosedur yang dilakukan untuk laporan studi cakupan dan dengan mempertimbangkan struktur tata kelola Timor-Leste yang sebenarnya (semuanya tersentralisasi), tidak ada pembayaran dan transfer subnasional yang terdeteksi.



Rekonsiliasi Pajak Dan Pembayaran Lainnya

8

Prosedur yang disepakati terkait pajak, bukan pajak, dan pembayaran lainnya mencakup hal-hal berikut:

- Memperoleh informasi dari perusahaan ekstraktif dan otoritas pemerintah tentang pajak, bukan pajak, dan pembayaran lainnya pada tahun 2022;
- Merekonsiliasi data dari perusahaan ekstraktif dan otoritas pemerintah tentang setiap jenis pembayaran untuk setiap perusahaan pada tahun 2022;
- Jika ditemukan ketidaksesuaian pembayaran, meminta penjelasan kepada perusahaan tersebut;
- Jika berdasarkan penjelasan yang diterima dari perusahaan (atau jika perusahaan menolak memberikan penjelasan tersebut) penyebab ketidaksesuaian tidak dapat ditentukan, meminta informasi terperinci tentang jenis pembayaran tersebut kepada otoritas pemerintah terkait;
- Jika berdasarkan penjelasan yang diterima dari perusahaan dan otoritas pemerintah (atau jika perusahaan menolak memberikan penjelasan tersebut) ketidaksesuaian tersebut masih belum dapat dijelaskan, maka hal ini harus dicantumkan dalam laporan EITI.

8. Rekonsiliasi pajak dan pembayaran lainnya

8.1 Hasil Umum Rekonsiliasi Pembayaran

Pada tabel di bawah ini terdapat deskripsi singkat dan ringkasan jumlah total pendapatan yang diterima oleh entitas Pemerintah dari sektor Minyak & Gas dan jumlah dalam lingkup:

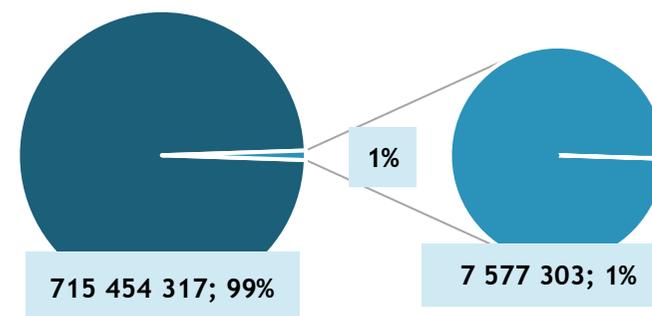
Pendapatan yang dihasilkan pada tahun 2022 sesuai templat (USD Jutaan)	Total	Ruang lingkup	
Total pendapatan Bukan Pajak - Royalti dan profit O&G	319	319	100%
Total Pendapatan Bukan Pajak - Biaya	5	5	100%
Total Pendapatan Pajak Kontraktor	392	392	100%
Total Pendapatan Kontraktor	716	716	100%
Total Penerimaan Pajak Subkontraktor	8	7,5	93,48%
Biaya lainnya (BCTL)	6	6	100%
Total	730	729	99,93%
Jumlah yang digandakan oleh MoF dibayarkan langsung ke ANPM	-1	-1	-
Total	729	728	99,93%

Catatan: Selama proses rekonsiliasi, tercatat bahwa Kementerian Keuangan melaporkan jumlah duplikat sekitar 1 juta terkait biaya pengembangan yang juga dikumpulkan oleh ANPM. Setelah proses rekonsiliasi selesai, jumlah duplikat ini dikurangkan dari pendapatan yang dilaporkan oleh Kementerian Keuangan. Untuk detail lebih lanjut, lihat Bagian 8.2.2.

Jumlah yang dilaporkan oleh badan-badan pemerintah (MoF, ANPM⁴² dan BCTL) dan badan-badan tersebut direkonsiliasi sesuai bagian 8.2 hingga 8.5.

Berdasarkan grafik di atas, kami menyajikan komposisi jumlah total pendapatan Minyak & Gas yang dipilih menurut badan-badan ekstraktif (lihat Bagian 8.2) dan subkontraktornya (lihat Bagian 8.3) yang akan kami rekonsiliasi. Rekonsiliasi untuk biaya jaringan pipa, lihat Bagian 8.5.

Total pendapatan minyak dan gas dalam USD



■ Kegiatan ekstraktif Minyak & Gas ■ Kegiatan yang didukung Minyak & Gas

⁴² Dalam laporan ini, kami menyebut ANP dan ANM secara kolektif sebagai ANPM, karena pada tahun 2021, keduanya masih merupakan entitas yang masih bersatu. Dengan demikian, dalam hal tanggung jawab dan representasi terkait pendapatan pertambangan, ANPM masih menjadi pemegang data. Untuk keterangan lebih rinci, silakan lihat Bagian 4.5.

Rekonsiliasi pajak dan pembayaran lainnya

8.2 Hasil Umum Rekonsiliasi Pembayaran – Perusahaan Ekstraktif

8.2.1 Pembayaran Dari Perusahaan Ekstraktif Minyak & Gas Dalam Lingkup – Dilaporkan Oleh Pemerintah

Pembayaran pajak dari perusahaan ekstraktif Minyak & Gas dan Afiliasinya yang terlibat dalam operasi minyak dan gas Timor

Dari 27 perusahaan yang melakukan pembayaran atas aktivitas perminyakan kepada badan-badan Pemerintah (DNRPM, ANPM, BCTL dan Petroleum Fund), semua badan usaha tersebut berada dalam cakupan (akumulasi pembayaran di atas ambang batas). Pembayaran dari badan-badan usaha ini mewakili USD 715.454.317 juta dari total pendapatan.

Rincian jumlah pendapatan pajak menurut perusahaan yang dilaporkan oleh Pemerintah adalah sebagai berikut:

Entitas	Timor-Leste WIT Karyawan residen dan Timor-Leste WIT Karyawan non -Residen	Timor-Leste PE PAJAK WHT dan Timor-Leste bukan- PE PAJAK WHT	PPN - JPDA	Cooperate Income Tax	APT	Witholding Tax on Service	Total Pajak Pendapatan yang dilaporkan oleh Pemerintah
BU 12 Aust Pty Ltd	-	-	-	26 211 126	31 232 419	-	57 443 545
BU 13 Aust Pty Ltd	-	-	-	15 088 721	17 797 665	-	32 886 386
Carnarvon Petroleum Timor Unip Lda	111 884	179 847	-	-	-	-	291 731
Eni JPDA 03-13 Ltd	-	-	-	844 111	23 412 219	-	24 256 330
Eni JPDA 06-105 Pty Ltd	56 684	1 415	-	-	-	-	58 099
Eni JPDA 11-106 B.V	81 995	-	-	-	-	-	81 995
Eni Timor Leste S.P.A	4 322	5 664	-	-	-	-	9 986
Inpex Sahul Ltd	-	-	-	23 037 006	25 675 286	-	48 712 292
Inpex Timor Sea Ltd	-	11 611	-	-	-	-	11 611
Santos NA Emet Pty Ltd	-	-	-	1 549 997	2 098 398	-	3 648 395
Santos NA (19-12) Pty Ltd	8 974 672	953 467	6 715 828	31 461 889	26 120 266	-	74 226 123
Santos NA (19-13) Pty Ltd	-	-	-	10 721 025	12 083 544	-	22 804 569
Santos NA Timor Sea Pty Ltd	-	-	-	16 388 399	17 021 079	-	33 409 478
Santos NA Bayu-Undan Pty Ltd	-	-	-	15 818 623	14 145 613	-	29 964 236
Santos (JPDA 91-12) Pty Ltd	-	-	-	26 394 479	23 917 128	-	50 311 607
Sundagas Banda Unipessoal, Lda	7 126	26 013	-	-	-	-	33 138
TIMOR GAP Onshore Block Unip Lda	25 680	-	-	-	-	-	25 680
TIMOR GAP Onshore Block B Unip Lda	188	-	-	-	-	-	188
TIMOR GAP Greater Sunrise 03-19	1 249	-	-	-	-	-	1 249
TIMOR GAP Greater Sunrise RL	5 938	-	-	-	-	-	5 938

Entitas	Timor-Leste WIT Karyawan residen dan Timor-Leste WIT Karyawan non - Residen	Timor-Leste PE PAJAK WHT dan Timor-Leste bukan- PE PAJAK WHT	PPN - JPDA	Cooperate Income Tax	APT	Witholding Tax on Service	Total Pajak Pendapatan yang dilaporkan oleh Pemerintah
TIMOR GAP Greater Sunrise RL2	-	-	-	-	-	-	-
TIMOR GAP Greater Sunrise 03-20	1 249	-	-	-	-	-	1 249
TIMOR GAP Offshore Block Unipessoal	74 161	8 987	-	-	-	-	83 148
TIMOR GAP PSC 11-106 Unip Lda	19 204	415	-	-	-	-	19 619
Timor Resources Pty Ltd	276 690	77 136	-	-	-	-	353 826
Tokyo Timor Sea Resources	-	-	-	6 762 803	6 920 550	-	13 683 353
Woodside Energy Pty Ltd	27 925	2 195	-	-	-	-	30 120
Total	9 668 967	1 266 750	6 715 828	174 278 179	200 424 165	-	392 353 891

Pembayaran Bukan Pajak dari perusahaan ekstraktif Minyak & Gas dan afiliasinya yang terlibat dalam operasi minyak dan gas Timor-Leste

Rincian oleh perusahaan tentang jumlah **penerimaan bukan pajak** yang dilaporkan oleh Pemerintah diwakili sebagai berikut:

Entities	FTP	Profit Oil	Contract Services Fee	Development Fee	Surface Rental Fee	Seismic Data Fee	Total Bukan Pajak Pendapatan yang dilaporkan oleh Pemerintah
BU 12 Aust Pty Ltd	-	29 139 736	-	-	-	-	29 139 736
BU 13 Aust Pty Ltd	-	16 391 101	-	-	-	-	16 391 101
Carnarvon Petroleum Timor Unip Lda	-	-	-	-	-	-	-
Eni JPDA 03-13 Ltd	-	27 622 879	-	-	-	-	27 622 879
Eni JPDA 06-105 Pty Ltd	-	-	-	325 000	-	-	325 000
Eni JPDA 11-106 B.V	-	-	68 164	-	-	-	68 164
Eni Timor Leste S.P.A	-	-	-	-	154 000	-	154 000
Inpex Sahul Ltd	-	26 184 618	-	-	-	-	26 184 618
Inpex Timor Sea Ltd	-	-	-	-	-	-	-
Santos NA Emet Pty Ltd	-	-	-	-	-	-	-
Santos NA (19-12) Pty Ltd	-	-	160 000	3 658 200	-	-	3 818 200
Santos NA (19-13) Pty Ltd	-	-	-	-	-	-	-
Santos NA Timor Sea Pty Ltd	-	-	-	-	-	-	-
Santos NA Bayu-Undan Pty Ltd	-	-	-	-	-	-	-
Santos (JPDA 91-12) Pty Ltd	75 529 799	121 705 836	-	-	-	-	197 235 634
Sundagas Banda Unipessoal, Lda	-	-	-	-	-	-	-
TIMOR GAP Onshore Block Unip Lda	-	-	-	-	-	-	-
TIMOR GAP Onshore Block B Unip Lda	-	-	-	-	-	-	-
TIMOR GAP Greater Sunrise 03-19	-	-	-	-	-	-	-
TIMOR GAP Greater Sunrise RL	-	-	-	-	-	-	-
TIMOR GAP Greater Sunrise RL2	-	-	-	-	-	-	-
TIMOR GAP Greater Sunrise 03-20	-	-	-	-	-	-	-
TIMOR GAP Offshore Block Unipessoal	-	-	-	-	110 370	-	110 370
TIMOR GAP PSC 11-106 Unip Lda	-	-	-	-	-	-	-
Timor Resources Pty Ltd	-	-	-	-	120 060	-	120 060
Tokyo Timor Sea Resources	-	21 930 664	-	-	-	-	21 930 664
Woodside Energy Pty Ltd	-	-	-	-	-	-	-
Total	75 529 799	242 974 833	228 164	3 983 200	384 430	106 369	323 100 426

8.2.2 Perusahaan Ekstraktif – Penyesuaian oleh Pemerintah

Kami menanyakan kepada entitas pemerintah tentang perbedaan data yang disajikan dalam templat EITI selama proses rekonsiliasi. Kami melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk perbedaan yang dikonfirmasi untuk meminimalkan jumlah yang tidak direkonsiliasi. Berikut ini adalah ringkasan perbedaan yang diselidiki dan penyesuaian yang sesuai dari perspektif jumlah yang dilaporkan oleh Pemerintah:

Entitas	Timor-Leste WIT Karyawan residen dan WIT Timor-Leste Karyawan non-Residen	Timor-Leste PE PAJAK WHT dan Timor-Leste bukan- PE PAJAK WHT	PPN -JPDA	Corporate Income Tax	APT tahunan	Withholding Tax on Services	Contract Services Fee	Total	Catatan
Carnarvon Petroleum Timor Unip Lda	- 78 628	110 942	-	-	-	-	-	32 314	1)
Sundagas Banda Unipessoal, Lda	435	74 643	-	-	-	-	-	75 078	2)
Eni JPDA 03-13 Ltd	-	-	-	457 953	- 457 953	-	-	-	3.1)
Eni JPDA 06-105 Pty Ltd	-	- 1 415	-	-	-	1 415	-	-	3.2)
Eni JPDA 11-106 B.V	-	- 13 831	- 68 164	-	-	13 831	-	- 68 164	3.3)
Eni Timor Leste S.P.A	- 4 322	- 5 664	-	-	-	9 986	-	-	3.4)
	- 4 322	437 044	- 68 164	457 953	- 457 953	25 231	-	- 68 164	
Santos NA Emet Pty Ltd				- 16 427				- 16 427	4.1)
Santos NA (19-12) Pty Ltd				- 1 750 000				- 1 750 000	4.2)
Santos (JPDA 91-12) Pty Ltd				- 1 074 535	1 750 000			675 465	4.3)
				- 2 840 962	1 750 000			- 1 090 962	
									5)
Timor Resources Pty Ltd	- 7 339	7 339	-	-	-	-	-	-	
Tokyo Timor Sea Resources	-	-	-	- 1 006 117	1 006 117	-	-	-	6)
Inpex Sahul Ltd	-	-	-	- 607 446	607 446	-	-	-	7)
Woodside Energy Pty Ltd	-	-	-	-	-	-	320 000	320 000	8)
Total	- 89 855	629 969	- 68 164	- 4 454 525	2 905 610	25 231	320 000	-731 734	

Catatan:

1) menyesuaikan jumlah yang dilaporkan Pemerintah untuk Carnarvon Petroleum Timor Unip Lda

Penyesuaian tersebut terkait dengan: - Pembayaran pajak untuk Oktober 2021 yang tidak dilaporkan Pemerintah dalam formatnya; Klasifikasi yang salah berdasarkan jenis pajak dan alokasi yang salah oleh Pemerintah.

2) menyesuaikan jumlah yang dilaporkan Pemerintah untuk Sundagas Banda Unipessoal, Lda

Penyesuaian tersebut terkait dengan kewajiban pembayaran pajak untuk April 2021, Pemerintah melaporkan jumlah ini untuk Babcock/Konnekto yang merupakan agen pembayaran Sundagas Banda Unipessoal, Lda.

3) menyesuaikan jumlah yang dilaporkan Pemerintah untuk Eni JPDA

3.1) Penyesuaian tersebut berkaitan dengan klasifikasi yang salah berdasarkan jenis pajak.

3.2) Penyesuaian tersebut berkaitan dengan klasifikasi yang salah berdasarkan jenis pajak.

3.3) Penyesuaian tersebut berkaitan dengan: - Klasifikasi yang salah berdasarkan jenis pajak; - Penyesuaian tersebut berkaitan dengan satu pembayaran yang terkait dengan biaya (pembayaran bukan-pajak) yang dianggap sebagai PPN

3.4) Penyesuaian tersebut berkaitan dengan klasifikasi yang salah berdasarkan jenis pajak.

4) menyesuaikan jumlah yang dilaporkan oleh Pemerintah untuk Santos

4.1) Penyesuaian tersebut sesuai dengan jumlah CIT yang tidak dilaporkan oleh Pemerintah.

4.2) Penyesuaian tersebut sesuai dengan reklasifikasi jumlah pajak dalam Grup Santos - pembayaran untuk Santos JPDA 91-12 Final 2020 APT

4.3) Penyesuaian tersebut sesuai dengan biaya yang dikumpulkan oleh ANPM, MoF tidak boleh melaporkan jumlah ini sebagai pendapatan pajak sesuai dengan proses yang ditetapkan.

5) menyesuaikan jumlah yang dilaporkan oleh Pemerintah untuk Timor Resources Pty Ltd

Penyesuaian tersebut sesuai dengan klasifikasi yang salah berdasarkan jenis pajak.

6) menyesuaikan jumlah yang dilaporkan oleh Pemerintah untuk Tokyo Timor Sea Resources

Penyesuaian tersebut sesuai dengan klasifikasi yang salah berdasarkan jenis pajak.

7) menyesuaikan jumlah yang dilaporkan oleh Pemerintah untuk Inpex Sahul Ltd

Penyesuaian tersebut sesuai dengan klasifikasi yang salah berdasarkan jenis pajak.

8) menyesuaikan jumlah yang dilaporkan oleh Pemerintah untuk Woodside Energy Pty Ltd

Penyesuaian tersebut sesuai dengan pembayaran biaya layanan kontrak untuk Biaya Layanan Kontrak untuk JPDA 03-19 dan 03-20 yang tidak dilaporkan Pemerintah dalam formatnya. Perlu dicatat, bahwa pembayaran ini diakui sebagai pendapatan ANP (mantan ANPM).

8.2.3 Pembayaran Dari Perusahaan Ekstraktif Minyak & Gas Dalam Lingkup – Dilaporkan Oleh Entitas

Pembayaran pajak dari perusahaan ekstraktif Minyak & Gas dan Afiliasinya yang terlibat dalam operasi minyak dan gas Timor

Dari dua puluh delapan perusahaan ekstraktif yang masuk dalam cakupan, semua kontraktor mengirimkan templat dengan data tahun 2021.

Rincian jumlah **pendapatan pajak** yang dilaporkan oleh entitas per perusahaan adalah sebagai berikut:

Perusahaan Ekstraktif	Timor-Leste WIT Karyawan residen dan Timor-Leste WIT Karyawan non-Residen	Timor-Leste PE PAJAK WHT dan Timor-Leste bukan-PE PAJAK WHT	PPN - JPDA	Corporate Income Tax	APT	Withholding Tax on Services	Total Pajak Pendapatan yang dilaporkan oleh Pemerintah
BU 12 Aust Pty Ltd	-	-	-	26 211 126	31 232 419	-	57 443 545
BU 13 Aust Pty Ltd	-	-	-	15 088 746	17 797 690	-	32 886 436
Carnarvon Petroleum Timor Unip Lda	30 893	293 232	-	-	-	-	324 125
Eni JPDA 03-13 Ltd	-	-	-	1 302 064	22 954 266	-	24 256 330
Eni JPDA 06-105 Pty Ltd	56 684	-	-	-	-	1 415	58 099
Eni JPDA 11-106 B.V	-	-	-	-	-	13 831	13 831
Eni Timor Leste S.P.A	-	-	-	-	-	9 986	9 986
Inpex Sahul Ltd	-	-	-	22 429 560	26 282 732	-	48 712 292
Inpex Timor Sea Ltd	-	11 611	-	-	-	-	11 611
Santos NA Emet Pty Ltd	-	-	-	1 533 569	2 098 398	-	3 631 967
Santos NA (19-12) Pty Ltd	8 974 672	953 467	6 715 828	29 711 889	26 120 267	-	72 476 124
Santos NA (19-13) Pty Ltd	-	-	-	10 721 024	12 083 544	-	22 804 568
Santos NA Timor Sea Pty Ltd	-	-	-	15 611 491	17 797 986	-	33 409 477
Santos NA Bayu-Undan Pty Ltd	-	-	-	15 818 622	14 145 613	-	29 964 235
Santos (JPDA 91-12) Pty Ltd	-	-	-	25 319 943	25 667 128	-	50 987 071
Sundagas Banda Unipessoal, Lda	6 765	101 251	-	-	-	-	108 016
TIMOR GAP Onshore Block Unip Lda	25 956	-	-	-	-	-	25 956
TIMOR GAP Onshore Block B Unip Lda	188	-	-	-	-	-	188
TIMOR GAP Greater Sunrise 03-19	104	-	-	-	-	-	104
TIMOR GAP Greater Sunrise RL	8 539	-	-	-	-	-	8 539
TIMOR GAP Greater Sunrise RL2	104	-	-	-	-	-	104
TIMOR GAP Greater Sunrise 03-20	104	-	-	-	-	-	104
TIMOR GAP Offshore Block Unipessoal	66 440	-	-	-	-	-	66 440
TIMOR GAP PSC 11-106 Unip Lda	9 629	-	-	-	-	-	9 629
Timor Resources Pty Ltd	271 240	82 585	-	-	-	-	353 826
Tokyo Timor Sea Resources	-	-	-	5 756 686	7 926 667	-	13 683 353
Woodside Energy Pty Ltd	26 845	3 095	-	-	-	-	29 940
Total	9 478 164	1 445 242	6 715 828	169 504 720	204 106 709	25 231	391 275 896

Pembayaran Bukan Pajak dari perusahaan ekstraktif Minyak & Gas dan Afiliasinya yang terlibat dalam operasi minyak dan gas Timor

Rincian oleh perusahaan tentang jumlah **pendapatan bukan pajak** yang dilaporkan oleh entitas diwakili sebagai berikut:

Perusahaan Ekstraktif	FTP	Profit Oil	Contract Services Fee	Development Fee	Surface Rental Fee	Seismic Data Fee	Total Bukan Pajak Pendapatan yang dilaporkan oleh Entitas
BU 12 Aust Pty Ltd		28 980 599	-	-	-	-	28 980 599
BU 13 Aust Pty Ltd		16 553 238	-	-	-	-	16 553 238
Carnarvon Petroleum Timor Unip Lda	-	-	-	-	-	-	-
Eni JPDA 03-13 Ltd	-	27 622 879	-	-	-	-	27 622 879
Eni JPDA 06-105 Pty Ltd	-	-	-	325 000	-	-	325 000
Eni JPDA 11-106 B.V	-	-	68 164	-	-	-	68 164
Eni Timor Leste S.P.A	-	-	-	-	154 000	-	154 000
Inpex Sahul Ltd	-	26 184 618	-	-	-	-	26 184 618
Inpex Timor Sea Ltd	-	-	-	-	-	-	-
Santos NA Emet Pty Ltd	-	-	-	-	-	-	-
Santos NA (19-12) Pty Ltd	-	-	160 000	3 658 200	-	-	3 818 200
Santos NA (19-13) Pty Ltd	-	-	-	-	-	-	-
Santos NA Timor Sea Pty Ltd	-	-	-	-	-	-	-
Santos NA Bayu-Undan Pty Ltd	-	-	-	-	-	-	-
Santos (JPDA 91-12) Pty Ltd	75 529 904	121 705 926	-	-	-	-	197 235 829
Sundagas Banda Unipessoal, Lda	-	-	-	-	-	-	-
TIMOR GAP Onshore Block Unip Lda	-	-	-	-	-	-	-
TIMOR GAP Onshore Block B Unip Lda	-	-	-	-	-	-	-
TIMOR GAP Greater Sunrise 03-19	-	-	-	-	-	-	-
TIMOR GAP Greater Sunrise RL	-	-	-	-	-	-	-
TIMOR GAP Greater Sunrise RL2	-	-	-	-	-	-	-
TIMOR GAP Greater Sunrise 03-20	-	-	-	-	-	-	-
TIMOR GAP Offshore Block Unipessoal	-	-	-	-	110 370	-	110 370
TIMOR GAP PSC 11-106 Unip Lda	-	-	-	-	-	-	-
Timor Resources Pty Ltd	-	-	120 060	-	-	-	120 060
Tokyo Timor Sea Resources	8 473 585	21 930 664	-	-	-	-	30 404 249
Woodside Energy Pty Ltd	-	-	320 000	-	-	-	320 000
Total	84 003 489	242 977 923	668 224	3 983 200	264 370	-	331 897 206

8.2.4 Perusahaan Ekstraktif – Menyesuaikan Oleh Kontraktor

Kami bertanya kepada kontraktor tentang perbedaan data yang disajikan dalam templat EITI selama proses rekonsiliasi. Kami melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk perbedaan yang dikonfirmasi untuk meminimalkan jumlah yang tidak direkonsiliasi. Berikut ini adalah ringkasan perbedaan yang diselidiki dan penyesuaian yang sesuai dari perspektif jumlah yang dilaporkan oleh Kontraktor:

Entitas	PPN - JPDA	Corporate Income Tax	APT	Fees	Bank charges	Total	Catatan
Carnarvon Petroleum Timor Unip Lda	-	-	-	-	- 80	- 80	1)
Sundagas Banda Unipessoal, Lda	-	-	-	-	200	200	1)
Tokyo Timor Sea Resources	-	-	-	-8 473 585	-	-8 473 585	2)
Total	-	-	-	-8 473 585	120	-8 473 465	

1) menyesuaikan jumlah yang dilaporkan oleh Carnarvon Petroleum Timor Unip Lda dan Sundagas Banda Unipessoal, Lda

Penyesuaian tersebut sesuai dengan biaya bank yang dicatat oleh entitas sebagai pajak.

2) menyesuaikan jumlah yang dilaporkan oleh Tokyo Timor Sea Resources

Penyesuaian tersebut sesuai dengan FTP yang dilaporkan oleh Tokyo Timor Sea Resources dan ANPM sebesar USD 8.473.585. Berdasarkan diskusi kami dengan ANPM, mereka mengonfirmasi bahwa FTP yang dilaporkan oleh Tokyo Timor Sea Resources (sebagai pembayar akhir) dibayarkan melalui Santos NA (19-12) Pty Ltd yang melakukan pembayaran sebagai Operator yang bertanggung jawab, kepada ANPM. Oleh karena itu, pembayaran Tokyo Timor Sea Resources seharusnya tidak dipertimbangkan, karena Santos telah melaporkan FTP tersebut.

8.2.5 Perusahaan Ekstraktif – Hasil Rekonsiliasi

Di bawah ini ditampilkan perbedaan yang tercatat antara jumlah yang dibayarkan dari kegiatan ekstraktif minyak dan gas dan jumlah yang diterima oleh Pemerintah Entitas:

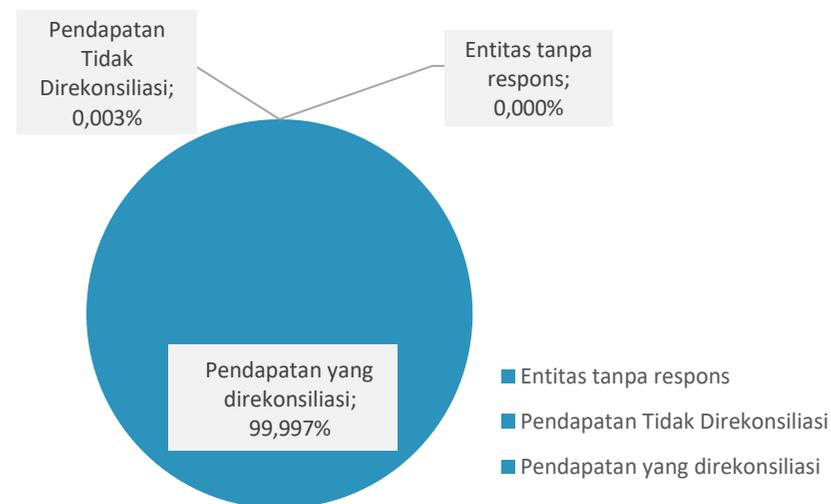
Entitas	Dilaporkan oleh Entitas	Dilaporkan oleh pemerintah	Hasil permintaan awal	Penyesuaian oleh entitas	Penyesuaian oleh pemerintah	Dilaporkan oleh Entitas	Dilaporkan oleh pemerintah	Perbedaan yang tidak direkonsiliasi
BU 12 Aust Pty Ltd	86 424 144	86 583 281	159 137	-	-	86 424 144	86 583 281	159 137
BU 13 Aust Pty Ltd	49 439 674	49 277 487	-162 187	-	-	49 439 674	49 277 487	-162 187
Carnarvon Petroleum Timor Unip Lda	324 125	291 731	-32 394	-80	32 314	324 045	324 045	-
Eni JPDA 03-13 Ltd	51 879 209	51 879 209	-	-	-	51 879 209	51 879 209	-
Eni JPDA 06-105 Pty Ltd	383 099	383 099	-	-	-	383 099	383 099	-
Eni JPDA 11-106 B.V	81 995	150 159	68 164	-	-68 164	81 995	81 995	-
Eni Timor Leste S.P.A	163 986	163 986	-	-	-	163 986	163 986	-
Inpex Sahul Ltd	74 896 910	74 896 910	-	-	-	74 896 910	74 896 910	-
Inpex Timor Sea Ltd	11 611	11 611	-	-	-	11 611	11 611	-
Santos NA Emet Pty Ltd	3 631 967	3 648 395	16 428	-	-16 427	3 631 967	3 631 968	1
Santos NA (19-12) Pty Ltd	76 294 324	78 044 323	1 749 999	-	-1 750 000	76 294 324	76 294 323	-1
Santos NA (19-13) Pty Ltd	22 804 568	22 804 569	1	-	-	22 804 568	22 804 569	1
Santos NA Timor Sea Pty Ltd	33 409 477	33 409 478	1	-	-	33 409 477	33 409 478	1
Santos NA Bayu-Undan Pty Ltd	29 964 235	29 964 236	1	-	-	29 964 235	29 964 236	1
Santos (JPDA 91-12) Pty Ltd	248 222 900	247 547 241	-675 659	-	675 465	248 222 900	248 222 706	-194
Sundagas Banda Unipessoal, Lda	108 016	33 138	-74 878	200	75 078	108 216	108 216	-
TIMOR GAP Onshore Block Unip Lda	25 956	25 680	-276	-	-	25 956	25 680	-276
TIMOR GAP Onshore Block B Unip Lda	188	188	-	-	-	188	188	-
TIMOR GAP Greater Sunrise 03-19	104	1 249	1 145	-	-	104	1 249	1 145
TIMOR GAP Greater Sunrise RL	8 539	5 938	-2 601	-	-	8 539	5 938	-2 601
TIMOR GAP Greater Sunrise RL2	104	-	-104	-	-	104	-	-104
TIMOR GAP Greater Sunrise 03-20	104	1 249	1 145	-	-	104	1 249	1 145
TIMOR GAP Offshore Block Unipessoal	176 810	193 518	16 708	-	-	176 810	193 518	16 708
TIMOR GAP PSC 11-106 Unip Lda	9 629	19 619	9 990	-	-	9 629	19 619	9 990
Timor Resources Pty Ltd	473 886	473 886	-	-	-	473 886	473 886	-
Tokyo Timor Sea Resources	44 087 602	35 614 017	-8 473 585	-8 473 585	-	35 614 017	35 614 017	-
Woodside Energy Pty Ltd	349 940	30 120	-319 820	-	320 000	349 940	350 120	180
Total	723 173 102	715 454 317	-7 718 785	-8 473 465	-731 734	714 699 637	714 722 583	22 946

8.2.6 Perusahaan Ekstraktif – Perbedaan Yang Tidak Dapat Direkonsiliasi

Berdasarkan hasil perhitungan selisih yang tidak direkonsiliasi adalah sebesar USD 22.946, jumlah tersebut dianggap wajar karena hanya sebesar 0,003% dari total pendapatan yang direkonsiliasi.

Entitas	Perbedaan yang tidak direkonsiliasi (USD)
BU 12 Aust Pty Ltd	159 137
BU 13 Aust Pty Ltd	-162 187
Santos NA Emet Pty Ltd	1
Santos NA (19-12) Pty Ltd	-1
Santos NA (19-13) Pty Ltd	1
Santos NA Timor Sea Pty Ltd	1
Santos NA Bayu-Undan Pty Ltd	1
Santos (JPDA 91-12) Pty Ltd	-194
TIMOR GAP Onshore Block Unip Lda	-276
TIMOR GAP Greater Sunrise 03-19	1 145
TIMOR GAP Greater Sunrise RL	-2 601
TIMOR GAP Greater Sunrise RL2	-104
TIMOR GAP Greater Sunrise 03-20	1 145
TIMOR GAP Offshore Block Unipessoal	16 708
TIMOR GAP PSC 11-106 Unip Lda	9 990
Woodside Energy Pty Ltd	180
Total	22 946

Grafik di bawah menunjukkan hasil dan fakta bahwa hampir 100% pembayaran dari operator direkonsiliasi



Rekonsiliasi Pajak Dan Pembayaran Lainnya

8.3 Hasil Umum Rekonsiliasi Pembayaran – Subkontraktor

8.3.1 Pembayaran dari Subkontraktor Minyak & Gas dalam Lingkup – Dilaporkan oleh Pemerintah

Dari 30 subkontraktor yang telah membayar jumlah pajak ke DNRPM, kami telah mengidentifikasi 16 entitas yang telah melakukan pembayaran ke aliran pendapatan) di atas ambang batas kepada entitas Pemerintah dalam ruang lingkup.

Rincian berdasarkan perusahaan dari jumlah penerimaan pajak yang dilaporkan oleh Pemerintah diwakili sebagai berikut:

Entitas	Timor-Leste WIT Karyawan residen dan Timor Leste WIT Karyawan non- Residen	Timor-Leste PE PAJAK WHT dan Timor- Leste bukan-PE PAJAK WHT	PPN - JPDA	Corporate Income Tax	Total yang dilaporkan oleh Pemerintah
Konnekto Unipessoal Lda	134 999	-	-	-	134 999
Brunel Energy Pty Ltd	123 194	-	-	8 576	131 771
Caltech Unipessoal Lda	896 168	27 392	-	114 016	1 037 576
Cameron Services International Pty Ltd	7 778	-	-	560 852	568 629
Cape Australia Onshore Pty Ltd	286 795	-	-	-	286 795
Clough Amec Pty Ltd	1 128 387	183 086	-	323 883	1 635 355
Normant Driff AS Timor, Unipessoal Lda	102 230	-	-	-	102 230
MMA Offshore Vessel Operation Pty	262 545	-	-	-	262 545
Noble Services International Limited	608 794	292 119	-	-	900 912
Noble Contracting II GMBH	45 016	124 277	-	-	169 293
Rigforce Pty Ltd	483 732	567 374	-	-	1 051 106
Santos NA Timor Leste Pty Ltd	343 394	32 327	-	-	375 721
Schlumberger Australia P/L	70 003	4 537	-	110 576	185 115
SGS AUSTRALIA PTY LTD	137 443	-	-	63 313	200 756
Sodexo Timor Unip Lda	194 932	96 110	-	135 284	426 326
Oceaneering Aust Pty Ltd	108 174	-	-	-	108 174
Total	4 933 582	1 327 222	-	1 316 500	7 577 303

8.3 Hasil Umum Rekonsiliasi Pembayaran – Subkontraktor

8.3.2 Subkontraktor – Menyesuaikan Oleh Pemerintah

Di bawah ini ditampilkan perbedaan yang tercatat antara jumlah yang dibayarkan dari subkontraktor minyak dan gas dan jumlah yang diterima oleh Badan Pemerintah.

Entities	Timor-Leste WIT Karyawan residen dan Timor Leste WIT Karyawan non-Residen	Timor-Leste PE PAJAK WHT dan Timor-Leste bukan- PE PAJAK WHT	PPN - JPDA	Corporate Income Tax	APT	Withholding Tax on Services	Total	Catatan
SGS AUSTRALIA PTY LTD	6 397	-	-	10 005	-	-	16 402	1)
Rigforce Pty Ltd	567 374	-	-	- 567 374	-	-	-	2)
Total	6 397	-	-	10 004	-	-	16 402	

1) menyesuaikan jumlah yang dilaporkan oleh Pemerintah untuk SGS AUSTRALIA PTY LTD

Penyesuaian tersebut berkaitan dengan pembayaran Pajak Penghasilan Perusahaan yang dilaporkan Pemerintah sebagai Santos NA Emet Pty Ltd (termasuk biaya bank sebesar USD 25,00).

2) Menyesuaikan jumlah yang dilaporkan oleh Pemerintah untuk Rigforce Pty Ltd

Penyesuaian tersebut berkaitan dengan klasifikasi yang salah berdasarkan jenis pajak.

8.3 Hasil Umum Rekonsiliasi Pembayaran – Subkontraktor

8.3.3 Pembayaran dari subkontraktor Minyak & Gas dalam Lingkup – Dilaporkan oleh Entitas

Rincian oleh perusahaan tentang jumlah penerimaan pajak yang dilaporkan oleh Subkontraktor diwakili sebagai berikut:

Entitas	Timor-Leste WIT Karyawan residen dan Timor-Leste WIT Karyawan non- residen	Timor-Leste PE PAJAK WHT dan Timor-Leste bukan-PE PAJAK WHT	PPN - JPDA	Corporate Income Tax	Total yang dilaporkan oleh entitas
Konnekto Unipessoal Lda	-	-	-	-	-
Brunel Energy Pty Ltd	123 194	-	-	8 576	131 771
Caltech Unipessoal Lda	852 485	27 905	-	69 040	949 430
Cameron Services International Pty Ltd	-	-	-	-	-
Cape Australia Onshore Pty Ltd	286 705	-	-	-	286 705
Clough Amec Pty Ltd	-	-	-	-	-
Normant Driff AS Timor, Unipessoal Lda	-	-	-	-	-
MMA Offshore Vessel Operation Pty	-	-	-	-	-
Noble Services International Limited	-	-	-	-	-
Noble Contracting II GMBH	-	-	-	-	-
Rigforce Pty Ltd	1 047 826	1 237	-	-	1 049 063
Santos NA Timor Leste Pty Ltd	336 634	39 086	-	-	375 719
Schlumberger Australia P/L	-	-	-	-	-
SGS AUSTRALIA PTY LTD	147 448	-	-	69 710	217 158
Sodexo Timor Unip Lda	-	-	-	-	-
Oceaneering Aust Pty Ltd	-	-	-	-	-
Total	2 794 292	68 228	-	147 327	3 009 846

8.3 Hasil Umum Rekonsiliasi Pembayaran – Subkontraktor

8.3.4 Subkontraktor – Menyesuaikan Oleh Entitas

Di bawah ini ditampilkan perbedaan yang tercatat antara jumlah yang dibayarkan dari subkontraktor minyak dan gas dan jumlah yang diterima oleh Badan Pemerintah.

Entitas	Timor-Leste WIT Karyawan residen dan Timor-Leste WIT Karyawan non- residen	Timor-Leste PE PAJAK WHT dan Timor-Leste bukan-PE PAJAK WHT	PPN - JPDA	Corporate Income Tax	APT	Total	Catatan
Caltech Unipessoal Lda	44 306	-	-	43 649	-	87 955	1)
Total	44 306	-	-	43 649	-	87 955	

1) menyesuaikan jumlah yang dilaporkan oleh Caltech Unipessoal Lda

Penyesuaian tersebut sesuai dengan pembayaran sebesar USD 44.305,94 untuk bulan November 2020 (termasuk biaya bank sebesar \$25,00) yang dilakukan pada tanggal 16th Februari 2021. Jumlah sebesar USD 43.649 terkait dengan PPh Badan untuk tahun 2020 yang dibayarkan pada tahun 2021. Entitas tidak melaporkan jumlah tersebut.

8.3 Hasil Umum Rekonsiliasi Pembayaran – Subkontraktor

8.3.5 Subkontraktor – Hasil Rekonsiliasi

Setelah menyesuaikan perbedaan yang diidentifikasi dalam templat yang dikirimkan, kami menghitung total hasil pasca rekonsiliasi. Berikut ini menguraikan perbedaan akhir antara jumlah yang dibayarkan oleh subkontraktor minyak dan gas dan jumlah yang diterima oleh Entitas Pemerintah.

Entitas	Dilaporkan oleh Entitas	Dilaporkan oleh pemerintah	Hasil permintaan awal	Penyesuaian oleh entitas	Penyesuaian oleh pemerintah	Dilaporkan oleh Entitas	Dilaporkan oleh pemerintah	Perbedaan yang tidak direkonsiliasi
Konnekto Unipessoal Lda	-	134 999	134 999	-	-	-	134 999	134 999
Brunel Energy Pty Ltd	131 771	131 771	-	-	-	131 771	131 771	-
Caltech Unipessoal Lda	949 430	1 037 576	88 147	87 955	-	1 037 385	1 037 576	192
Cameron Services International Pty Ltd	-	568 629	568 629	-	-	-	568 629	568 629
Cape Australia Onshore Pty Ltd	286 705	286 795	90	-	-	286 705	286 795	90
Clough Amec Pty Ltd	-	1 635 355	1 635 355	-	-	-	1 635 355	1 635 355
Normant Driff AS Timor, Unipessoal Lda	-	102 230	102 230	-	-	-	102 230	102 230
MMA Offshore Vessel Operation Pty	-	262 545	262 545	-	-	-	262 545	262 545
Noble Services International Limited	-	900 912	900 912	-	-	-	900 912	900 912
Noble Contracting II GMBH	-	169 293	169 293	-	-	-	169 293	169 293
Rigforce Pty Ltd	1 049 063	1 051 106	2 043	-	-	1 049 063	1 051 106	2 043
Santos NA Timor Leste Pty Ltd	375 719	375 721	2	-	-	375 719	375 721	2
Schlumberger Australia P/L	-	185 115	185 115	-	-	-	185 115	185 115
SGS AUSTRALIA PTY LTD	217 158	200 756	-16 402	-	16 402	217 158	217 158	-
Sodexo Timor Unip Lda	-	426 326	426 326	-	-	-	426 326	426 326
Oceaneering Aust Pty Ltd	-	108 174	108 174	-	-	-	108 174	108 174
Total	3 009 846	7 577 303	4 567 457	87 955	16 402	3 097 801	7 593 705	4 495 904

Penting untuk dicatat bahwa jumlah total selisih yang tidak direkonsiliasi mencakup subkontraktor yang tidak menanggapi permintaan. Untuk informasi lebih rinci, lihat Bagian 8.4.6.

8.3 Hasil Umum Rekonsiliasi Pembayaran – Subkontraktor

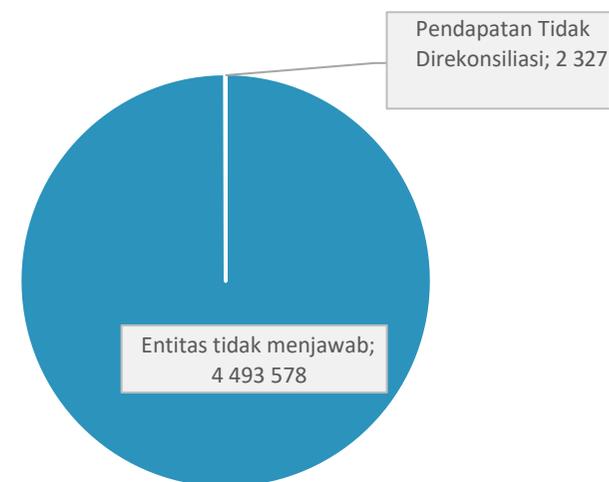
8.3.6 Subkontraktor – Perbedaan Yang tidak direkonsiliasi

Jumlah total selisih awal direpresentasikan sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah di US\$	% Jumlah akhir laporan Pemerintah
Jumlah total yang dilaporkan pada awalnya oleh Pemerintah	7 577 303	100%
Penyesuaian oleh entitas Pemerintah	16 402	0%
Jumlah pajak akhir yang dilaporkan oleh Pemerintah	7 593 705	
Jumlah total yang dilaporkan pada awalnya oleh Subkontraktor	3 009 846	40%
Penyesuaian oleh entitas	87 955	1%
Jumlah pajak akhir yang dilaporkan oleh Subkontraktor	3 097 801	
Entitas tidak menjawab	4 493 578	59%
Jumlah yang tidak dikonsiliasi	2 327	0%

Sebagian besar perbedaan dijelaskan dengan jumlah yang berkaitan dengan entitas yang tidak menjawab templat, dengan total USD 4.493.578. Jumlah ini tidak divalidasi karena kami tidak dapat memperoleh jawaban dari masing-masing entitas.

Jumlah total yang tidak didamaikan berdasarkan jawaban pemangku kepentingan adalah sisa USD 2.327.



■ Entitas tidak menjawab ■ Pendapatan Tidak Direkonsiliasi

8.3 Hasil Umum Rekonsiliasi Pembayaran – Subkontraktor

8.3.6 Subkontraktor–Perbedaan yang tidak direkonsiliasi

Berdasarkan hasil tersebut, selisih yang tidak direkonsiliasi adalah sekitar USD 4.495.904 (dengan memperhitungkan entitas yang tidak melaporkan).

Subkontraktor Perusahaan	Laporan dari Pemerintah	Laporan dari Entitas	Hasil setelah Rekonsiliasi
Perbedaan tidak direkonsiliasi			
Brunel Energy Pty Ltd	131 771	131 771	-
Caltech Unipessoal Lda	1 037 576	1 037 385	192
Cape Australia Onshore Pty Ltd	286 795	286 705	90
Rigforce Pty Ltd	1 051 106	1 049 063	-2 043
Santos NA Timor Leste Pty Ltd	375 721	375 719	-2
SGS AUSTRALIA PTY LTD	217 158	217 158	-
Perbedaan total tidak direkonsiliasi			- 2 327

Catatan: Selama periode rekonsiliasi pendapatan tahun 2021, beberapa subkontraktor baru dipilih dalam cakupan. Masuknya subkontraktor baru ini menyebabkan masalah yang tidak terduga dalam menjalin kontak dengan entitas-entitas baru ini. Administrator Independen dan Sekretariat TL EITI meminta informasi terdaftar dari Kementerian Keuangan mengenai subkontraktor ini. Data tersebut kemudian diedarkan di antara kontraktor yang ada untuk mengumpulkan detail kontak yang diperlukan. Setelah kontak terjalin, templat kemudian disebar ke entitas-entitas untuk mengumpulkan data yang diperlukan.

Namun, meskipun ada upaya yang dilakukan untuk memperlancar komunikasi dan memfasilitasi penyediaan informasi, entitas-entitas tersebut tidak dapat menyediakan data yang diminta secara tepat waktu. Saat ini, inisiatif sedang dilakukan untuk berkolaborasi dengan entitas-entitas ini secara lebih erat guna memastikan penyediaan data penting yang cepat, sehingga mencegah masalah pelaporan seperti itu terulang di masa mendatang.

Subkontraktor Perusahaan	Laporan dari Pemerintah	Laporan dari Entitas	Hasil setelah Rekonsiliasi
Tidak dilaporkan			
Konnekto Unipessoal Lda	134 999	-	134 999
Cameron Services International Pty Ltd	568 629	-	568 629
Clough Amec Pty Ltd	1 635 355	-	1 635 355
Normant Driff AS Timor, Unipessoal Lda	102 230	-	102 230
MMA Offshore Vessel Operation Pty	262 545	-	262 545
Noble Services International Limited	900 912	-	900 912
Noble Contracting II GMBH	169 293	-	169 293
Schlumberger Australia P/L	185 115	-	185 115
Sodexo Timor Unip Lda	426 326	-	426 326
Oceaneering Aust Pty Ltd	108 174	-	108 174
Total tidak dilaporkan			4 493 578
Total jumlah yang tidak direkonsiliasi dan tidak dilaporkan			4 495 904

Rekonsiliasi Pajak dan Pembayaran Lainnya

8.4 Ringkasan Hasil Rekonsiliasi

Grafik berikut menguraikan hasil rekonsiliasi pajak dan bukan-pajak untuk kontraktor dan subkontraktor.

Jumlah yang direkonsiliasi berjumlah 717.797.438 USD baik dalam pendapatan pajak maupun bukan-pajak. Jumlah ini terdiri dari 714.699.637 USD dari kontraktor dan 3.097.801 USD dari subkontraktor.

Jumlah yang tidak direkonsiliasi sebesar 25.273 USD diperhitungkan oleh 22.946 USD dari kontraktor dan 2.327 USD dari subkontraktor.

Entitas yang gagal melapor menyumbang sebesar USD 4.493.578, yang mencakup kontraktor dan subkontraktor. Entitas yang tidak masuk dalam cakupan memiliki nilai total sebesar USD 521.826.

Jumlah Total	Jumlah dalam USD	%
Kontraktor - pendapatan direkonsiliasi	714 699 637	99%
Kontraktor - pendapatan tidak direkonsiliasi	22 946	0%
Kontraktor - Entitas tanpa respons	-	0%
Kontraktor - Entitas yang tidak termasuk dalam ruang lingkup	3 097 801	0%
Subkontraktor - pendapatan direkonsiliasi	2 327	0%
Subkontraktor - pendapatan tidak direkonsiliasi	4 493 578	1%
Subkontraktor - Entitas tanpa respons	521 826	0%
TOTAL	722 838 115	100%

Grafik di bawah ini menunjukkan jumlah total dalam persentase yang mempertimbangkan kontraktor dan subkontraktor.



Rekonsiliasi Pajak dan Pembayaran Lainnya

8.5 Biaya Pipa

Laporan Petroleum fund mencakup jenis penerimaan lain berikut untuk tahun fiskal yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021:

Jumlah Total Penerimaan Lainnya yang dilaporkan dalam PF	Jumlah dalam USD
Development service fee	914 550
Pipeline fee	5 811 200
Penyesuaian penerimaan wajib pajak dalam pasal 6.1 (e)	2 497 474
Total	9 223 224

Pada tahun 2021, Biaya Pipa sebesar 5.811.200 USD ditransfer ke Petroleum fund oleh Banco Central de Timor Leste (BCTL). Pembayaran ini dilakukan pada bulan September 2021. Kami memperoleh contoh dari BCTL yang mengonfirmasi jumlah ini.

Selain itu, menurut tanda terima yang diungkapkan oleh Petroleum fund selama tahun 2021, BCTL menerima 914.550 USD dalam development fee dan 2.497.474 USD lainnya untuk berbagai tanda terima lainnya. Jumlah ini kemudian ditransfer ke Petroleum fund.

Menurut angka terperinci yang diberikan oleh BCTL, jumlah ini terkait dengan biaya yang termasuk dalam contoh ANPM. Selama proses rekonsiliasi, jumlah ini diperhitungkan saat menyelesaikan perbedaan dalam tanggapan dari entitas yang terkait dengan pendapatan bukan pajak.

Rekonsiliasi Pajak dan Pembayaran Lainnya

8.6 Pembayaran di sektor pertambangan

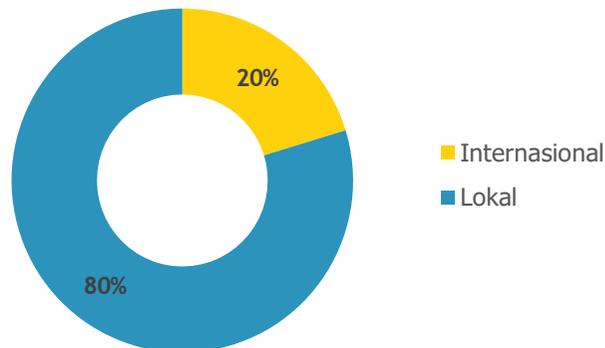
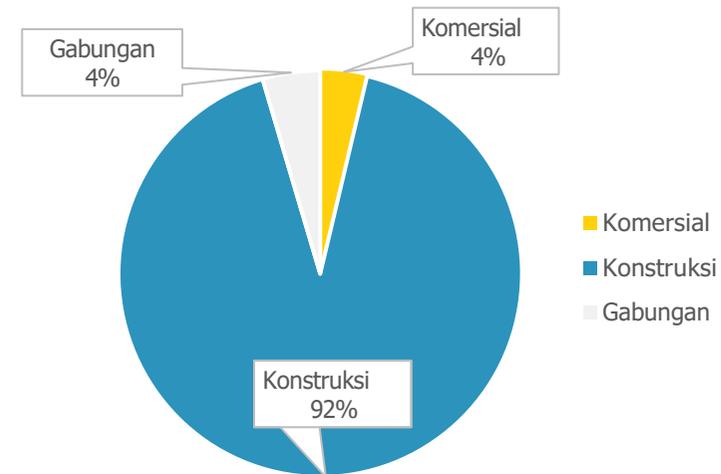
Kami telah menghubungi ANPM untuk memahami perusahaan mana yang membayar jumlah di atas ambang batas (USD 100.000) pada tahun 2021, yang dirangkum dalam tabel berikut.

Nama pihak pengusul	Jumlah Total yang Dibayarkan (USD \$)
China HarbourTimor Lda.	1 031 704,19
CBMI Construction Co., & Chongqing Road Engineering (Group) Co., Lda.	541 755,20
Hoven II Unip., Lda.	133 038,78

Kami juga telah memperoleh rincian pembayaran yang diterima oleh badan pemerintah ini pada tahun 2021 (lihat Lampiran C). Menurut keputusan Menteri No. 64/2016 tanggal 16 November, kegiatan-kegiatan ini diatur sebagai pertambangan, yang menjadi alasan ANPM melaporkannya di sektor pertambangan. Selain itu, menurut informasi yang diberikan oleh ANPM mengenai pembayaran di sektor pertambangan, asalnya adalah 80% (USD 1.573.459,39) internasional dan 20% (USD 400.417,87) lokal.

Lebih jauh, ada tiga jenis kegiatan: konstruksi, komersial, dan campuran. Yang pertama berkaitan dengan badan usaha yang membayar bahan bangunan untuk menyelesaikan proyek yang

terkait dengan pertambangan, dan yang kedua berkaitan dengan badan usaha yang menjual bahan kepada publik untuk tujuan komersial. Yang terakhir berkaitan dengan campuran dari kedua kegiatan tersebut.

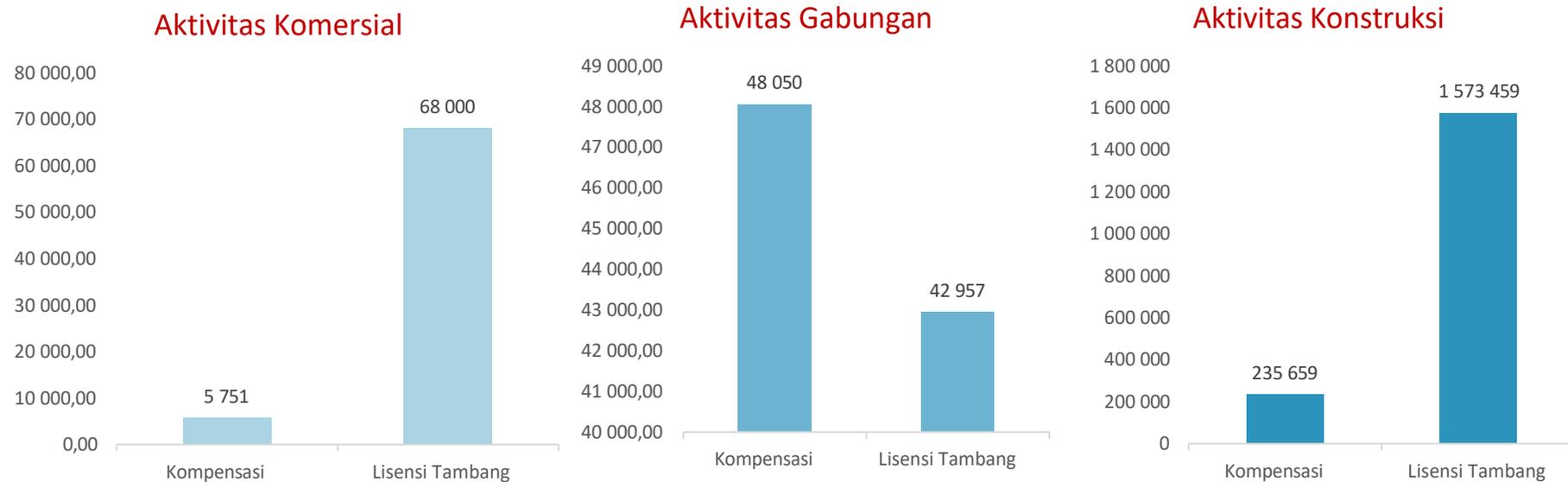


Rekonsiliasi Pajak dan Pembayaran Lainnya

8.6 Pembayaran di Sektor Pertambangan

Mengenai jenis pembayaran, ada pembayaran izin pertambangan (termasuk biaya pertambangan dan izin) dan pembayaran kompensasi (termasuk biaya yang dibayarkan untuk kegiatan yang tidak sah). Ada juga biaya permukaan tahunan, yang terkait dengan kegiatan eksplorasi.

Di bawah ini disajikan jenis pembayaran mengenai setiap kegiatan dalam USD:



Lisensi pertambangan menyumbang 85% dari total pembayaran, yaitu sebesar 1.684.416,49 USD, namun kompensasi menyumbang 15% dari total pembayaran (289.460,77 USD).

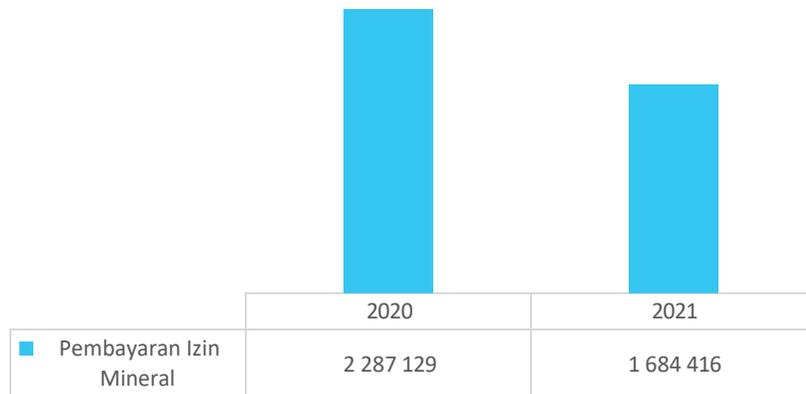
Rekonsiliasi Pajak dan Pembayaran Lainnya

8.6 Pembayaran di Sektor Pertambangan

Dibandingkan dengan tahun 2020, pembayaran iuran izin pertambangan mengalami penurunan sebesar USD 602.713.

Penting untuk dipahami bahwa pembayaran ini terdiri dari dua jenis iuran utama. Pertama, iuran Iuran Pertambangan yang diamanatkan dalam Pasal 8 DM No. 64/2016, tanggal 16 November. Kedua, Yang kedua adalah pembayaran Biaya Lisensi, yang diatur dalam Pasal 7 peraturan yang sama.

Pembayaran Izin Mineral



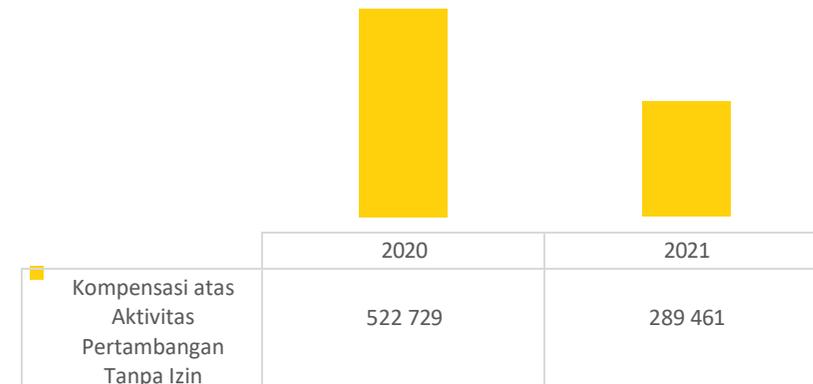
Terkait dengan izin pertambangan, ada tiga entitas yang membayar biaya di atas USD 100.000, namun terkait dengan kegiatan konstruksi.

sebagai diamanatkan oleh Pasal 42.2 keputusan menteri No. 64/2016 pada 16 November, tidak dimulai sampai tahun 2017.

Pada tahun 2020, total pembayaran tersebut mencapai USD 522.729. Ini termasuk kontribusi lebih dari USD 100.000 dari dua entitas yang bergerak dalam kegiatan terkait konstruksi.

Pada tahun 2021, jumlah totalnya menurun lagi menjadi USD 289.461, termasuk tiga entitas di atas USD 100.000, yang kegiatannya juga terkait dengan konstruksi.

Kompensasi atas Aktivitas Pertambangan Tanpa Izin





Beneficial Ownership (BO)

9

Menurut persyaratan EITI 2.5, disarankan agar informasi tersedia untuk umum mengenai (BO) dari badan usaha yang mengajukan penawaran, mengoperasikan, atau berinvestasi dalam aset ekstraktif, termasuk identitas (BO), tingkat ownership, dan rincian tentang bagaimana ownership atau kendali dilakukan.

Di Timor-Leste, mayoritas Operator yang tercakup (bekerja di wilayah JPDA dan TLEA) adalah anak perusahaan dari perusahaan yang terdaftar secara publik di Bursa Efek. Bagi mereka diharapkan sumber dan informasi ownership sudah tersedia.

Namun, kebijakan dan praktik hukum mengenai pengungkapan beneficial ownership (BO) (sektor minyak, gas, dan pertambangan) masih hanya sebagian yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Hambatan hukum dan praktis mungkin muncul di sektor-sektor ini – tergantung pada kedalaman informasi beneficial ownership yang akan diungkapkan, untuk laporan berikutnya MSGW menganggap relevan untuk memperluas permintaan informasi BO kepada subkontraktor dan memperluas permintaan kepada PEP para pemangku kepentingan.

9. Beneficial Ownership

9.1 Kebijakan Pemerintah Dan Kerangka Hukum

Sesuai dengan Persyaratan 2.5, Timor-Leste diharuskan untuk mengungkapkan beneficial owners dari semua perusahaan yang memegang atau mengajukan permohonan izin ekstraktif. Lebih jauh, para pemangku kepentingan harus dapat mengidentifikasi siapa yang memiliki dan mengendalikan perusahaan yang beroperasi di industri ekstraktif negara tersebut, untuk membantu mencegah praktik yang tidak benar dan korup dalam pengelolaan sumber daya ekstraktif dan untuk memantau perusahaan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh orang-orang yang memiliki pengaruh politik.

Mengenai risiko korupsi Timor-Leste, perlu disebutkan bahwa Timor-Leste telah menjadi anggota Grup Asia/Pasifik untuk Pencucian Uang (APG) sejak Juli 2008. Tujuan APG adalah untuk memastikan bahwa masing-masing anggota secara efektif menerapkan standar internasional terhadap pencucian uang, pendanaan teroris dan pendanaan proliferasi yang terkait dengan senjata pemusnah massal.

Evaluasi terakhir Timor-Leste dilakukan oleh APG pada tahun 2012. Laporan evaluasi berikutnya, yang diberi label "Laporan Evaluasi Bersama - Putaran ke-2 (2005-2012)", dirilis pada bulan Juli 2012⁴³.

Pada tanggal 7th Oktober 2016, pemerintah Timor-Leste membagikan dokumen publik yang mencakup Evaluasi Nasional pertama mereka tentang Risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris. Dokumen ini juga menyajikan Rencana Strategis Nasional 2016-2020 untuk melawan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Rencana ini terdiri dari 10 tujuan strategis, lengkap dengan jadwal tindakan dan badan yang bertanggung jawab untuk pelaksanaannya, sehingga memudahkan warga negara untuk menganalisis tindakan pemerintah yang bertentangan dengan latihan yang dievaluasi bersama.

10 tujuan strategis tersebut adalah:

- Mengembangkan dan menerapkan kerangka kebijakan nasional Anti Pencucian Uang/Penanggulangan Pendanaan Terorisme (AML/CFT) yang kuat;
- Memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang risiko pencucian uang dan pendanaan teroris di negara ini;
- Menyelaraskan kerangka hukum untuk mengatasi pencucian uang dan pendanaan teroris dengan standar internasional;
- Meningkatkan kapasitas penegak hukum, penuntutan, dan otoritas peradilan untuk meningkatkan penyelidikan, penuntutan, dan pemidanaan atas pencucian uang dan kejahatan terkait;
- Membangun kapasitas badan pengawas untuk menjaga kepatuhan sektor keuangan dan DNFBP terhadap tindakan pencegahan pencucian uang dan pendanaan teroris;
- Memperkuat penerapan tindakan pencegahan Anti Pencucian Uang/Penanggulangan Pendanaan Terorisme AML/CFT oleh lembaga keuangan dan Bisnis dan Profesi Non-Keuangan Tertentu (DNFBP);
- Meningkatkan kemampuan UIF untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyebarluaskan laporan transaksi mencurigakan dan transaksi mata uang untuk penyelidikan yang lebih baik terhadap pencucian uang dan pendanaan teroris;
- Meningkatkan transparansi beneficial ownership badan hukum dalam yurisdiksi;
- Meningkatkan kerja sama di tingkat nasional dan internasional antara otoritas yang berwenang untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris;

⁴³ Sumber: [Timor Leste \(fatf-qafi.org\)](http://fatf-qafi.org)

- Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melawan pencucian uang dan pendanaan teroris.

Sasaran strategis ini dikoordinasikan oleh Komisi Nasional untuk Pelaksanaan Langkah-Langkah Pemberantasan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (juga dikenal sebagai Komisi Nasional Pemberantasan Pencucian Uang atau CNCBC dalam bahasa Portugis), yang telah mendapat persetujuan dari Dewan Menteri. Komisi ini memprogramkan pelaksanaan rekomendasi dan praktik terbaik sebagaimana yang digariskan oleh FATF, suatu badan antarpemerintah yang bertanggung jawab atas standar internasional untuk mencegah dan memberantas pencucian uang, pendanaan teroris, dan penyebaran senjata pemusnah massal. CNCBC juga memimpin partisipasi Timor-Leste dalam Kelompok Asia/Pasifik tentang Pencucian Uang⁴⁴.

Mengenai posisi Timor-Leste dalam Indeks Persepsi Korupsi, telah terjadi peningkatan berkelanjutan sejak tahun 2012, ketika negara tersebut memperoleh skor pertama sebesar 33. Dalam 3 tahun terakhir, kemajuan berikut telah diamati⁴⁵:

- Pada tahun 2020, Timor-Leste memperoleh skor 40/100 dan naik peringkat ke posisi 86/180;
- Pada tahun 2021, Timor-Leste memperoleh skor 41 dan naik peringkat ke posisi 82/180;
- Pada tahun 2022, Timor-Leste memperoleh skor 42/100 dan naik peringkat ke posisi 77/180.

Perlu diketahui bahwa skor masing-masing negara merupakan gabungan dari setidaknya 3 sumber data yang diambil dari 13 survei dan penilaian korupsi yang berbeda. Sumber data ini dikumpulkan oleh berbagai lembaga terkemuka, termasuk Bank Dunia dan Forum Ekonomi Dunia.

⁴⁴ Sumber: [Government publishes national evaluation on money laundering "Government of Timor-Leste"](#)

⁴⁵ Sumber: [2021 Corruption Perceptions Index - Explore... - Transparency.org](#)

Data yang disebutkan di atas menunjukkan tren positif di negara tersebut dan progresif dalam penerapan rekomendasi dan praktik terbaik yang dikeluarkan oleh FATF.

Evaluasi berikutnya terhadap Timor-Leste dijadwalkan untuk disetujui pada Pertemuan Tahunan Kelompok Asia/Pasifik tentang Pencucian Uang (APG) pada tahun 2024. Sepanjang tahun 2023, Timor-Leste mengambil bagian dalam kegiatan simulasi atau sesi tiruan untuk mempersiapkan evaluasi di tempat oleh Kelompok Asia/Pasifik tentang Pencucian Uang⁴⁶.

Perlu dicatat bahwa salah satu masalah yang paling menantang dalam mengidentifikasi beneficial ownership di Timor-Leste, serta di negara-negara lain yang telah memperkenalkan sistem ini, adalah keandalan data dan kemungkinan untuk memverifikasinya. Pada saat yang sama, di Timor-Leste, mayoritas Operator yang tercakup (bekerja di wilayah JPDA dan TLEA) adalah anak perusahaan dari perusahaan yang terdaftar secara publik di Bursa Efek, sehingga memungkinkan pengawasan publik.

Proses pendaftaran perusahaan di Timor-Leste menghadirkan lanskap yang kompleks, meskipun sedang mengalami transformasi yang menjanjikan. Pembentukan "pusat layanan terpadu" baru, Layanan Pendaftaran dan Verifikasi Bisnis (SERVE), telah mengambil alih tanggung jawab untuk mendaftarkan semua bisnis, mulai dari pedagang tunggal hingga perusahaan besar.

SERVE secara resmi didirikan pada tanggal 22 Maret 2017, melalui Keputusan-Undang-Undang No. 7/2017 yang bertujuan untuk memperkuat praktik pendaftaran komersial. Sebagai lembaga publik, SERVE memiliki otonomi administratif, keuangan, dan patrimonial serta diawasi oleh pejabat pemerintah yang ditunjuk dengan tanggung jawab terkait pembangunan ekonomi. Portofolio tanggung jawab unit ini meliputi penerimaan dan pemeriksaan dokumen pendaftaran yang diperlukan, memfasilitasi proses perolehan lisensi untuk

⁴⁶ Sumber: [Executive Director of SERVE.I.P. present on the mock session of money laundering – SERVE.I.P.](#)

Sumber: [SERVE.I.P. participates on the program for "Money Laundering" – SERVE.I.P.](#)

kegiatan ekonomi, dan pengelolaan pendaftaran komersial serta basis data perizinan.

Namun, masih ada kesenjangan yang signifikan. Pendaftaran perusahaan saat ini tidak memberlakukan kewajiban apa pun kepada perusahaan untuk mengungkapkan rincian beneficial ownership pada saat pembentukannya. Kelalaian ini tidak hanya membuat sistem tidak transparan tetapi juga membuka jalan bagi penggunaan perusahaan yang tidak sah, seperti pencucian uang.

Singkatnya, meskipun Timor-Leste telah membuat langkah signifikan dalam merampingkan proses pendaftaran perusahaan, tidak adanya mekanisme untuk mendokumentasikan dan mengungkapkan informasi beneficial ownership menimbulkan kekhawatiran tentang transparansi perusahaan. Hal ini menyoroti kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kerangka kerja yang ada guna meningkatkan transparansi dan untuk membuat daftar informasi legal atau beneficial ownership.

Saat ini, tanggung jawab pengumpulan dan verifikasi informasi BO berada di tangan perusahaan ekstraktif dan IA.

Perkembangan Pengungkapan Beneficial ownership

Pada bulan Maret 2017, Kelompok Kerja Multi-Pemangku Kepentingan (MSWG) menerbitkan peta jalan Beneficial ownership, yang mendokumentasikan kegiatan dan tindakan menuju pengungkapan beneficial ownership penuh dari perusahaan ekstraktif di negara tersebut.

Pada bulan Oktober 2019, EY Portugal menyusun draft Studi Kelayakan tentang Beneficial ownership dengan rekomendasi terkait penerapan BO di Timor-Leste. Laporan ini selesai pada bulan Juli 2020.

Untuk tahun 2020, entitas mengikuti rekomendasi IA. Selain itu, MSWG membagikan templat tersebut dengan EITI Internasional dan menjamin pengumpulan informasi yang diperlukan untuk kepatuhan terhadap EITI standard. Definisi BO dan PEP disetujui oleh MSWG dan diungkapkan pada templat yang dikirimkan kepada entitas yang tercakup dalam Laporan EITI 2020 Timor-Leste

Namun, selama validasi terakhir Timor-Leste, sekretariat Internasional menilai bahwa Persyaratan 2.5 sebagian telah terpenuhi⁴⁷. Dewan EITI menyatakan bahwa Timor-Leste telah membuat kemajuan dalam membangun kerangka hukum untuk mengumpulkan, meskipun tidak mengungkapkan, data beneficial ownership. Kesenjangan dalam pengungkapan sebagian telah diatasi melalui pelaporan EITI. Meskipun, Dewan EITI menyatakan bahwa pengungkapan oleh perusahaan yang diminta untuk data BO bersifat parsial. Dewan EITI menyimpulkan bahwa MSWG belum menilai keandalan atau kelengkapan pengungkapan BO.

Menyusul rekomendasi sekretariat Internasional EITI, sebuah rencana aksi dikembangkan dan dilaksanakan untuk secara efektif mengatasi persyaratan 2.5. Rencana ini ditujukan untuk meningkatkan transparansi beneficial ownership dalam sektor pertambangan, yang bobot ekonominya terus tumbuh.

IA berfokus pada perluasan cakupan informasi pengungkapan untuk menyertakan subkontraktor, sehingga meningkatkan efektivitas pengungkapan BO. Dengan secara aktif meminta informasi terperinci dari subkontraktor dan memastikan keakuratannya, kami berhasil memperkuat cakupan data yang dilaporkan.

Sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan kualitas dan keandalan pengumpulan data BO, AI melakukan penilaian menyeluruh terhadap pengungkapan beneficial ownership dari semua perusahaan yang saat ini memegang lisensi minyak dan gas.

Terakhir, untuk kelengkapan dalam pengumpulan informasi Beneficial Ownership (BO) untuk Laporan EITI 2021, kami menyertakan tabel yang merinci jumlah total kontraktor dan subkontraktor yang telah menyerahkan data BO mereka. Pendekatan komprehensif untuk menangani Persyaratan 2.5 ini telah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas secara signifikan, sebagaimana dipandu oleh Sekretariat Internasional.

Namun demikian, hambatan signifikan dalam penerapan Persyaratan 2.5 secara menyeluruh adalah tidak adanya pencatatan perusahaan yang mencatat Beneficial Ownership Utama dari semua entitas

⁴⁷ Sumber: [Timor-Leste 2022 Validation Report](#)

perusahaan. Untuk memajukan inisiatif ini, Kelompok Kerja Multi-Pemangku Kepentingan (MSWG) didorong untuk menjadwalkan pertemuan guna membahas subjek ini secara mendalam.

Keterlibatan dari entitas-entitas kunci seperti Bank Sentral, Unit Informasi Keuangan, dan SERVE akan sangat penting, karena mereka berpotensi menjadi pemangku kepentingan yang penting dalam isu ini.

Nama perusahaan	Ultimate Beneficial Owner	Catatan	Tautan
Eni JPDA 03-13 Ltd Eni JPDA 06-105 Pty Ltd Eni JPDA 11-106 B.V Eni Timor Leste S.P.A	Eni S.p.A.	Eni terdaftar di Bursa Efek New York (NYSE) dan FTSE MIB di Bursa Efek Milan.	Sumber: Source: Eni shares (www.eni.com)
Santos NA Emet Pty Ltd Santos NA Timor Leste Pty Ltd Santos NA (19-12) Pty Ltd Santos NA (19-13) Pty Ltd Santos NA Timor Sea Pty Ltd Santos NA Bayu-Undan Pty Ltd Santos (JPDA 91-12) Pty Ltd	Santos Ltd	Santos adalah perusahaan gas alam Australia. Santos adalah pemilik utama semua entitas sejak 28 Mei 2020, sebelum tanggal ini semua entitas kecuali Santos (JPDA 91-12) Pty Ltd dimiliki oleh ConocoPhillips. Santos Ltd terdaftar di Bursa Efek Australia (ASX); dan mulai 13 Desember 2021 Santos Ltd juga terdaftar di Bursa Efek Nasional PNG (PNGX) - lihat keputusan pencatatan: https://www.pngx.com.pg/pngx-market-announcement-listing-application-decision/	Sumber: SHAREHOLDER INFORMATION (Santos.com) ; https://www.asx.com.au/markets/company/sto ; and PNGX https://www.pngx.com.pg/santos-limited/
Inpex Sahul Ltd Inpex Timor Sea Ltd	INPEX CORPORATION	INPEX CORPORATION memegang 100% saham INPEX Timor Sea, Ltd; INPEX CORPORATION memegang 100% saham INPEX Sahul, Ltd.	Sumber: Share Data (Inpex.co.jp)
Carnarvon Petroleum Ltd	Carnarvon Energy Ltd	Carnarvon adalah perusahaan publik Australia yang terdaftar di Bursa Efek Australia.	Sumber: Investor Data (Carnarvon.com)
TIMOR GAP Onshore Block Unip Lda TIMOR GAP Onshore Block B Unip Lda TIMOR GAP Greater Sunrise 03-19 TIMOR GAP Greater Sunrise RL TIMOR GAP Greater Sunrise RL2 TIMOR GAP Greater Sunrise 03-20	TIMOR GAP, E.P.	Badan Usaha Milik Negara.	Sumber: www.timorgap.com

Nama perusahaan	Ultimate Beneficial Owner	Catatan	Tautan
TIMOR GAP Offshore Block Unipessoal TIMOR GAP PSC 11-106 Unip Lda			
Tokyo Timor Sea Resource Pty Ltd	Tokyo Gas Co. Ltd (33,33%). Tokyo Electric Power Company Holdings Inc (33,33%). Chubu Electric Power Co. Inc (33%)	Tokyo Gas Co. Ltd, Tokyo Electric Power Company Holdings Inc dan Chubu Electric Power Co. Inc adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Tokyo.	Sumber: Stock and Bond Information (www.tokyo-gas.co.jp)
Woodside Petroleum (Timor Sea 19) Pty Ltd Woodside Petroleum (Timor Sea 20) Pty Ltd	Woodside Petroleum Ltd	Woodside Petroleum (entitas) sepenuhnya dimiliki oleh Woodside Petroleum Ltd, yang juga merupakan perusahaan induk utama dari grup perusahaan Woodside. Woodside Petroleum Ltd adalah perusahaan publik Australia yang terdaftar di Bursa Efek Australia.	Sumber: Investors (www.woodside.com.au)
Brunel Energy Pty Ltd	Brunel International NV	Brunel Australia Holdings Pty Ltd (Brunel Australia Holdings dimiliki oleh Brunel Energy Holding BV dan pada akhirnya dimiliki oleh Brunel International NV).	Sumber: Source: Stock Information (www.brunelinternational.net)
SGS AUSTRALIA PTY LTD	SGS SA	SGS Australia adalah anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh perusahaan induk utama SGS SA, sebuah perusahaan publik yang terdaftar di Swiss	Sumber: Investor Relations (www.sgs.com)
BU 12 Aust Pty Ltd BU 13 Aust Pty Ltd	SK Inc.	BU13 Australia Pty Ltd dan BU12 Australia Pty Ltd keduanya dimiliki sepenuhnya oleh SK E&S Co., Ltd, sebuah perusahaan Korea Selatan. Perusahaan ini sendiri 90% sahamnya dimiliki oleh SK Inc., sebuah perusahaan publik di Bursa Efek Korea, dan 10% dimiliki oleh investor ekuitas swasta. Per 31 Desember 2021, baik BU13 maupun BU12 masing-masing memiliki satu saham biasa yang dibayar penuh, yang dimiliki langsung oleh SK E&S Co., Ltd.	Sumber: www.sk-inc.com

Nama perusahaan	Ultimate Beneficial Owner	Catatan	Tautan
Timor Resources Pty Ltd	BO 1: Lyndall Margaret Fuller (48%); BO 2: Suellen Osborne (40%)	BO memiliki entitas tersebut melalui entitas-entitas berikut: VICTORIA PARK INVESTMENTS (48%) NEPEAN RESOURCES (12%) Nepean Resources Australia Pty Ltd (40%)	Sumber: www.timorresources.com.au
SundaGas Banda Unipessoal Ltd	BO 1: Andrew John Butler (33,33%) BO 2: Paul William Bernard Ebdale (33,33%) BO 3: Baron Oil Plc (33,33%)	Baron Oil Plc mengakuisisi sisa 66,67% saham SundaGas, dengan kepemilikan 100% di entitas tersebut	Sumber: Share Information (baronoilplc.com)
Rigforce Pty Ltd	BO 1: Alastrair Haldane (50%); BO 2: Conor O'Brien (50%) - country of residence Australia	Rigforce Pty Ltd adalah subkontraktor yang dimiliki oleh perusahaan non-terdaftar bernama INTERPEOPLE HOLDINGS PTY LTD (ABN 78144 910 789)	-
Caltech Unipessoal Lda	BO 1: Sheilla Abilio Corte Real De Caldas (Nationality: Timor-Leste; Residencial: BIDAU LECIDERE, NAIN FETO, DILI, TIMORE LESTE) - 100% owner	Caltech Unipessoal Lda adalah subkontraktor yang dimiliki oleh perusahaan yang tidak terdaftar	-

Tabel berikut merangkum hasil pengumpulan data tentang Beneficial Ownership:

Informasi tentang Beneficial Ownership		Number
Perusahaan diharuskan untuk mengkomunikasikan informasi tentang Beneficial Ownership	Jumlah perusahaan yang telah memberikan informasi lengkap tentang Beneficial Owners	4
Perusahaan tidak diharuskan melaporkan informasi tentang Beneficial Ownership	Perusahaan yang terdaftar	20
	Kelompok perusahaan milik negara	8
Total		32

Di antara operator, 100% perusahaan mengungkapkan beneficial ownership mereka atau tentang perusahaan publik tempat mereka menjadi anak perusahaan. Namun, hanya 12,5% subkontraktor yang menanggapi pada templat.

Berdasarkan templat yang diserahkan oleh kontraktor dan subkontraktor, tidak ada PEP yang diidentifikasi di salah satu entitas. Secara keseluruhan, hal ini sejalan dengan harapan MSWG.

Beneficial Ownership

9.2 Kualitas Data

Untuk tahun 2021, entitas mengikuti rekomendasi IA. Selain itu, MSGW meminta informasi lebih lanjut untuk entitas yang tercakup.

MSGW membagikan templat tersebut dengan EITI Internasional dan menjamin pengumpulan informasi yang diperlukan untuk kepatuhan terhadap EITI standard. Informasi berikut diminta:

- Rincian yang diminta dari BO, yang meliputi nama lengkap, nomor identifikasi, ID pajak (tax ID), tanggal lahir, kewarganegaraan, alamat tempat tinggal atau kantor, dan sarana kontak.
- Informasi mengenai apakah BO adalah PEP (Political Expose Person), anggota keluarga, atau rekan dekat salah satu PEP.

Tabel berikut merupakan bagian dari templat yang dikirimkan ke entitas-entitas dalam ruang lingkup Laporan EITI Timor-Leste tahun 2021:

Beneficial Owner number 1 or, in its absence a Top Manager	Description
Full name	
ID information	
Identification number	
Identification Type	
ID validity date	
Issuing entity of the ID	
Information about how ownership is held or control over the company is exercised	
number of shares	
% of shares	
% of direct voting rights	
% of indirect voting rights	
Other	
Date when beneficial interest was acquired	
Date	
Means of contact	
General information	
Taxpayer identification number	
Date of birth	
Nationality as stated in the ID	
Country of permanent residence	
Country of fiscal domicile	
Residential or service adress	
Public office position and role:	
Date when office was assumed:	
Date when office was left, if applicable:	

Political Exposed Person(s)	
Is the beneficial owner a Politically Exposed Person (PEP) ?	Yes / Not
Is the beneficial owner a family member of a PEP?	Yes / Not
If yes	
Name:	
Relationship:	
Date of birth:	
Place of birth:	
Nationality:	
Position that qualifies you as PEP:	

Is the beneficial owner a Person known to be close associate of a PEP ?	Yes / Not
If yes	
Name:	
Relationship:	
Date of birth:	
Place of birth:	
Nationality:	
Position that qualifies you as PEP:	

Beneficial Ownership

9.2 Kualitas Data

Definisi BO dan PEP telah disetujui oleh MSWG dan diungkapkan pada templat yang dikirimkan ke entitas yang termasuk dalam cakupan Laporan EITI Timor-Leste tahun 2021, sebagai berikut:

Beneficial ownership definition

Beneficial owner is the natural person or persons who ultimately own or control an entity, and or the natural person or persons on whose behalf a transaction or activity is carried out taking into consideration at least the following criteria:
control:

If the counterpart is a corporate legal entity, the beneficial owners are as follows:

Criteria for determining ownership or control:

a) Criteria based on Capital

The natural person or persons who ultimately own or control, directly or indirectly, more than 25% of the share capital or voting rights of the legal entity;

A natural person or persons who, while not owning or directly or indirectly controlling more than 25%, jointly own more than 25% of the share capital or voting rights, when they are family members or have a close relationship that justifies the joint assessment;

The natural person or persons holding top management positions, after all other criteria have been exhausted and provided that there are no grounds for suspicion.

Please note that a natural person is defined as a Timorese or any person without taking into account their nationality.

b) Criteria based on other control indicators:

Control of the majority of the votes exercisable at the ordinary shareholders' meetings;

Sufficient votes to exercise dominant influence in the ordinary shareholders' meetings;

Having the right to appoint or remove a majority of the members of the administrative, management or supervisory bodies;

Existence of particular contractual provisions that allow to exercise a dominant influence;

Criteria of Administration/effective control:

The person or natural persons holding the top management position or positions, if after all possible means have been exhausted and provided there is no reason to suspect, no person has been identified under the above criteria, or if there is any doubt that the person or persons identified are the beneficial owners;

If the counterpart is a non-corporate legal person (Foundations, Trusts or Associations) or a collective interest center without legal personality, the beneficial owners are as follows:

The founder (settlor)

The administrator (trustee, in case of trust funds)

The curator, if applicable;

Beneficiaries or, if they have not yet been determined, the category of persons in whose main interest the entity has been incorporated or is active.

Any other natural person who has ultimate control of the entity through direct or indirect participation or through other means.

"Politically Exposed Person" definition (PPE) as well as "Close Family Members" and "Persons known to be close associates"

The political persons are persons who have held, or have performed in the last 12 months, in any country or jurisdiction, the following higher public functions:

- i. Heads of State, Heads of Government and members of the Government, namely Ministers, Secretaries and Undersecretary of State or equivalent;
- ii. Members of Parliament;
- iii. Judges of the Constitutional Court, the Supreme Court of Justice, the Supreme Administrative Court, the Court of Auditors, and members of supreme courts, constitutional courts and other high-level judicial bodies from other States and international organizations;
- iv. Representatives of the Republic and members of self-governing bodies of autonomous regions;
- v. Ombudsman, State Councilors, and members of the National Data Protection Commission, the Superior Council of the Judiciary, the Superior Council for Administrative and Tax Courts, the Attorney General's Office, the Superior Council of the Public Prosecutor's Office, the Superior Council for National Defense, the Economic and Social Council, and the Regulatory Entity for Social Communication;
- vi. Heads of diplomatic missions and consular posts;
- vii. General Officers of the Armed Forces in effective service;
- viii. Presidents and city councilmen with executive functions of city councils;
- ix. Members of central bank administrative and supervisory bodies, including the European Central Bank;
- x. Members of administrative and supervisory bodies of public institutes, public foundations, public establishments and independent administrative bodies, whatever their designation;
- xi. Members of management and supervisory bodies of entities belonging to the public enterprise sector, including the business, regional and local sectors;
- xii. Members of the executive bodies of political party leadership at the national or regional level;
- xiii. Directors, deputy directors and members of the board of directors or persons performing equivalent functions in an international organization,

The Close family members are:

- i. Direct ascendants and descendants of a politically exposed person;
- ii. The spouses or unmarried persons of a politically exposed person and of the persons referred to in the previous sub-item;

The Persons known to be close associates:

- i. Any natural person, known as a co-owner, with a person politically exposed, a legal person or a collective interest center without legal personality;
- ii. Any natural person who owns share capital or holds voting rights of a legal person, or assets of a center of collective interests without legal personality, known as having a beneficial owner politically exposed person;
- iii. Any natural person, known as having corporate, commercial or professional relations with a politically exposed person;

An aerial view of an offshore oil rig in the middle of a vast, blue ocean under a cloudy sky. The rig is a complex of metal structures, including two tall derrick towers. A smaller red and white vessel is visible in the lower-left corner.

10

Mainstreaming

Persyaratan pengungkapan EITI dipenuhi melalui pelaporan perusahaan dan pemerintah yang rutin dan tersedia untuk umum. Ini dapat mencakup memungkinkan akses ke data EITI melalui pelaporan keuangan publik, laporan tahunan perusahaan atau lembaga pemerintah, portal informasi, dan data terbuka lainnya dan inisiatif kebebasan informasi. Perhatian utama adalah memastikan bahwa data yang dipublikasikan komprehensif dan dapat diandalkan.

Tujuan utama, dan metodologi yang diharapkan digunakan untuk menerbitkan Laporan EITI, adalah agar data dapat dengan mudah ditemukan dalam satu sumber dengan keandalan yang tinggi. Transparansi adalah kunci untuk sektor ekstraktif dan memiliki banyak sumber data dapat mempersulit pengumpulan dan keakuratan informasi. mainstreaming di Timor-Leste harus memungkinkan untuk memberikan pengungkapan data EITI yang lebih fleksibel, dalam waktu yang lebih singkat, dan dengan informasi yang dapat diandalkan, menghindari duplikasi dan informasi masa lalu.

10. Mainstreaming

Timor-Leste bergabung dengan EITI pada tahun 2008 dan sejak itu telah menerbitkan 13 laporan, dengan kemajuan yang memuaskan, menurut situs web EITI.

Negara ini mengikuti jalur yang kuat untuk meningkatkan transparansi data yang diungkapkan oleh negara dan oleh entitas. Memang, EITI menganggap Timor-Leste sebagai pelopor mainstreaming di Asia karena peluncuran Portal Transparansi pada tahun 2011 oleh pemerintah. Portal ini mengungkapkan informasi terbaru yang konstan mengenai data pemerintah, seperti anggaran nasional dan Pengeluaran⁴⁸.

Tujuan mainstreaming memungkinkan transparansi penuh sektor minyak & gas di seluruh dunia, memberikan lebih banyak visibilitas yang meningkatkan keandalan di sektor ini untuk investasi oleh entitas asing dan operator masa depan atau mitra usaha bersama.

Selain itu, beberapa entitas nasional merilis laporan tahunan secara publik dengan laporan keuangan yang telah diaudit, serta data bulanan. Instansi pemerintah utama yang menampilkan data keuangan dan bukan keuangan, setidaknya setiap tahun, adalah ANPM (Autoridade Nacional do Petróleo e Minerais), TIMOR GAP, Banco Central dan petroleum fund. Entitas tersebut menerbitkan laporan tahunan dengan laporan keuangan yang telah diaudit dan ANPM juga menyediakan situs web dengan angka produksi bulanan dan pengumpulan pendapatan bulanan.

Selain itu, karena perbedaan kecil yang tidak direkonsiliasi pada laporan tahunan EITI dan ukuran sektor, tercipta harapan pada sekretariat Internasional EITI bahwa Timor-Leste adalah salah satu kandidat kuat untuk menjadi salah satu negara pertama yang menerapkan mainstream.

dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas selama bertahun-tahun, dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan EITI Standard 2016 dan kemudian EITI Standard 2019. Bahkan, EY

Portugal melakukan tindak lanjut dari Studi Kelayakan mainstreaming terakhir untuk menilai persyaratan dan pengembangan roadmap.

Selama tahun 2022 dan bersamaan dengan penyusunan Laporan EITI 2020, dilaksanakan beberapa pertemuan tindak lanjut terkait mainstreaming terakhir. Tujuannya adalah untuk memahami perkembangan yang terjadi selama periode ini, serta untuk menyoroti perbaikan dalam setiap persyaratan EITI Standard 2019. Selama sesi yang dilakukan oleh IA, dimungkinkan untuk mendiskusikan beberapa rekomendasi dan memahami beberapa hambatan untuk mencapai transparansi penuh.

MSWG saat ini menganggap bahwa kemajuan mainstreaming akan terjadi secara bertahap karena negara itu sendiri mengembangkan alat dan mekanisme yang penting untuk implementasi penuhnya. Struktur peraturan dan undang-undang O&G saat ini bertentangan dengan persyaratan pengungkapan informasi tertentu yang dibayangkan pada EITI Standard (istilah komersial dalam PSC, rincian produksi tertentu, dll.). Selain itu, terlepas dari kenyataan bahwa sejumlah besar informasi yang diperlukan dilaporkan di situs web entitas Pemerintah, keterbatasan infrastruktur fisik dan digital saat ini (misalnya kualitas internet) menunda keberadaan platform yang memusatkan informasi yang diperlukan EITI untuk akses yang lebih efisien.

Faktor-faktor ini menjadi penyebab utama keterbelakangan mainstreaming di Timor-Leste. Implementasi penuh oleh semua entitas akan membutuhkan studi menyeluruh tentang bagaimana mengatasi keterbatasan hukum dan biaya yang terkait dengan implementasi.

Selain itu, untuk mematuhi persyaratan yang diusulkan dalam EITI Standard 2023 secara berkelanjutan, penting untuk menggunakan beberapa sumber daya, tidak hanya untuk implementasi penuhnya, tetapi juga untuk pembaruan dan validasi yang terus-menerus

⁴⁸ Sumber: EITI Timor-Leste: <https://eiti.org/timorleste> & Transparency

Portal: <http://www.transparency.gov.tl/english.html>

An aerial view of an offshore oil rig in the middle of a vast, blue ocean under a clear sky. The rig is a complex of metal structures, including two tall derrick-like towers. A small red and white boat is visible in the lower-left corner.

11

Pengeluaran Sosial & Ekonomi

Menurut Persyaratan 6 dari EITI standard, pengeluaran sosial dan dampak sektor ekstraktif terhadap ekonomi harus diungkapkan, membantu pembaca menilai dampak sosial dan ekonomi dan hasil yang diciptakan industri ini terhadap negara. Persyaratan tersebut meliputi:

- Pengeluaran sosial dan lingkungan oleh perusahaan
- Pengeluaran kuasi-fiskal BUMN
- Kontribusi sektor ekstraktif terhadap perekonomian
- Dampak lingkungan dari kegiatan ekstraktif

11. Pengeluaran Sosial & Ekonomi

11.1 Pengeluaran Sosial

Terdapat pengeluaran yang diperkirakan dalam rencana tahunan yang disetujui antara Operator dan ANPM, yang dianggap sebagai cost recoverable dan dikendalikan oleh ANPM (disebut sebagai komitmen lokal atau Lokal Konten – LC).

Pengeluaran tersebut direkomendasikan berdasarkan production sharing contract (PSC) dan telah disetujui terlebih dahulu dalam Program Kerja dan Anggaran (WPB) yang telah disetujui.

Untuk semua pengeluaran sosial lainnya (sukarela) MSWG telah memutuskan untuk memasukkannya dalam proses pengumpulan data dan melakukan pelaporan sepihak dari perusahaan untuk meningkatkan kontribusinya.

Ringkasan laporan ini adalah sebagai berikut:

Pengeluaran Sosial	Jumlah yang dilaporkan dalam USD
Wajib	20 393 200
Subtotal entitas Santos (Wajib)	20 393 200
Proyek Cost Recoverable untuk BU.	161 462
Sukarela	1 287 561
Subtotal entitas Santos (Sukarela).	1 449 023
Sukarela	391 588
Subtotal Timor Resources (Sukarela)	391 588
Total	22 233 811

Komitmen lokal konten (Wajib)

Perusahaan minyak dan gas yang beroperasi di TLEA dan bekas JPDA direkomendasikan untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi atau dipasok oleh penyedia di Timor-Leste. Di TLEA, perusahaan minyak & gas diharuskan memberikan prioritas dalam mempekerjakan warga negara Timor-Leste dan memberikan pelatihan kepada warga negara Timor-Leste. ANPM bekerja sama erat dengan Operator di TLEA untuk mengukur kinerja Lokal Konten dalam hal partisipasi lokal dalam pengadaan barang dan jasa serta pelatihan dan pekerjaan untuk kegiatan perminyakan di kedua yurisdiksi.

Untuk laporan ini, kami menerbitkan pemisahan biaya yang dikeluarkan atas nama pemangku kepentingan Bayu-Undan tetapi dibayar dan dilaporkan oleh Santos NA (19-12) Pty Ltd. Komitmen lokal yang dilaporkan adalah sebagai berikut:

Deskripsi Pengeluaran Sosial	Nama perusahaan "penerima manfaat"	Pembayaran (Jumlah dalam USD)
Lainnya - Karyawan Santos Offshore Timor-Leste	Santos Offshore Timor-Leste Employees	1 196 290
Lainnya - Barang & Jasa Lokal	Various vendors	3 186 580
Lainnya - Karyawan Kontraktor Timor-Leste	Various vendors	9 017 651
Lainnya - Barang & Jasa Kontraktor Timor-Leste	Various vendors	6 134 312
Lainnya - Karyawan Santos Kantor Dili	Santos Dili Office Employees	858 367
Total Santos		20 393 200

Catatan:

- 1 Belanja barang, jasa, dan ketenagakerjaan Timor-Leste telah tercermin sebagai wajib dalam tabel ini, sejalan dengan: klausa 5.2(h) PSC, untuk memberikan preferensi pada barang dan jasa yang diproduksi atau disediakan oleh kontraktor yang beroperasi di luar Timor-Leste atau Australia asalkan ditawarkan dengan persyaratan yang kompetitif; dan klausul 5.2(i) - memberikan preferensi pada mempekerjakan warga negara Timor-Leste dan residen tetap, dengan memperhatikan kegiatan yang aman dan efisien serta praktik ladang minyak yang baik.
- 2 Perincian lengkap per Kontraktor disediakan dalam Laporan Konten Tahunan Timor-Leste yang diberikan kepada ANPM.
- 3 Belanja barang dan jasa lokal mencakup semua barang dan jasa yang disediakan oleh entitas yang didirikan di Timor-Leste. Perincian lengkap per Kontraktor disediakan dalam Laporan Lokal Konten Tahunan Timor-Leste 2022 yang diberikan kepada ANPM oleh Santos NA (19-12) Pty Ltd.
- 4 Pengeluaran ketenagakerjaan mencerminkan gaji yang sesuai dengan warga negara Timor-Leste di lepas pantai.

Pengeluaran Sukarela

Jumlah total pengeluaran sukarela oleh Santos NA (19-12) Pty Ltd dan Timor Resources dikonfirmasi oleh ANPM.

Deskripsi Pengeluaran Sosial	Nama Perusahaan "pembayar"	Nama Perusahaan "penerima manfaat"	Pembayaran
Lainnya - Pelatihan Karyawan Timor-Leste untuk Kontraktor	Santos NA (19-12) Pty Ltd	Various vendors	718 732
Dukungan helikopter untuk banjir (bekerja sama dengan Pemerintah Australia)	Santos NA (19-12) Pty Ltd	McDermott Aviation, engaged through Avmin Aircraft Charter Services	250 000
Program Beasiswa - Beasiswa Fullbright-SERN		IIE	161 462
Bantuan Banjir	Santos NA (19-12) Pty Ltd	Red Cross Timor Leste	185 675
SESIM - Hari Sains & Matematika Sedunia	Santos NA (19-12) Pty Ltd	National Commission of UNESCO in TL	56 012
Program LSM (Air, Sanitasi, Kesehatan, Acara Olahraga)	Santos NA (19-12) Pty Ltd	NGO Santalum	38 012
- Proyek Reboisasi	Santos NA (19-12) Pty Ltd	Rotary Club of Dili	30 024
Dukungan untuk Acara Nasional - First Lady Fun Run	Santos NA (19-12) Pty Ltd	IBTL & Maubisse School	5 362
Donasi Peralatan TI dan Donasi Hadiah Natal	Santos NA (19-12) Pty Ltd	Energy Club of WA	3 744
		Santos Entities	1 449 023
Pekerjaan	Timor Resources		376 588
Proyek Komunitas Perbaikan Jalan	Timor Resources	Voluntary	10 000
Proyek Komunitas Proyek Percontohan Hortikultura di Suai	Timor Resources	Voluntary	5 000
		Timor Resources Pyt Ltd	391 588
Total			1 840 611

Pengeluaran Sosial & Ekonomi

11.2 Pengeluaran Lainnya

Pengeluaran Lingkungan

Pengeluaran lingkungan dilaporkan oleh Timor Resources dan dikonfirmasi oleh ANPM.

Deskripsi Pengeluaran Sosial	Nama Perusahaan "pembayar"	Nama Perusahaan "penerima manfaat"	PSC	Pembayaran Entitas Ekstraktif dalam USD
Lainnya (Jelaskan) Laporan pihak ketiga untuk persetujuan HSE	TIMOR RESOURCES PTY LTD	Safety Management Consultancy & Borthwck Associate	TL-OT-17-08	144 419
Total				144 419

Pengeluaran Kuasi-Fiskal

Pengeluaran kuasi-fiskal mencakup pengaturan di mana BUMN melakukan pengeluaran sosial publik seperti pembayaran untuk layanan sosial, infrastruktur publik, subsidi bahan bakar dan pembayaran utang nasional, dll. di luar proses anggaran nasional.

Tidak ada entitas dalam ruang lingkup yang melaporkan pembayaran terkait jenis pengeluaran ini



12

Rekomendasi

Seperti yang dinyatakan sebelumnya, selama validasi terakhir penerapan EITI Standard 2019, Dewan EITI mengeluarkan rekomendasi khusus untuk dilakukan Timor-Leste. Kemajuan dalam menangani tindakan ini akan dinilai dalam validasi berikutnya yang dimulai pada 1 April 2025. Di bagian ini, kami telah menguraikan daftar tindakan potensial sebagai tanggapan atas rekomendasi dari laporan validasi. Namun, daftar ini tidak lengkap, jadi sebaiknya lihat laporan validasi untuk pemahaman yang komprehensif.

Sehubungan dengan tindak lanjut atas rekomendasi Laporan EITI sebelumnya, kerangka hukum yang mendefinisikan peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan dalam proses EITI belum dibuat. Kami sangat merekomendasikan pemberlakuan Undang-Undang EITI sesegera mungkin. Undang-undang ini akan memberikan pedoman yang lebih baik tentang batasan tertentu (seperti kerahasiaan PSC dan/atau pemisahan produksi berdasarkan komoditas) dan akan membantu dalam mengklarifikasi pemahaman.

12. Rekomendasi

Laporan Validasi EITI terakhir untuk Timor-Leste memberikan rekomendasi yang relevan untuk perbaikan di seluruh komponen Hasil dan Dampak, Pemangku Kepentingan, dan Transparansi. Beberapa rekomendasi ini telah ditekankan di bagian saat ini dan kami telah menguraikan daftar tindakan potensial sebagai tanggapan terhadap rekomendasi yang diberikan oleh Sekretariat Internasional. Meskipun demikian, daftar ini tidak lengkap, jadi kami menganjurkan Anda untuk merujuk ke laporan validasi guna memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang semua rekomendasi.

Hasil dan Dampak

Dewan EITI telah mengindikasikan bahwa pemantauan hasil dan dampak implementasi EITI telah menjadi tantangan karena kurangnya hasil dan dampak yang jelas dalam rencana kerja, aktivitas terbatas untuk mendorong debat publik, dan tindakan minimal atas pelajaran yang dipetik.

Rekomendasi dalam pilar ini difokuskan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap Persyaratan EITI 7 dan 1.5. Tujuan dari rekomendasi ini adalah untuk menekankan pentingnya membuat kemajuan dalam menangani prioritas nasional, mempromosikan debat publik, dan melakukan tinjauan sistematis dan dokumentasi tentang hasil dan dampak implementasi EITI.

Kelompok Kerja Multi-Pemangku Kepentingan (MSWG) dapat mempertimbangkan tindakan potensial berikut:

Meninjau dan memperbarui rencana kerja EITI secara berkala, dengan berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan utama, dapat membantu memastikan bahwa prioritas nasional, termasuk isu-isu yang terkait dengan korupsi, kesetaraan gender, transisi energi, dan pengumpulan pendapatan, menjadi fokus utama. Menetapkan dan melacak tujuan yang terukur dapat memantau kemajuan secara efisien.

Forum publik dan rapat balai kota yang difokuskan pada

pembahasan temuan EITI mungkin terbukti berguna untuk merangsang perdebatan publik. Kemitraan dengan outlet media lokal dapat lebih meningkatkan distribusi dan aksesibilitas informasi EITI.

MSWG dapat mempertimbangkan periode peninjauan tahunan yang ditetapkan untuk mengevaluasi kemajuan dan dampak implementasi EITI di Timor-Leste. Proses ini dapat secara efektif memandu kegiatan tahun berikutnya dan menetapkan fokus area.

Penugasan tim khusus dalam MSWG untuk menindaklanjuti dan menindaklanjuti rekomendasi EITI dapat memperlancar prosedur implementasi. Berbagi informasi terkini selama rapat MSWG dapat memastikan kemajuan transparansi.

Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Dewan EITI menyarankan agar keterlibatan pemerintah dalam proses EITI dapat lebih proaktif, termasuk menindaklanjuti rekomendasi, mengembangkan prioritas dan tujuan yang lebih spesifik untuk implementasi EITI, dan mendukung penguatan pengungkapan dan penggunaan data ekstraktif. Sekretariat Internasional merekomendasikan bahwa Timor-Leste harus memastikan bahwa kelompok multi-pemangku kepentingan melakukan pengawasan terhadap semua aspek implementasi EITI di luar produksi Laporan EITI, termasuk keterlibatan aktif dalam desain proses EITI, penjangkauan dan penyebaran temuan EITI, dan tindak lanjut atas rekomendasi EITI untuk memperkuat tata kelola industri ekstraktif. Rekomendasi ini sejalan dengan persyaratan EITI Standard untuk keterlibatan pemerintah, yang dinilai sebagian besar terpenuhi dalam validasi terakhir.

Selain rekomendasi ini, kami telah mengidentifikasi beberapa tindakan potensial. Kelompok Kerja Multi-Pemangku Kepentingan (MSWG) dapat mempertimbangkan untuk mengadakan pertemuan bulanan atau dua bulanan, yang akan memberikan platform ideal untuk berbagi masalah, menyampaikan umpan balik yang membangun, dan melakukan penyesuaian yang membangun terhadap proses implementasi EITI. perwakilan industri juga dapat mengadakan rapat internal rutin

untuk menilai dan memperkuat keterlibatan mereka dalam proses EITI. Hal ini akan memastikan prioritas industri spesifik mereka disuarakan dan dikomunikasikan secara efektif selama rapat MSWG.

Organisasi masyarakat sipil dapat lebih terlibat dalam sesi pelatihan atau lokakarya berkala yang bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman yang lebih kuat tentang peran mereka dalam proses EITI. Dalam konteks yang sama, disarankan agar organisasi-organisasi ini menjalin aliansi dengan badan-badan masyarakat sipil mapan lainnya yang berfokus pada isu-isu tata kelola sektor ekstraktif.

Terakhir, melakukan tinjauan dan pembaruan tahunan terhadap Kerangka MSWG Terms of Reference dapat lebih menyelaraskan kelompok tersebut dengan EITI Standard terbaru. Dengan memformalkan prosedur nominasi konstituen dan meningkatkan proses koordinasi, akuntabilitas publik MSWG dapat diperkuat secara signifikan.

Transparansi

Dewan EITI menyarankan bahwa Timor-Leste telah membuat lebih banyak kemajuan dalam disagregasi pengungkapan pendapatan pemerintah dibandingkan dengan aspek lain dari EITI Standard 2019, seperti pengungkapan kontrak dan transparansi beneficial ownership. Sambil memuji konsistensi pengungkapan data terkait ekstraktif oleh negara tersebut, Dewan EITI mendorong Timor-Leste EITI untuk merestrukturisasi pelaporan tahunannya guna meningkatkan pengungkapan sistematis dan membuat informasi lebih mudah diakses dalam format data terbuka.

Mengenai beneficial ownership, tidak adanya mekanisme pengungkapan sistematis telah diidentifikasi sebagai kesenjangan kritis. Untuk memperbaiki hal ini, Dewan EITI menyarankan agar Timor-Leste mengungkapkan beneficial owners dari semua perusahaan yang memegang atau mengajukan permohonan lisensi ekstraktif. Oleh karena itu, rekomendasi kami adalah agar Timor-Leste berupaya untuk membuat daftar perusahaan guna mendokumentasikan ultimate beneficial owners dari semua entitas perusahaannya. Untuk memajukan inisiatif ini, MSWG harus mengatur pertemuan untuk membahas topik ini dan melibatkan entitas utama, seperti Bank Sentral dan Unit Informasi Keuangan, yang mungkin menjadi pemangku kepentingan utama dalam masalah ini. Selain itu, Timor-Leste didorong untuk mempertimbangkan ambang batas yang lebih rendah untuk beneficial ownership, khususnya untuk Political Expose Persons (PEPs)

Laporan Validasi EITI mengharapkan Timor-Leste untuk menggunakan proses EITI-nya guna memperkuat sistem tata kelola dan pengungkapan entitas pemerintah dan perusahaan ekstraktif, dan untuk merestrukturisasi pelaporan EITI dalam pendekatan berbasis risiko untuk menilai kelengkapan dan keandalan pengungkapan sistematis mereka.

12. Rekomendasi

Menindaklanjuti rekomendasi dari laporan EITI sebelumnya

No	Masalah	Detail masalah	Rekomendasi	Status pelaksanaan Laporan EITI Timor-Leste 2019 (Ya/Tidak/Sedang berlangsung))
1	Kurangnya hukum EITI	Kami mencatat bahwa meskipun laporan EITI Timor-Leste telah direkonsiliasi selama 10 tahun, kerangka hukum yang mendefinisikan peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan dalam proses EITI belum dibuat.	Kami merekomendasikan pemberlakuan undang-undang EITI sesegera mungkin. Undang-undang ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang proses EITI oleh semua pemangku kepentingan dan memastikan bahwa proses rekonsiliasi berhasil.	Tidak
2	Timor-Leste EITI database	Tampaknya hingga saat ini Sekretariat EITI Timor-Leste tidak memiliki basis data yang lengkap mengenai semua perusahaan ekstraktif yang beroperasi di sektor minyak. Kami memahami bahwa situasi ini muncul karena tidak adanya komunikasi formal antara Sekretariat EITI dan Badan Pemerintah terkait perusahaan minyak yang beroperasi di sektor minyak. Dalam beberapa kasus, menghubungi perusahaan ekstraktif bisa jadi sulit karena tidak tersedianya rincian kontak.	Kami merekomendasikan agar Sekretariat Timor-Leste-EITI harus membuat basis data perusahaan ekstraktif setelah latihan rekonsiliasi kami. Sekretariat kemudian harus berhubungan dengan Entitas Pemerintah untuk memastikan memperoleh informasi yang memadai secara teratur dan memperbarui basis datanya yang sesuai. Untuk tujuan ini, kami percaya sangat penting bahwa setiap pendatang baru di sektor minyak terdaftar di Sekretariat Timor-Leste-EITI sebagai bagian dari proses sebelum atau pada saat yang sama saat mereka memperoleh izin operasi mereka. Disarankan untuk meninjau secara berkala dengan Entitas Pemerintah atas daftar perusahaan minyak yang berlisensi untuk beroperasi di sektor ini.	Tidak
3	Ketentuan kerahasiaan dalam PSC	Model PSC yang digunakan oleh Timor-Leste memuat ketentuan kerahasiaan yang mencegah pengungkapan informasi publik yang berkaitan dengan operasi O&G oleh kedua belah pihak, kecuali jika diwajibkan oleh hukum. Model PSC Lampiran F memuat ketentuan kerahasiaan yang mencegah pengungkapan informasi terkini (kurang dari dua tahun) mengenai informasi sensitif komersial tertentu. Namun, ringkasan model PSC telah tersedia untuk umum di situs web ANPM.	Jika sebuah UU EITI sedang disetujui oleh pemerintah, kami merekomendasikan agar UU tersebut mencakup persyaratan yang diperlukan untuk memungkinkan pengungkapan kewajiban pelaporan EITI kepada operator dan perwakilan Timor-Leste.	Tidak



13

LAMPIRAN

13. Lampiran

A. Perusahaan Di Sektor Minyak Dan Gas

Entitas	
BU 12 Aust Pty Ltd	TIMOR GAP PSC 11-106 Unip Lda
BU 13 Aust Pty Ltd	Timor Resources Pty Ltd
Carnarvon Petroleum Timor Unip Lda	Tokyo Timor Sea Resources
Eni JPDA 03-13 Ltd	Woodside Energy Pty Ltd
Eni JPDA 06-105 Pty Ltd	Konnekto Unipessoal Lda
Eni JPDA 11-106 B.V	Brunel Energy Pty Ltd
Eni Timor Leste S.P.A	Caltech Unipessoal Lda
Inpex Sahul Ltd	Cameron Services International Pty Ltd
Inpex Timor Sea Ltd	Cape Australia Onshore Pty Ltd
Santos NA Emet Pty Ltd	Clough Amec Pty Ltd
Santos NA (19-12) Pty Ltd	Normant Driff AS Timor, Unipessoal Lda
Santos NA (19-13) Pty Ltd	MMA Offshore Vessel Operation Pty
Santos NA Timor Sea Pty Ltd	Noble Services International Limited
Santos NA Bayu-Undan Pty Ltd	Noble Contracting II GMBH
Santos (JPDA 91-12) Pty Ltd	Rigforce Pty Ltd
Sundagas Banda Unipessoal, Lda	Santos NA Timor Leste Pty Ltd
TIMOR GAP Onshore Block Unip Lda	Schlumberger Australia P/L
TIMOR GAP Onshore Block B Unip Lda	SGS AUSTRALIA PTY LTD
TIMOR GAP Greater Sunrise 03-19	Sodexo Timor Unip Lda
TIMOR GAP Greater Sunrise RL	Oceaneering Aust Pty Ltd
TIMOR GAP Greater Sunrise RL2	Australia Intern'l Petro-Cons
TIMOR GAP Greater Sunrise 03-20	Babcock Offshore Services
TIMOR GAP Offshore Block Unipessoal	OFFSHORE SERVICES AUSTRALASIA PTY
Callidues Process Solution Pty Ltd	Solar Turbines Int. Co

Entitas

Compas Group (Australia) Pty.Ltd.
Haliburton Australia Pty Ltd
Japan Energy EP JPDA Pty Ltd
KOTUG MARITIME SERVICES (BAYU UNDAN PTY LTD)

Spectrum Geo Aust Pty Ltd
Total Marine Tech Pty Ltd
WEATHERFORD AUSTRALIA PTY LTD
Wood Australia Pty Ltd

B. Sektor Mineral Tahun 2021

Ringkasan Pengumpulan Royalti dari Operasi Mineral 2006-2023

No	Tahun	Pembayaran Lisensi untuk Mineral ¹⁾	Pembayaran ijin (permit) untuk Mineral ²⁾	Kompensasi untuk kegiatan Mineral tanpa izin ³⁾	Biaya (fee) permukaan Lisensi eksplorasi ⁴⁾	Tender Umum Mineral ⁵⁾	Total pengumpulan	Keterangan (Remarks)
1.	2006	\$9,642.13	N/a	N/a	N/a	N/a	\$9,642.13	
2.	2007	\$13,058.00	N/a	N/a	N/a	N/a	\$13,085.00	
3.	2008	\$3,420.00	N/a	N/a	N/a	N/a	\$3,420.00	
4.	2009	\$63,044.85	N/a	N/a	N/a	N/a	\$63,044.85	
5.	2010	\$91,161.50	N/a	N/a	N/a	N/a	\$91,161.50	
6.	2011	\$72,461.00	N/a	N/a	N/a	N/a	\$72,461.00	
7.	2012	\$45,673.00	N/a	N/a	N/a	N/a	\$45,673.00	
8.	2013	\$42,506.00	N/a	N/a	N/a	N/a	\$42,506.00	
9.	2014	\$192,680.00	N/a	N/a	N/a	N/a	\$192,680.00	
10.	2015	\$241,729.00	N/a	N/a	N/a	N/a	\$241,729.00	
11.	2016	\$283,741.40	N/a	N/a	N/a	N/a	\$283,741.40	
12.	2017	\$1,034,568.90	N/a	\$617,489.50	N/a	N/a	\$1,034,568.90	
13.	2018	\$178,882.60	N/a	\$1,489,921.68	N/a	N/a	\$1,668,804.28	
14.	2019	\$1,171,038.07	N/a	\$1,197,858.29	\$32,895.00	N/a	\$2,401,791.36	
15.	2020	\$2,287,128.68	N/a	\$522,728.99	\$5,471.88	N/a	\$2,815,329.56	
16.	2021	\$1,684,416.49	N/a	\$289,460.77	-	N/a	\$1,973,877.26	
17.	2022	\$2,216,541.05	\$18,880.00	\$215,845.15	\$10,943.77	N/a	\$2,462,209.97	
18.	2023	\$393,582.50	\$26,820.00	\$338,404.02	-	\$2,850.00	\$761,656.52	Hanya sampai di 13 Setembru 2023
Total		\$9,407,785.68	\$45,700.00	\$4,671,708.40	\$49,310.65	\$2,850.00	\$14,177,354.72	

C. Pembayaran Mineral Pada Tahun 2021

No.	Nama pihak pengusul	Origin	Jenis Kegiatan	Jenis Pembayaran	Kategori Pertambangan	Jumlah Total yang Dibayar (USD)
1	2NJ Morai Civil Construction Lda.	Lokal	komersial	Izin pertambangan	Bahan Konstruksi	\$ 46 500,00
2	Altelis Unip., Lda.	Lokal	komersial	Izin pertambangan	Bahan Konstruksi	\$ 21 500,00
3	Aspalink Unip., Lda.	Lokal	Konstruksi	kompensasi	Bahan Konstruksi	\$ 30 000,00
4	CBMI Construction Co., & Chongqing Road Engineering (Group) Co., Lda.	Internasional	Konstruksi	Izin pertambangan	Bahan Konstruksi	\$ 541 755,20
5	China Harbour Timor Lda.	Internasional	Konstruksi	Izin pertambangan	Bahan Konstruksi	\$ 1 031 704,19
6	EDS Construction Unip., Lda.	Lokal	Gabungan	Izin pertambangan	Bahan Konstruksi	\$ 5 170,00
7	Hoven II Unip., Lda.	Lokal	Konstruksi	kompensasi	Bahan Konstruksi	\$ 133 038,78
8	King Construction, Unip., Lda.	Lokal	Gabungan	kompensasi	Bahan Konstruksi	\$ 26 046,76
9	King Construction, Unip., Lda.	Lokal	Gabungan	Izin pertambangan	Bahan Konstruksi	\$ 29 615,10
10	Linatet Unip., Lda.	Lokal	Gabungan	kompensasi	Bahan Konstruksi	\$ 22 003,65
11	Montana Diak Unip., Lda.	Lokal	Konstruksi	kompensasi	Bahan Konstruksi	\$ 14 266,19
12	Montana Diak Unip., Lda.	Lokal	Gabungan	Izin pertambangan	Bahan Konstruksi	\$ 8 172,00
13	Natureza Timor Naroman Lda., Contractor & Supplier	Lokal	Konstruksi	kompensasi	Bahan Konstruksi	\$ 58 354,39
14	Yefa Unipessoal, Lda.	Lokal	komersial	kompensasi	Bahan Konstruksi	\$ 5 751,00
total pendapatan mineral pada tahun 2021						\$ 1 973 877,26

D. Pembayaran Mineral Pada Tahun 2020

No.	Nama pihak pengusul	Origin	Jenis Kegiatan	Jenis Pembayaran	Kategori Pertambangan	Jumlah Total yang Dibayar
1	Aquarius Construction Unip., Lda.	Lokal	Komersial	Izin pertambangan	Bahan Konstruksi	\$ 5,980.00
2	Aquarius Construction Unip., Lda.	Lokal	Komersial	kompensasi	Bahan Konstruksi	\$ 7,840.00
3	Beduku Jaya Unip., Lda.	Lokal	Komersial	kompensasi	Bahan Konstruksi	\$ 7,151.68
4	Boheek Unip., Lda.	Lokal	Komersial	kompensasi	Bahan Konstruksi	\$ 12,414.82
5	CBMI Construction & Chongqing Road Engineering (Group) Co., Lda.	Internasional	Konstruksi	Izin pertambangan	Bahan Konstruksi	\$ 14,935.27
6	China Harbour Timor Lda.	Internasional	Konstruksi	Izin pertambangan	Bahan Konstruksi	\$ 2,062,650.45
7	China Wu Yi Co., Ltd., R.P.	Internasional	Konstruksi	Izin pertambangan	Bahan Konstruksi	\$ 114,470.97
8	China Wu Yi Co., Ltd., R.P.	Internasional	Konstruksi	kompensasi	Bahan Konstruksi	\$ 59,340.75
9	City Development Group, Lda.	Lokal	Komersial	Izin pertambangan	Bahan Konstruksi	\$ 4,633.20
10	City Development Group, Lda.	Lokal	Komersial	Compensation	Bahan Konstruksi	\$ 8,553.60
11	Elegant Marble Group Unip., Ltd	Lokal	Komersial	Exploration License	Batu Hias	\$ 1,500.00
12	Elegant Marble Group Unip., Ltd	Lokal	Komersial	Annual Surface Fee	Batu Hias	\$ 4,869.00
13	Hoven II Unip., Lda.	Lokal	Konstruksi	kompensasi	Bahan Konstruksi	\$ 39,648.70
14	Jonize Construction Unip., Lda.	Lokal	Gabung	Izin pertambangan	Bahan Konstruksi	\$ 23,880.00
15	JRM JV DRQ Unip., Lda. (Vitoria Group)	Lokal	Konstruksi	kompensasi	Bahan Konstruksi	\$ 2,533.82

No.	Nama pihak pengusul	Origin	Jenis Kegiatan	Jenis Pembayaran	Kategori Pertambangan	Jumlah Total yang Dibayar
16	King Construction, Unip., Lda.	Lokal	Komersial	Izin pertambangan	Bahan Konstruksi	\$ 9,377.55
17	Linatet Unip., Lda.	Lokal	Komersial	kompensasi	Bahan Konstruksi	\$ 66,010.95
18	Montana Diak Unip., Lda.	Lokal	Gabungan	kompensasi	Bahan Konstruksi	\$ 1,992.00
19	Nananiu Unip., Lda.	Lokal	Gabungan	kompensasi	Bahan Konstruksi	\$ 92,717.71
20	Natureza Timor Naroman Lda., Contractor & Supplier	Lokal	Konstruksi	kompensasi	Bahan Konstruksi	\$ 116,708.78
21	Romante Pty., Ltd.	Internasional	Konstruksi	kompensasi	Bahan Konstruksi	\$ 7,993.03
22	Shanghai Construction Group Co., LTD., R.P	Lokal	Konstruksi	Izin pertambangan	Bahan Konstruksi	\$ 28,038.84
23	Shanghai Construction Group Co., LTD., R.P	Lokal	Konstruksi	kompensasi	Bahan Konstruksi	\$ 10,478.70
24	Starking Raw Material Industry Unip., Lda.	Lokal	Gabung	Izin pertambangan	Bahan Konstruksi	\$ 20,162.40
25	Starking Raw Material Industry Unip., Lda.	Lokal	Gabungan	kompensasi	Bahan Konstruksi	\$ 11,964.00
26	Timor General Development Group Unip., Lda.	Lokal	Komersial	kompensasi	Bahan Konstruksi	\$ 58,116.92
27	Uma Marble Timor, Unip., Lda.	Lokal	Komersial	Exploration License	Batu Hias	\$ 1,500.00
28	Uma Marble Timor, Unip., Lda.	Lokal	Komersial	Annual Surface Fee	Batu Hias	\$ 602.88
29	Weng Enterprise Group Lda.	Lokal	Komersial	kompensasi	Bahan Konstruksi	\$ 19,263.54
Total Penerimaan Pendapatan yang Disetorkan untuk Tahun 2020						\$ 2,815,329.56

E. Daftar Lisensi 2006-2021

2006		
No.	Nama Lisensi	No. Lisensi
1	Edi Konro – Konro	N/A
2	.Agostinho Gomes	N/A
3	JJ Mcdonalds	N/A
4	JJ Mcdonalds	N/A
5	Tinolina Company Ltd.	No.GMR/2006/XII/002
2007		
No.	Nama Lisensi	No. Lisensi
1	Carya Timor Leste Lda	No.DNGMR/2007/07/0012
2	JJ Mcdonalds & Sons Engineering Pty. Ltd	N/A
3	Jonize Construction Unip. Lda.	No.GMR/2007/V/004
4	Jonize Construction Unip. Lda	No.DNGMR/2007/07/011
5	Linatet Unip. Lda.	No.DNGMR/2007/07/006
6	Tinolina Company Ltd.	No.GMR/2007/IV/003
7	Top Libert 88 Ltd.	No.GMR/2007/VII/005

2008		
No.	Nama Lisensi	No. Lisensi
1	Unknown	N/A
2	Unknown	N/A
3	Jonize Construction Unip. Lda	No. DNGMR/2008/VIII/0017

2009		
No.	Nama Lisensi	No. Lisensi
1	Always Construction Pty. Ltd.	No. 00012/LT/DNGRM/IV/09
2	Always Construction Pty. Ltd.	No. 00012/LT/DNGRM/IV/09
3	Carya Timor-Leste Lda.	No. 00006/LT/DNGRM/II/09
4	Domin Timor Construction Lda.	No. 00010/LT/DNGRM/IV/09
5	Domin Timor Construction Lda.	No. 00011/LT/DNGRM/IV/09
6	East Sunrise Timor-Leste Construction	No. 00003/LT/DNGRM/I/09
7	East Sunrise Timor-Leste Construction	No. 00004/LT/DNGRM/I/09
8	Ensul Esphera Engenharia	No. 00014/LT/DNGRM/V/09
9	Ensul Esphera Engenharia	No. 00018/LT/DNGRM/X/09
10	Excel Construction Material Co. Ltd.	No. 00019/LT/DNGRM/X/09
11	Jonize Construction Unip. Lda	No. 00005/LT/DNGRM/II/09
12	Linatet Unipessoal Lda	No. 00009/LT/DNGRM/III/09

2009		
No.	Nama Lisensi	No. Lisensi
13	Montana Diak Unip. Lda.	No. 00016/LT/DNGRM/X/09
14	Montana Diak Unip. Lda.	No. 00017/LT/DNGRM/X/09
15	RMS Engineering and Construction Pty. Ltd.	N/A
16	Top Liberty 88 Lda.	No. 00007/LT/DNGRM/II/09
17	Top Liberty 88 Lda.	No. 00008/LT/DNGRM/II/09
18	Top Liberty 88 Lda.	N/A
19	Trans Global Unip. Lda.	No. 00001/LT/DNGRM/XII/08

2010		
No.	Nama Lisensi	No. Lisensi
1	Always Construction Pty. Ltd.	No. 0001/LT/DNGRM/I/2010
2	Carya Timor-Leste Lda.	No. 0004/LT/DNGRM/II/2010
3	Express Distribution Services III Unip. Lda.	No. 0010/LT/DNGRM/VII/2010
4	Jonize Construction Unip. Lda.	No. 0003/LT/DNGRM/II/2010
5	Linatet Unip. Lda.	No. 0008/LT/DNGRM/VI/2010
6	Montana Diak Unip. Lda.	No. 0011/LT/DNGRM/XI/2010
7	Montana Diak Unip. Lda.	No. 0014/LT/DNGRM/XI/2010
8	Monte Veado Ltd.	No. 0009/LT/DNGRM/V/2010

2010		
No.	Nama Lisensi	No. Lisensi
9	RMS Engineering and Construction Pty. Ltd.	No. 0005/LT/DNGRM/II/2010
10	RMS Engineering and Construction Pty. Ltd.	No. 0006/LT/DNGRM/III/2010
11	RMS Engineering and Construction Pty. Ltd.	No. 0007/LT/DNGRM/III/2010
12	Tak Kong Electronic Unip. Ltd.	No. 0002/LT/DNGRM/III/2010
13	Timor Block Building Industry	No. 0012/LT/DNGRM/IX/2010
14	United Tibar Quarry Unip. Lda.	No. 0013/LT/DNGRM/IX/2010
15	Weng Enterprise Group Co. Ltd.	No. 0015/LT/DNGRM/XII/2010

2011		
No.	Nama Lisensi	No. Lisensi
1	Carya Timor-Leste Lda.	No. 0005/LT/DNGRM/III/2011
2	Ensul Esphera Engenharia	No. 0008/LT/DNGRM/VI/2011
3	Fatuk Candi Jonggrang	No. 0013/LT/DNGRM/XII/2011
4	Jonize Construction Unip. Lda.	No. 0004/LT/DNGRM/III/2011
5	Libama Comsorsium	No. 0009/LT/DNGRM/X/2011
6	Linatet Unip. Lda.	No. 0003/LT/DNGRM/II/2011
7	Montana Diak Unip. Lda.	No. 0011/LT/DNGRM/XI/2011
8	Montana Diak Unip. Lda.	No. 0012/LT/DNGRM/XI/2011

2011		
No.	Nama Lisensi	No. Lisensi
9	Monte Veado Ltd.	No. 0006/LT/DNGRM/VII/2011
10	RMS Engineering and Construction Pty. Ltd.	No. 0002/LT/DNGRM/I/2011
11	Suai Indah Construction Lda.	No. 0001/LT/DNGRM/I/2011
12	Weng Enterprise Group Co. Ltd.	No. 0014/LT/DNGRM/XII/2011

2012		
No.	Nama Lisensi	No. Lisensi
1	Carya Timor-Leste Lda.	No. 0007/LT/DNGRM/VI/2012
2	Castelo Fronteira Unip. Lda.	No. 0009/LT/DNGRM/VII/2012
3	Empat Saudara Lda.	No. 0001/LT/DNGRM/II/2012
4	Ensul Esphera Engenharia	No. 0003/LT/DNGRM/III/2012
5	Ensul Esphera Engenharia	No. 0009/LT/DNGRM/VII/2012
6	Jonize Construction Unip Lda.	No. 0006/LT/DNGRM/VI/2012
7	RMS Engineering & Construction Pty. Ltd.	No. 0002/LT/DNGRM/II/2012
8	Tak-Kong Electronic Unip. Lda.	No. 0012/LT/DNGRM/VIII/2012
9	Timor Block Building Industry	No. 0004/LT/DNGRM/III/2012
10	Timor Block Building Industry	No. 0004/LT/DNGRM/III/2012
11	Yefa Unipessoal Lda.	No. 0008/LT/DNGRM/VI/2012

2012		
No.	Nama Lisensi	No. Lisensi
12	Yefa Unipessoal Lda.	No. 0011/LT/DNGRM/VIII/2012

2013		
No.	Nama Lisensi	No. Lisensi
1	Empat Saudara Lda.	No. 0009/LT/DNM/VI/2013
2	Libama Comsorsium	No. 0006/LT/DNM/VI/2013
3	Montana Diak Unip. Lda.	No. 0002/LT/DNM/I/2013
4	Montana Diak Unip. Lda.	No. 0003/LT/DNM/I/2013
5	RMS Engineering & Construction Pty. Lda.	No. 0008/LT/DNM/IV/2013
6	Suai Indah Constuction Lda.	No. 0005/LT/DNM/I/2013
7	Weng Enterprise Group Co. Ltd.	No. 0004/LT/DNM/I/2013
8	Yefa Unipessoal Lda.	No. 0007/LT/DNM/IV/2013

2014		
No.	Nama Lisensi	No. Lisensi
1	Aitula Fuel's Lda.	No. 0010/LT/DNM/XII/2014
2	Aitula Fuel's Lda.	No. 0013/LT/DNM/XII/2014
3	Carya Timor-Leste Lda.	N/A

2014		
No.	Nama Lisensi	No. Lisensi
4	Empat Saudara Lda.	No. 0009/LT/DNM/XII/2014
5	Jonize Construction Unip. Lda.	N/A
6	Jonize Construction Unip. Lda.	N/A
7	Jonize Construction Unip. Lda.	No. 16/2014
8	Libama Consorcio Lda.	No. 0007/LT/DNM/XI/2014
9	Maliana Brother's Lda.	No. 0011/LT/DNM/XII/2014
10	Manoko Unip. Lda.	No. 0014/LT/DNM/XII/2014
11	Montana Diak Unip. Lda.	N/A
12	Montana Diak Unip. Lda.	N/A
13	Nobre Labadain Unip. Lda.	No. 12/2014
14	Suai Indah Construção Lda.	No. 0006/LT/DNM/X/2014
15	TL Cement Lda.	No. 01/2014
16	Uha Cae Lda.	No. 0008/LT/DNM/XI/2014
17	Weng Enterprise Group Co. Ltd.	N/A
18	Worldview Enterprise Unip. Lda.	No. 15/2014

2015		
No.	Nama Lisensi	No. Lisensi
1	Aitula Construction Electrical Lda.	No. 28/2015
2	Aitula Construction Electrical Lda.	No. 29/2015
3	Always Construction Unip. Lda.	No. 24/2015
4	Carya Timor-Leste Lda.	No. 15/2015
5	Chongqing International Construction Corporation (CICO)	No. 35/2015
6	Chongqing International Construction Corporation (CICO)	No. 12/2015
7	Chongqing International Construction Corporation (CICO)	No. 11/2015
8	City Development Group Lda.	No. 01/2015
9	Community Housing Ltd.	No. 10/2015
10	CSI Company Lda.	No. 02/2015
11	CSI Company Lda.	No. 03/2015
12	EDS Construction	No. 36/2015
13	Hoven II Unip. Lda.	No. 32/2015
14	Hoven II Unip. Lda.	No. 33/2015
15	Jonize Unip. Lda.	No. 21/2015
16	Jonize Unip. Lda.	No. 14/2015
17	Jonize Unip. Lda.	No. 09/2015

2015		
No.	Nama Lisensi	No. Lisensi
18	Jonize Unip. Lda.	No. 08/2015
19	King Construction Unip. Lda.	No. 05/2015
20	Libama Consorcio Lda.	No. 25/2015
21	Modena Technic Unip. Lda.	No. 22/2015
22	Montana Diak Unip. Lda.	No. 17/2015
23	Montana Diak Unip. Lda.	No. 18/2015
24	Montana Diak Unip. Lda.	No. 19/2015
25	Monte Veadó Lda.	No. 06/2015
26	Nobre Labadain Unip. Lda.	No. 37/2015
27	Shabryca Construction Unip. Lda.	No. 26/2015
28	Shabryca Construction Unip. Lda.	No. 04/2015
29	Soso Building Unip. Lda.	No. 13/2015
30	Suai Indah Ltd.	No. 38/2015
31	Timor Block Building Industry	No. 16/2015
32	TL Cement Lda.	No. 07/2015
33	Uha Cae Lda.	No. 31/2015
34	Uha Cae Lda.	No. 30/2015

		2016	
No.	Nama Lisensi		No. Lisensi
1	China Nuclear Industry 22nd Construction Lda. (CNI)		No. 02/2016
2	China Nuclear Industry 22nd Construction Lda. (CNI)		No. 03/2016
3	CHONGQING INTERNATIONAL CONSTRUCTION CORPORATION (CICO)		No. 06/2016
4	CHONGQING INTERNATIONAL CONSTRUCTION CORPORATION (CICO)		No. 05/2016
5	China Shandong International Company Lda. (CSI)		No. 03/2016
6	China Shandong International Company Lda. (CSI)		No. 04/2016
7	TL Cement		No. 01/2016
8	Worldview Enterprise		No. 03/2016
9	R.D. Interior Junior Construction		No. 07/2016
10	R.D. Interior Junior Construction		No. 08/2016
11	R.D. Interior Junior Construction		No. 11/2016
12	R.D. Interior Junior Construction		No. 12/2016
13	Sinohydro Corporation Limited, R.P		No. 09/2016
14	Shanghai Construction Group Co., LTD., R.P		No. 13/2016
15	Sinohydro Corporation Limited, R.P		No. 10/2016
16	China Nuclear Industry 22nd Construction Lda. (CNI)		No. 14/2016
17	Shabryca Construction Unipessoal, Lda.		No. 19/2016

2016		
No.	Nama Lisensi	No. Lisensi
18	Jonize Construction Unipessoal, Lda.	No. 24/2016
19	Aspalink, Lda.	No. 20/2016
20	Aspalink, Lda.	No. 21/2016
21	Carya Timor-Leste, Lda.	No. 22/2016
22	Weng Enterprise Group, Co., Ltd.	No. 26/2016
23	Weng Enterprise Group, Co., Ltd.	No. 26/2016
24	City Development Group, Lda.	No. 23/2016
25	Montana Diak Unipessoal, Lda.	No. 18/2016
26	Montana Diak Unipessoal, Lda.	No. 16/2016
27	Montana Diak Unipessoal, Lda.	No. 17/2016
28	Suai Indah Ltd.	No. 25/2016
29	Montana Diak Unipessoal, Lda.	No. 15/2016

2017		
	Nama Lisensi	No. Lisensi
1	Ilatur Unipessoal, Lda.	No. 01/2017
2	Sinohydro Corporation Limited, R.P	No. 02/2017
3	Jova Construction Unipessoal Lda.	No. 03/2017

2017		
	Nama Lisensi	No. Lisensi
4	R.D. Interior Junior Construction E Hebei Road And Bridge Group, Lda.	No. 04/2017
5	R.D. Interior Junior Construction E Hebei Road And Bridge Group, Lda.	No. 05/2017
6	Sinohydro Corporation Limited, R.P	No. 06/2017
7	Sinohydro Corporation Limited, R.P	No. 07/2017
8	Sinohydro Corporation Limited, R.P	No. 08/2017
9	Chongqing International Construction Corporation, R.P.	No. 09/2017
10	Mira Mar Bloco Unipessoal Lda.	No. 10/2017
11	Gorobu Diak Lda.	No. 11/2017
12	Shabryca Construction Unipessoal Lda.	No. 12/2017
13	R.D. Interior Junior Construction E Hebei Road And Bridge Group, Lda.	No. 13/2017
14	R.D. Interior Junior Construction E Hebei Road And Bridge Group, Lda.	No. 14/2017
15	Yefa Unipessoal, Lda.	No. 15/2017
16	Timor Block Building, Lda.	No. 16/2017

2018		
No.	Nama Lisensi	No. Lisensi
1	Pantarhei Unipessoal. Lda	No. 01/2018
2	Timor Surveying & Mapping. Lda	No. 02/2018

2018		
No.	Nama Lisensi	No. Lisensi
3	Resource Futures PTY LTD	No. 03/2018
4	R.D. Interior Junior Construction E Hebei Road And Bridge Group, Lda.	No. 04/2018
5	R.D. Interior Junior Construction E Hebei Road And Bridge Group, Lda.	No. 05/2018
6	China Harbour Timor, Lda.	No. 06/2018
7	Shanghai Construction Group.,Co.,Ltd.,R.P	No. 07/2018
8	Shanghai Construction Group.,Co.,Ltd.,R.P	No. 08/2018
9	Shanghai Construction Group.,Co.,Ltd.,R.P	No. 09/2018
10	Shanghai Construction Group.,Co.,Ltd.,R.P	No. 10/2018
11	Shanghai Construction Group.,Co.,Ltd.,R.P	No. 11/2018
12	Shanghai Construction Group.,Co.,Ltd.,R.P	No. 12/2018
13	Shanghai Construction Group.,Co.,Ltd.,R.P	No. 13/2018
14	Shanghai Construction Group.,Co.,Ltd.,R.P	No. 14/2018
15	Yefa Unipessoal, Lda.	No. 15/2018

2019		
No.	Nama Lisensi	No. Lisensi
1	China Harbour Timor Lda	No. 01/2019
2	CBMI Construction. Co & Chongqing Road Engineering (Group) Co, Lda	No. 02/2019

2019		
No.	Nama Lisensi	No. Lisensi
3	CBMI Construction. Co & Chongqing Road Engineering (Group) Co, Lda	No. 03/2019
4	CBMI Construction. Co & Chongqing Road Engineering (Group) Co, Lda	No. 04/2019
5	CBMI Construction. Co & Chongqing Road Engineering (Group) Co, Lda	No. 05/2019
6	CBMI Construction. Co & Chongqing Road Engineering (Group) Co, Lda	No. 06/2019
7	CBMI Construction. Co & Chongqing Road Engineering (Group) Co, Lda	No. 07/2019
8	CBMI Construction. Co & Chongqing Road Engineering (Group) Co, Lda	No. 08/2019
9	CBMI Construction. Co & Chongqing Road Engineering (Group) Co, Lda	No. 09/2019
10	CBMI Construction. Co & Chongqing Road Engineering (Group) Co, Lda	No. 10/2019
11	CBMI Construction. Co & Chongqing Road Engineering (Group) Co, Lda	No. 11/2019
12	CBMI Construction. Co & Chongqing Road Engineering (Group) Co, Lda	No. 12/2019
13	CBMI Construction. Co & Chongqing Road Engineering (Group) Co, Lda	No. 13/2019
14	King Construction, Lda	No. 14/2019

2020/2021		
No.	Nama Lisensi (Catatan: Diperbarui hingga 25 Januari 2022)	No. Lisensi
1	Express Distribution Services & Diverses, Unipessoal, Lda.	No. 01/2021
2	Express Distribution Services & Diverses, Unipessoal, Lda.	No. 02/2021
3	2NJ Morai Civil Construction Unipessoal, Lda.	No. 03/2021

2020/2021		
No.	Nama Lisensi (Catatan: Diperbarui hingga 25 Januari 2022)	No. Lisensi
4	Montana Diak, Unipessoal, Lda	No. 04/2021
5	China Harbour Timor, Lda.	No. 05/2021
6	Altelis, Unipessoal, Lda	No. 06/2021

2021/2022		
No.	Nama Lisensi (Catatan: Diperbarui hingga 25 Januari 2022)	No. Lisensi
1	Altelis, Unipessoal, Lda.	No. 06/2021
2	China Wu Yi Co., Ltd., R.P	No. 01/2022
3	CBMI Construction. Co & Chongqing Road Engineering (Group) Co, Lda	No. 02/2022
4	CBMI Construction. Co & Chongqing Road Engineering (Group) Co, Lda	No. 03/2022
5	China Railway International Group Co., Ltd., R.P. & COVEC (CRIG – COVEC, VJ)	No. 04/2022
6	China Railway International Group Co., Ltd., R.P. & COVEC (CRIG – COVEC, VJ)	No. 05/2022
7	China Railway International Group Co., Ltd., R.P. & COVEC (CRIG – COVEC, VJ)	No. 06/2022
8	China Railway International Group Co., Ltd., R.P. & COVEC (CRIG – COVEC, VJ)	No. 07/2022
9	Timor General Development Group Co., Lda	No. 08/2022
10	Timor General Development Group Co., Lda	No. 09/2022

F. Production Sharing Contracts

Nomor lisensi	Keterangan	Operator	Mitra Usaha Bersama	Bahan yang diekstraksi	Tanggal aplikasi	Tanggal berlaku
TL-SO-T 19-12 ⁴⁹	PSC-TL-SO-T 19-12 dan PSC-TL-SO-T 19-13 ini merupakan PSC pengganti PSC JPDA 03-12 dan PSC JPDA 03-13 yang telah ada sebagai hasil dari pelaksanaan Perjanjian Batas Maritim antara Timor-Leste dan Australia yang mengubah wilayah bekas JPDA menjadi wilayah Timor-Leste. Santos NA (19-12) Pty Ltd sebagai operator kontrak mewakili Bayu Undan Joint Venture untuk melakukan kegiatan perminyakan di wilayah kontrak Bayu Undan. Biaya operasi tahunan Bayu Undan untuk tahun 2021 terutama untuk menutupi biaya operasi dan produksi termasuk biaya pengangkutan, logistik, pasokan, pemeliharaan kecil dan besar. Untuk belanja modal tahun 2021, terdapat biaya yang terutama terkait dengan kampanye pengeboran sumur pengisian Fase 3C.	Santos NA (19-12) Pty Ltd	Santos NA (9-12) Pty Ltd; Santos NA Timor Sea Pty Ltd; Santos NA Emet Pty Ltd; Santos (JPDA 91-12) Pty Ltd; Inpex Sanui Ltd; BU12 Australia PTY LTD.	Kondensat, LPGs, Natural gas	20-05-2002	31-12-2022
TL-SO-T 19-13		Santos NA (19-12) Pty Ltd; Santos NA Bayu Undan Pty Ltd	Santos NA Bayu Undan Pty Ltd; Santos NA (03-13) Pty Ltd; Eni JPDA 03-13 Ltd; Tokyo Timor Sea Resources Pty Ltd; BU13 Australia PTY LTD.	Kondensat, LPGs, Natural gas	20-05-2002	31-12-2021
TL-SO-T 19-10	Pengoperasian PSC ini dihentikan pada bulan Desember 2015 karena dampak harga minyak yang rendah terhadap perekonomian lapangan Kitan. Pengoperasian PSC ini dihentikan karena dampak harga minyak yang rendah secara berkelanjutan terhadap perekonomian lapangan Kitan dan dicadangkan untuk pengembangan lapangan di masa mendatang.	Eni JPDA 06-105 Pty Ltd.	INPEX Timor Sea Ltd.; Repsol Oil and Gas Australia Pty Ltd.	Minyak	22-09-2006	* ⁵⁰

⁴⁹ akhir tahun 2020, Santos Limited ("Santos") adalah operator utama dengan hak kepemilikan sebesar 68,4% setelah menyelesaikan akuisisi aset ConocoPhillips Corporation ("ConocoPhillips") di Australia utara dan Timor-Leste assets, sementara mitra usaha memegang kepentingan berikut: Inpex Corporation (11,38%); Eni Australia (10,99%); dan Tokyo Timor Sea Resources (agregat 9,2%). Pada bulan Mei 2021, Santos Limited ("Santos") yang memegang 68,4% hak partisipasi menjual 25% hak kepemilikan di Bayu-Undan kepada BU12 Australia PTY LTD dan BU13 Australia PTY LTD, sehingga mengurangi kepemilikan Santos di Bayu-Undan menjadi 43,4%.

⁵⁰ * Setelah selesainya komitmen program kerja periode eksplorasi dan pelepasan wilayah kontrak

Nomor lisensi	Keterangan	Operator	Mitra Usaha Bersama	Bahan yang diekstraksi	Tanggal aplikasi	Tanggal berlaku
	pengeluaran yang dilaporkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebagian besar terkait dengan kegiatan umum dan administrasi dalam rangka mempertahankan wilayah kontrak termasuk kegiatan studi pengembangan masa depan atau opsi penghentian operasi..					
03-19	Perjanjian Batas Maritim menetapkan Greater Sunrise sebagai Daerah Rezim Khusus, pengembangan proyek ini sangat bergantung pada negosiasi yang sedang berlangsung antara kedua negara, Timor-Leste, dan Australia serta mitra Usaha Greater Sunrise. Untuk pemeliharaan izin pada tahun 2021, PSC ini terus mempertahankan program kerja minimum tahunan dan anggaran untuk kantor lokalnya, izin, dan investasi inisiatif perusahaan.	Woodside Petroleum (Timor Sea 19) Pty Ltd; Woodside Petroleum (Timor Sea 20) Pty Ltd..	Timor Gap Greater 03-19, Unipessoal Lda ⁵¹ ;	Gas & Gas Kondensat	20-05-2002	04-10-2026
03-20			Timor Gap Greater Sunrise 03-20 Unipessoal Lda; Osaka Gas Sunrise (PSC19) Pty Ltd; Osaka Gas Sunrise (PSC20) Pty Ltd	Gas kondensat	02-05-2002	13-11-2026
TL-SO-T 19-11	Pengeluaran yang dikeluarkan dilaporkan untuk periode yang dimulai dari 1 Januari 2019 sampai dengan 29 Agustus 2019 (berdasarkan PSC JPDA 11-106. Setelah Perjanjian Batas Maritim, pengeluaran antara 30 Agustus 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 dilaporkan berdasarkan ketentuan PSC-TL-SO-T 19-11. Mayoritas pengeluaran pada tahun 2021 terkait dengan studi G&G, G&A, pemeliharaan izin dan lokal konten.	Eni JPDA 11-106 B.V.	Inpex Offshore Timor-Leste Ltd; TIMOR GAP, E.P. PSC 11-106	Minyak	23-10-2013	*

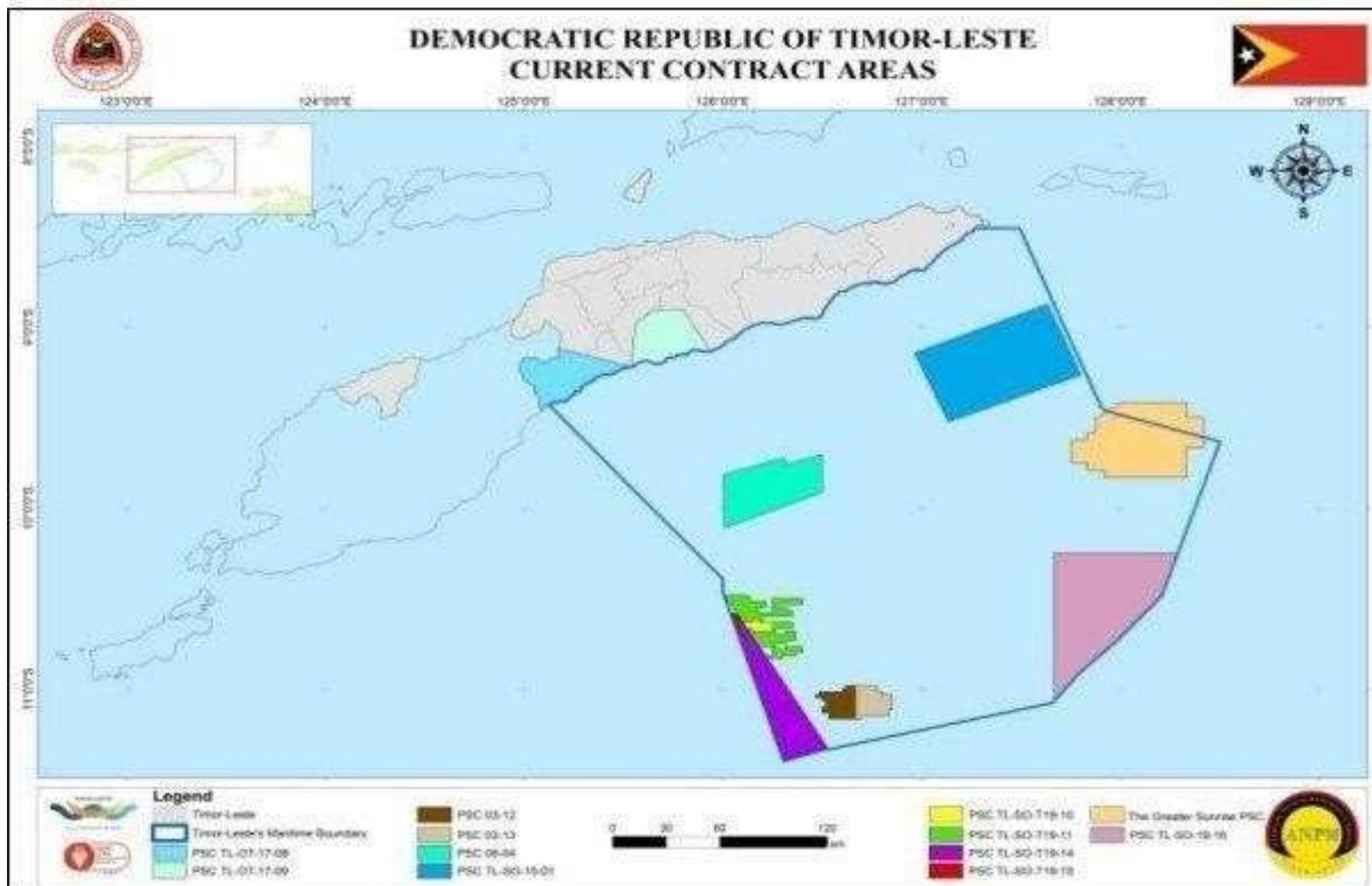
⁵¹ TIMOR GAP telah menandatangani perjanjian dengan ConocoPhillips dan Shell Australia pada tahun 2018 untuk mengakuisisi masing-masing saham partisipasi mereka, dengan total 56,56%, di ladang Greater Sunrise. Transaksi tersebut diselesaikan selama tahun fiskal 2019 dengan tanggal efektif 16 April 2019.

Nomor lisensi	Keterangan	Operator	Mitra Usaha Bersama	Bahan yang diekstraksi	Tanggal aplikasi	Tanggal berlaku
TL-S0-15-01	Selama tahun 2020, operator melakukan studi G&G tambahan dengan metode Full Waveform Inversion (FWI) untuk meningkatkan kualitas citra seismik area sub-thrust dan di bawah area sub-thrust. Selama periode tahun 2020 dan awal tahun 2021, dampak pandemi global Covid-19 telah memengaruhi pelaksanaan program kerja PSC; karenanya, hal ini juga menunda beberapa prioritas pekerjaan dalam PSC, termasuk persiapan pengeboran. Selama tahun 2022, Timor Gap akan melakukan FWI di area kerja PSC untuk memajukan prospek yang teridentifikasi. Saat ini status PSC berada dalam tahun periode eksplorasi tahun 4 dan 5 yang diperpanjang. Diharapkan perusahaan melaksanakan kampanye pengeboran komitmennya dalam periode eksplorasi tahun 4 dan 5 yang diperpanjang. Untuk tahun 2021, sebagian besar pengeluaran terkait dengan pemrosesan dan interpretasi data seismik, G&A termasuk pemeliharaan izin dan lokal konten.	Timor Gap Offshore Block Unipessoal, Lda ("TGOB")	N/A	Minyak & gas	23-12-2015	*
S-06-04 (PSC TLOA S06-04 Block E)	PSC ini diberikan pada tahun 2006 dan awalnya dipegang oleh mitra usaha Eni Timor-Leste S.P.A, Galp Energy, dan KOGAS, namun dalam kurun waktu 2020 hingga 2021, baik Galp maupun KOGAS mengalihkan kepemilikan mereka kepada Eni Timor-Leste S.P.A untuk terus melaksanakan operasi PSC dengan melakukan studi G&G lebih lanjut dan melakukan derricking terhadap prospek yang teridentifikasi. Pada tahun 2021, ANPM, yang bertindak atas nama Kementerian, dan ENI menandatangani akta amandemen PSC untuk tujuan memperpanjang jangka waktu PSC hingga 28 Juni 2023. Untuk tahun 2021, sebagian besar pengeluaran terkait dengan studi G&G, G&A termasuk pemeliharaan izin dan lokal konten.	Eni Timor-Leste S.P.A	N/A		11-03-2006	28-07-2023

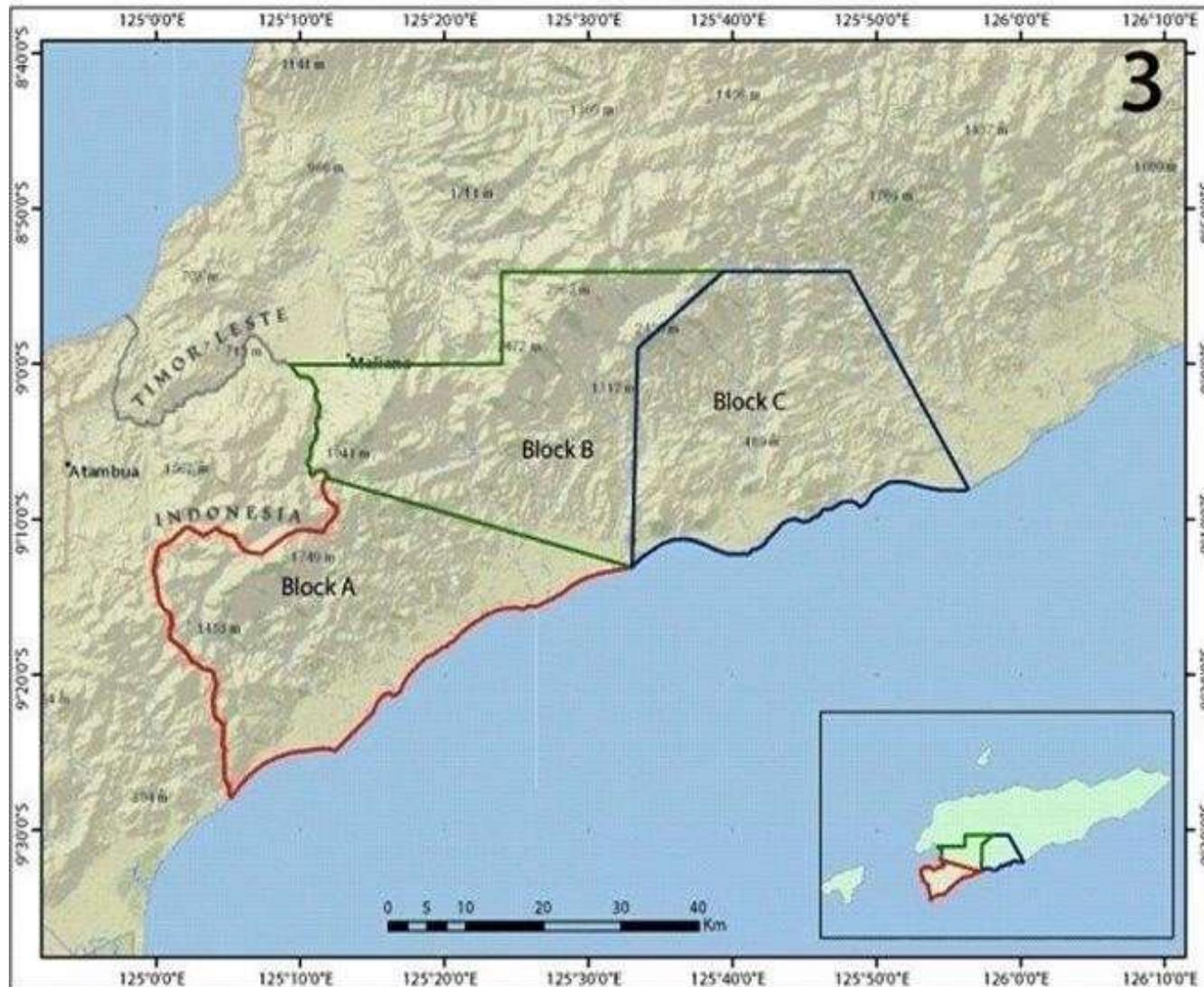
Nomor lisensi	Keterangan	Operator	Mitra Usaha Bersama	Bahan yang diekstraksi	Tanggal aplikasi	Tanggal berlaku
TL-SO-T 19-14	Wilayah kontrak sebelumnya berada di bawah yurisdiksi Australia tetapi dengan batas maritim baru menjadi di bawah yurisdiksi perairan teritorial baru Timor – Leste. Setelah hasil studi G&G Carnarvon kemudian mengajukan permohonan pengeboran pada September 2021 dan Persetujuan Pengeboran (ATD) diberikan pada 22 Desember 2021. Sumur Buffalo-10 dibor pada 30 September 2021 dan pengeboran telah selesai dan hasil pengeboran menunjukkan hidrokarbon yang ditemukan, namun tidak ada penemuan komersial. Sebagian besar pengeluaran yang dikeluarkan pada tahun 2021 terkait dengan studi G&G, pengeboran sumur eksplorasi, G&A termasuk lokal konten	Carnarvon Petroleum Timor Unip. Ltd.	N/A	Minyak	29-08-2019	*
TL-OT-17-08	Selama tahun 2019 dan setelah selesainya interpretasi seismik, operator mengidentifikasi 11 prospek yang layak dibor. Akuisisi data seismik 2D dalam PSC TL-OT-17-09 selesai pada bulan Oktober 2019 dan pemrosesan serta interpretasi data seismik sedang dilakukan pada tahun 2020. Pada tanggal 27 Oktober 2021, pengeboran darat pertama untuk PSC TL-OT-17-08 di sumur Feto Kmaus di Suai, Covalima diluncurkan. ANPM selanjutnya menerbitkan Persetujuan Pengeboran (ATD) lainnya pada tanggal 24 Desember 2021 untuk sumur Kumbili-1 (Liurai). Sumur tersebut mulai dibor pada tanggal 26 Desember 2021. Pengeboran masih berlangsung dan diharapkan mencapai kedalaman target pada akhir Februari atau Maret 2022. Mayoritas pengeluaran yang dikeluarkan pada tahun 2021 di kedua PSC tersebut terkait dengan pengeboran kegiatan sumur eksplorasi, G&A termasuk lokal konten.	Timor Resources Pty Ltd	TIMOR GAP ONSHORE BLOCK, UNIPESSOAL, LDA	Minyak & gas	26-06-2017	*
TL-OT-17-09		Timor Resources Pty Ltd	TIMOR GAP ONSHORE BLOCK, UNIPESSOAL, LDA	Minyak & gas	26-06-2017	*

Nomor lisensi	Keterangan	Operator	Mitra Usaha Bersama	Bahan yang diekstraksi	Tanggal aplikasi	Tanggal berlaku
TL-SO-T 19-16	Saat ini PSC berada pada tahap eksplorasi dan kontraktor fokus pada studi G&G. Untuk tahun 2021, sebagian besar pengeluaran terkait dengan akuisisi dan interpretasi data seismik, G&A termasuk lokal konten.	SundaGas Banda Unipessoal, Lda	TIMOR GAP Chuditch, Unipessoal, Lda	Minyak	19-12-2019	*
TL-OT-21- 17	(PSC) darat ini diberikan kepada Blok TIMOR GAP Pualaca, Unipessoal, Lda., anak perusahaan dari perusahaan minyak nasional Timor-Leste TIMOR GAP, E.P. sebagai operator tunggal (100%) yang ditandatangani pada tanggal 7 Desember 2021. Saat ini, PSC tersebut memasuki tahun pertama periode pertama dan berfokus pada studi G&G. Pada tahun 2022, PSC tersebut baru saja menyelesaikan tahun pertama periode eksplorasi dan Blok TIMOR GAP Pualaca telah berhasil memperoleh data Full Tensor Gravity (FTG) di wilayah PSC tersebut.	TIMOR GAP Pualaca Block	N/A	Minyak & gas	07-12-2021	*

G. Sumber Daya Minyak dan Gas Bawah Laut



H. Blok Darat TIMOR GAP



I. Blok Baru Pasca Dekrit Hukum No. 15/2019

